

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

# KOMINFO next



## PON XX

PEKAN OLAHRAGA NASIONAL

# PAPUA

## 2021

Edisi 34  
Oktober 2021



## Pengamanan Spektrum Frekuensi Radio

PON XX Papua

Akses Telekomunikasi  
Terjamin:

**Papua Bangkit,  
Indonesia Maju**

Layanan  
Telekomunikasi  
Optimal  
Dukung Kesuksesan  
PON XX Papua

Dukungan  
Komunikasi  
Publik

Di Balik Kesuksesan  
PON XX Papua

Sumber Foto: ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa/YU

# TIM REDAKSI

**Pengarah:**  
Mira Tayyiba

**Wakil Pengarah:**  
Phillip Gobang

**Pemimpin Redaksi:**  
Rhina Anita

**Wakil  
Pemimpin Redaksi:**  
Daoni Diani Hutabarat

**Redaktur Pelaksana:**  
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur  
Pelaksana:**  
Viskayanesya

**Redaktur:**  
Frans Bambang Irawan  
M. Taufiq Hidayat  
Verawati  
Annisa Bonita P.  
Walbertus Natalius W.  
Primus A Latu B.

**Reporter:**  
Yusuf  
Ahmad Irso Kubangun  
Meita Pusparini  
Emild Kadju

**Fotografer:**  
Agus Yudi Harsono  
Doni Paulus Sumule  
Sri Indrati Novinarsari  
Indra Kusuma

**Desain & Layout:**  
Adista Winda Rizka  
Rahma Aulia Indroputri  
Lamdza Rachmattunisa  
Dhenty Febrina Sahara  
Annas Yudistira Saputra

**Produksi:**  
Fahmie Trihatin J.

**Alamat Redaksi:**  
Biro Humas Kementerian  
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat  
No. 9, Jakarta Pusat

# Salam Kenal

## Para Pembaca Kominfo Next yang budiman,

Ini adalah awal perjumpaan kita; perjumpaan saya dan Anda (para Pembaca) yang menjadi 'kita' dan tentunya akan tertarik dalam sebuah 'buku' yang namanya: Perjuangan Bersama Mewujudkan Indonesia Digital.

Bila pada Kominfo Next edisi sebelumnya, Plt. Kepala Biro Humas (demisioner) yang juga merupakan Pemimpin Redaksi (Pemred) Kominfo Next, Pak Ferdinandus Setu mengakhiri Surat MMB9 dengan kata 'Pamit,' maka pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala Biro Humas, sekaligus Pemred yang baru dari Kominfo Next akan memulai edisi ini dengan kata 'salam kenal.'



*Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishment toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people attain uncommon results.*

## Para Pembaca yang saya kasihi,

Pada awal kisah lembaran perjumpaan ini saya hendak mengutip quote dari seorang filantropi asal Amerika Serikat, Andrew Carnegie:

*"Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishment toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people attain uncommon results."* (Kerja tim adalah kemampuan untuk bekerja sama menuju visi bersama. Kemampuan untuk mengarahkan pencapaian individu menuju tujuan organisasi. Kerja tim memungkinkan orang biasa mencapai hasil yang tidak biasa).

Pernyataan Carnegie di atas menunjukkan kepada kita, bahwa kunci keberhasilan dalam konteks organisasi ialah kerjasama. Tak dimungkiri bahwa kolaborasi dan sinergi yang termaktub di dalamnya, akan membawa organisasi tersebut pada pemenuhan visi atau bahasa sederhananya ialah berhasil. Bahkan lebih dari itu, organisasi dan segenap anggotanya akan mengalami transformasi ke arah yang lebih tinggi.

### Rhina Anita

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat
- **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**



Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebagai organisasi/lembaga negara yang membidangi sektor transformasi digital, terus berupaya membangun sinergi dan kerjasama, baik itu secara internal maupun eksternal, guna mewujudkan visi besar Indonesia Maju, Makin Digital Makin Maju.

“Alone we can do so little, together we can do so much.”

## Para Pembaca yang saya banggakan,

Majalah Kominfo Next edisi ini akan mengusung tema besar tentang Dua Tahun Kepemimpinan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate. Pada edisi ini, kami akan mengelaborasi berbagai progres futuristik yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo selama dua tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Menteri Johnny Plate.

Beberapa hal yang diangkat adalah tentang pengimplementasian Peta Jalan Indonesia Digital yang meliputi akselerasi transformasi pada sektor infrastruktur digital, masyarakat/komunitas digital, ekonomi digital, pemerintahan digital, dan komunikasi publik.

Pada sektor infrastruktur digital, Kementerian Kominfo berupaya menuntaskan permasalahan seputar disparitas aksesibilitas internet, khususnya di wilayah 3T melalui pembangunan *Base Transceiver Stations* (BTS). Pada sektor ini, Kominfo berupaya mengimplementasikan jaringan 5G untuk wilayah komersial. Kominfo juga saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi *Analog Switch Off* (ASO) agar bisa segera diimplementasikan di Indonesia. Kemudian yang terbaru dan masih menjadi percakapan publik ialah *grand design* pengimplementasian Satelit Nano Indonesia.

Selanjutnya pada sektor Masyarakat Digital, Kominfo terus membuat program pengembangan sumber daya manusia (SDM), mulai dari pelatihan yang sifatnya *basic*, *intermediate*, hingga *advance*.

Pada sektor ekonomi digital, Kominfo terus mendorong pengembangan UMKM berbasis digital hingga program pengembangan startup digital, dengan target 30 juta UMKM digital di tahun 2024, yang mana saat ini sudah ada sekitar 11 juta UMKM digital Indonesia dan beberapa di antaranya sedang dalam tahap *scaling-up*.

Pada sektor Pemerintahan Digital, Kominfo tengah membangun sistem Pusat Data Nasional atau data center berbasis *cloud* milik negara menuju Satu Data Indonesia, dengan target pengimplementasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan beroperasi penuh pada tahun 2023.

Kemudian pada sektor komunikasi publik, Kominfo sebagai *Government Public Relations*, terus melakukan diseminasi informasi publik pemerintahan secara holistik, melakukan klarifikasi terhadap narasi-narasi hoaks, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi secara berkala dengan menunjukkan bukti-bukti yang akurat dan terpercaya sebagai kontra narasi.

Dalam upaya mewujudkan akselerasi transformasi digital, tentunya Kementerian Kominfo tidak berjalan sendirian di tengah lautan disrupsi. Kominfo justru terus ‘merayu semesta’ dengan cara membangun kolaborasi dan sinergitas dengan multipihak yang sifatnya *pentahelix*, yaitu sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat/komunitas, akademisi, dan awak media.

Mengakhiri Surat MMB9 ini, saya hendak mengutip pernyataan dari seorang penulis terkenal asal Amerika Serikat, Helen Keller, “Alone we can do so little, together we can do so much.”

*Selamat membaca!*



*Selamat Citas*

CAPAIAN KEMENTERIAN KOMINFO YANG  
MERAH PENGHARGAAN SEBAGAI  
BADAN PUBLIK KATEGORI INFORMATIF  
PERINGKAT KEDUA DARI

# ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021



# Daftar

# Isi

---

2 Surat dari MMB 9

6 Rak Buku

12 Teknologi & Gadget

16 KominfoPedia

18 Kabar Istana

22 Liputan Utama

40 Liputan Khusus

64 Gagasan

72 Kominfo Daerah

76 A-Z PeduliLindungi

90 KomEvent

94 Jurnal Foto

100 OpiNext

102 Portal Kominfo

110 Lintas Kominfo

116 Top 10 Hoaks

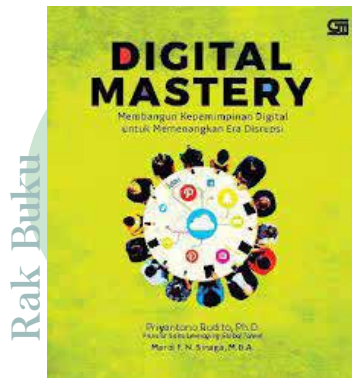


# Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B  
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat  
08.30 s.d 15.30



Rak Buku

Penulis :  
**Priyantono Rudito, Ph.D.,  
Mardi F.N. Sinaga, M.B.A.**

### *Digital Mastery:* Membangun Kepemimpinan Digital untuk Memenangkan Era Disrupsi

Disrupsi digital adalah momok menakutkan bagi perusahaan yang masih dikelola secara konvensional. Untuk sukses di era disrupsi, perusahaan harus melakukan transformasi digital untuk mencapai posisi *Digital Masters*. Buku ini dijelaskan mengenai *Digital Mastery* yang lebih banyak ditentukan oleh faktor manusia seperti kepemimpinan digital, budaya digital, dan pola pikir digital. Oleh sebab itu, perusahaan harus membentuk sebanyak mungkin pemimpin digital sehebat Mark Zuckerberg, Larry Page, atau Elon Musk di dalam organisasi. Untuk membentuk Digital Masters, buku ini mengusulkan setiap perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mirip *Silicon Valley* (*Silicon Valley-like environment*) untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin digital yang mumpuni. *Be a digital masters... and disrupt your industry!*



Rak Buku

Penulis :  
**Sri Wintala Akhmad**

### Kronik Perang Saudara dalam Sejarah Kerajaan di Jawa (1292-1757)

Buku ini menyajikan kronik perang saudara yang terjadi di kerajaan-kerajaan Singhasari, Dhaha, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Kartasura, hingga Surakarta. Dikisahkan detail bagaimana perebutan kekuasaan yang menghalalkan darah saudara mereka sendiri. Pembaca pun akan mendapatkan pengetahuan secara lengkap mengenai Perang Bubat, Perang Paregrek, Perang Sudarma-Wisuta, dan Perang Suksesi Jawa I-III.



Penulis :  
**Rokayah, dkk.**

### Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintahan

Panduan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait penggunaan fasilitas media sosial bagi lembaga pemerintahan secara maksimal. Pembahasan dimulai dengan memberikan pemahaman dasar

mengenai pengertian media sosial, langkah-langkah penyusunan program, pembuatan dan distribusi konten hingga evaluasi kegiatan media sosial lembaga pemerintahan itu sendiri. Ada empat kanal media sosial yang dipaparkan dalam panduan ini; Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube. Panduan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pembaca dalam melaksanakan program media sosial yang menyeluruh dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu lembaga pemerintahan.

**Meilawati ,**  
Pustakawan Ahli Muda  
Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal



Penulis :  
**Agung Laksamana**

### *Public Relations In The Age Of Disruption: 17 Pengakuan Profesional Pr & Kunci Sukses Membangun Karier Pada Era Disrupsi*

Dampak perubahan zaman yang demikian cepat dirasakan hampir semua bidang kehidupan. Anda mungkin berpikir kecanggihan dunia teknologi hanya mendisrupsi dunia bisnis. Padahal, kecanggihan teknologi juga telah mendisrupsi profesi humas. Disrupsi tidak hanya mempengaruhi cara humas-humas *professional public relation* untuk segera mengatur strategi jika tidak ingin bernasib seperti Nokia atau Kodak. Buku ini memberi jawaban atas segala kegelisahan, juga mencakup tips sukses para praktisi humas sebagai bekal menyiapkan diri di era disrupsi ini.

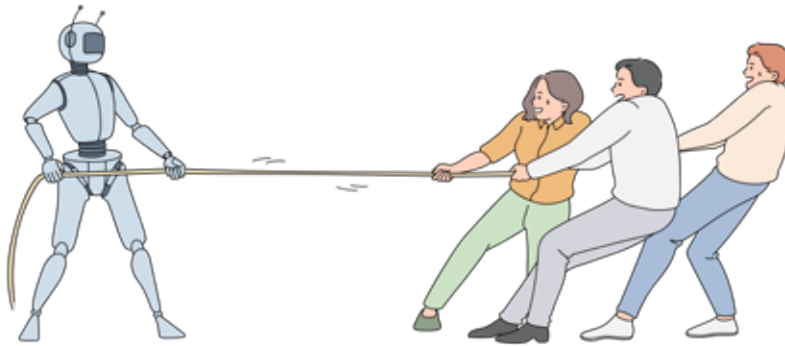


# Be Surprising, Be Social, Be Scarce:

## Bagaimana Agar Tetap Relevan di Era AI dan Otomasi

**Ivan Atmanagara,**

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Subkoordinator Kerja Sama  
Sekretariat Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika



**C**erita tentang kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) versus manusia adalah cerita klasik dalam budaya populer. Dalam suatu episode *The Jetsons* (1962), George Jetson yang mengharapkan promosi di kantornya justru digantikan oleh robot bernama Uniblax, yang lebih sopan dan bisa melakukan semua tugas George (bahkan membuat segelas kopi dari kepalanya). George akhirnya dijadikan asisten Uniblax.

Persepsi mengenai pasukan robot yang mengambil alih pekerjaan manusia begitu melekat dan mendistorsi pemikiran kita mengenai AI. Tapi sebetulnya AI dan otomasi sudah lama terintegrasi di tempat kerja kita tanpa disadari. Wujudnya mungkin tidak sedramatis *The Jetsons*, tetapi berlangsung secara bertahap, berupa pemotongan gaji, pengurangan jumlah tim, dan berkurangnya lowongan pekerjaan karena efisiensi teknologi.

Kevin Roose, jurnalis teknologi *The New York Times* mengupas fenomena ini di dalam buku terbarunya, *Futureproof: 9 Rules for Humans in the Age of Automation* (2021). Roose berpendapat bahwa peran AI yang tak kasat mata inilah yang perlu disikapi dengan kritis.

Setidaknya terdapat dua isu yang jarang diangkat dalam debat mengenai AI dan otomasi dalam konteks ini: transfer peran dan relasi kuasa antara teknologi dan manusia.

Sebuah program yang dikembangkan start-up bernama [LawGeex](#)<sup>1</sup> dapat mengidentifikasi celah hukum dalam dokumen kontrak dalam hitungan detik. Algoritma komputer bernama COIN yang digunakan JP Morgan sejak 2017 mampu mereviu dokumen

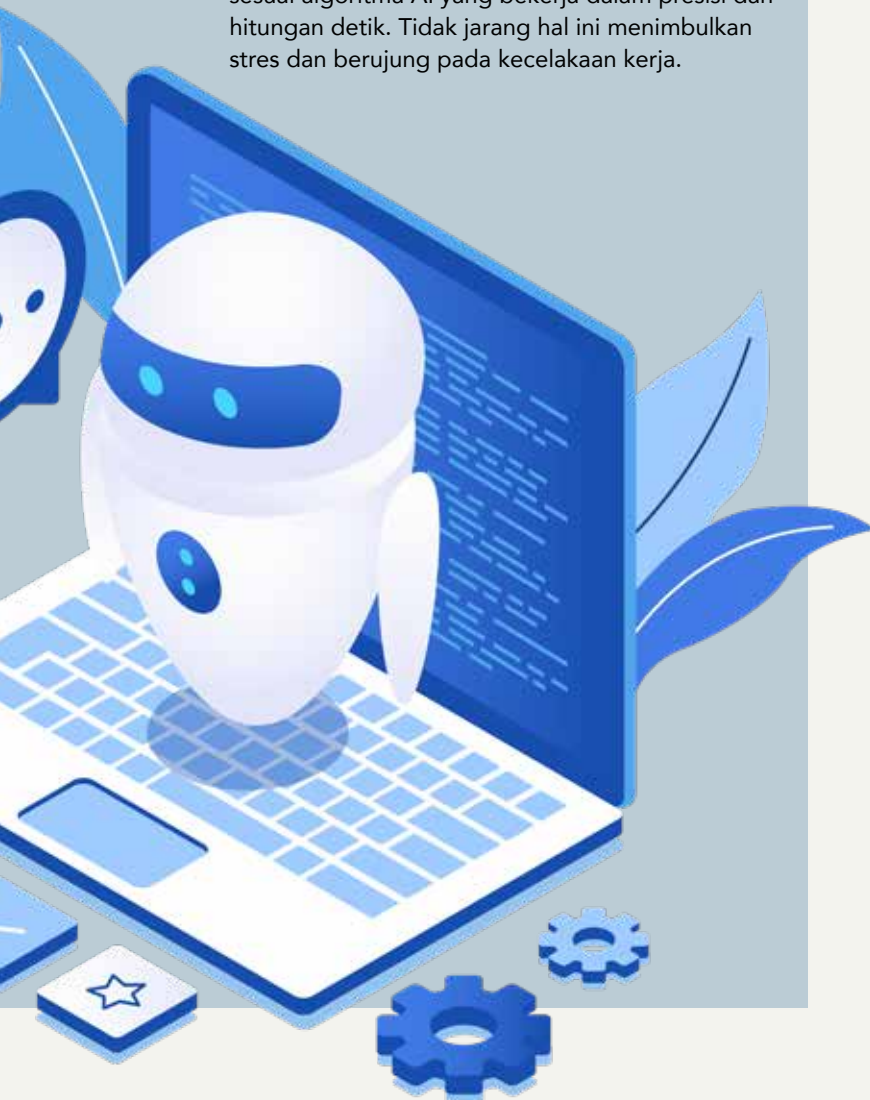
<sup>1</sup> <https://www.lawgeex.com/resources/whitepapers/aivslawyer/>



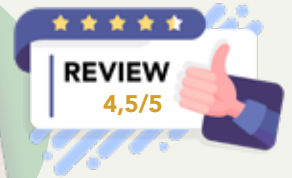
keuangan secara instan. Artikel berita sepanjang 150-300 kata saat ini dapat dikerjakan oleh *bot* di *Associated Press*, lengkap dengan sajian data dan gaya penulisan standar jurnalisme Amerika. Jenis pekerjaan yang sifatnya repetitif, dapat diprediksi, dan rutin kemungkinan besar akan diambil alih oleh AI.

Berikutnya, isu relasi kuasa dalam perusahaan yang didominasi teknologi dengan perlakuan terhadap pekerja. Perusahaan *e-commerce* terbesar di dunia, Amazon, yang menggunakan AI dan *machine learning* untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sering dikritisi karena memperlakukan pekerjanya seperti mesin.

Di dalam *warehouse* Amazon, para staf manusia justru dikendalikan oleh AI. Apa yang harus dikemas, diangkut, dan diproses, semuanya harus sesuai algoritma AI yang bekerja dalam presisi dan hitungan detik. Tidak jarang hal ini menimbulkan stres dan berujung pada kecelakaan kerja.



Book Review



### **Futureproof:**

9 Rules for Humans in the Age of Automation

#### **Penulis :**

Kevin Roose

#### **Penerbit :**

Random House (9 Maret 2021)

#### **Halaman :**

256 Halaman

#### **ISBN-10 :**

059313334X

#### **ISBN-13 :**

978-0593133347

Banyak laporan bahwa staf di [Amazon<sup>2</sup>](#) selalu berada dalam tekanan, bahkan harus buang air kecil dalam botol, karena khawatir waktu ke kamar mandi akan mengurangi produktivitas, yang dapat berujung pada pemecatan (AI kemudian menentukan siapa yang dipecat dan siapa yang direkrut).

Contoh lain dalam konteks relasi kuasa antara AI dan manusia adalah maraknya pekerja "*ghost work*" di perusahaan teknologi seperti Facebook dan YouTube untuk mengisi *gap* yang belum dapat dilakukan AI.

Para "*moderator*" ini direkrut secara masif untuk menyaring konten-konten ilegal, seperti pornografi anak, sadisme, ujaran kebencian, dan sebagainya sehingga kita dapat bermedia sosial dengan nyaman.

Mereka adalah buruh manusia yang diupah sangat rendah (dan mudah digantikan) dengan pekerjaan yang monoton bahkan traumatis, untuk menciptakan apa yang disebut Kate Crawford dalam *Atlas of AI* sebagai "*ilusi*" yang memperlihatkan kepada pengguna bahwa AI bekerja dengan baik.

<sup>2</sup> <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56628745>



Perkembangan AI dan otomasi sejatinya tidak bisa dilepaskan dari isu politis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun pada setiap tahapan revolusi industri, kita terlalu berfokus pada teknologi dan abai dengan isu manusia, seperti eksploitasi jam kerja, upah, dan penggerusan hak-hak buruh.

Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, Karl Marx menulis bahwa dengan penggunaan teknologi yang eksekutif, manusia telah kehilangan karakter sebagai pekerja dan direduksi menjadi “*embel-embel dari mesin*”.

Ironisnya, observasi dua abad yang lalu ini ternyata masih relevan di era Industri 4.0. Seiring berkembangnya AI dan otomasi yang digunakan perusahaan-perusahaan teknologi demi efisiensi, tidak jarang menuai eksploitasi bagi pekerja manusia.

Sayangnya Roose tidak menyentuh hal ini lebih dalam. *Futureproof* ditulis lebih sebagai refleksi personal atas pengalamannya sebagai jurnalis yang sehari-hari berhadapan dengan teknologi. Satu hal yang dapat dimengerti oleh pembaca awam.

Pada paruh kedua bukunya, Roose menawarkan kiat-kiat agar kita tetap dapat bersaing secara kompetitif di era otomasi. Salah satunya yang menurut saya menarik yaitu perlunya menguasai keterampilan yang sulit ditiru oleh AI, yaitu 3S: *surprising, social, & scarce*.

Walaupun dapat mengalahkan *Grand Master* catur, AI akan sulit menggantikan guru TK atau petugas bandara, misalnya, yang pekerjaannya seringkali berhadapan dengan hal-hal tak terduga dan membutuhkan respon cepat.

Profesi dengan elemen sosial juga akan sulit ditandingi oleh mesin, seperti pramugari, barista, dan penata rambut, karena koneksi emosional belum dapat dikuantifikasi.

Insan kreatif yang dapat memadukan berbagai keahlian akan semakin relevan di era otomasi. Desainer grafis yang juga menguasai alat musik akan sulit ditandingi AI. Staf administrasi yang mahir membuat infografis tidak perlu khawatir digantikan mesin.

Namun pekerjaan tradisional lain sebetulnya juga dapat dieskalasi menggunakan elemen 3S tersebut. Seorang pengacara tidak melulu harus meneliti dan menulis brief hukum, tetapi juga mampu berperan sebagai “*legal therapist*” dengan menumbuhkan rasa percaya kepada kliennya.

Seorang dokter di masa depan akan dinilai bukan hanya dalam menjalankan protokol pengobatan, tetapi dari caranya berinteraksi dan berempati kepada pasiennya. Seorang jurnalis, seperti Roose sendiri, harus mampu menulis kolom yang menyentuh pembaca ketimbang sekadar menyampaikan informasi.

Pengembangan AI dan otomasi dapat menjadi kekuatan yang memberdayakan. Di luar korporat elit, peneliti AI sedang mengembangkan *machine learning*, aplikasi, dan *wearables* untuk membantu kehidupan komunitas marjinal, mendeteksi penyakit serius secara akurat, meningkatkan pelayanan pemerintahan, atau mengurangi emisi karbon.

Inilah narasi AI yang semestinya kita dukung dan pelajari, karena membuat dunia menjadi lebih baik.

# Tata Cara Pendaftaran Ruang Buku Kominfo

Ruang Buku Kominfo adalah Akses Koleksi Digital Perpustakaan Kementerian Kominfo

1



Kirimkan nama, NIP, e-mail, & satuan kerja ke:

[perpustakaan@mail.kominfo.go.id](mailto:perpustakaan@mail.kominfo.go.id)

Subjek Email :  
Pendaftaran Ruang  
Buku Kominfo

2



Akan ada e-mail  
balasan dari  
perpustakaan  
kominfo berupa  
username/email  
dan password

3



Unduh "Ruang  
Buku Kominfo"  
di playstore/  
appstore



4 Masukan  
username/email  
dan password



5 Klik buku yang  
ingin anda pinjam  
lalu klik pinjam



6 Selamat  
menikmati layanan  
EPerpustakaan

Unduh Ruang Buku Kominfo di sini :



Contact Person :  
Agung (0813-8336-4421)



**Masker**  
*/Mask/*

**TEKNO  
LOGI  
& GAD  
GET**

*a covering made of fiber or gauze and fitting over the nose and mouth to protect against dust or air pollutants, or made of sterile gauze and worn to prevent infection of the wearer or (in surgery) of the patient.*

## Masker Aman Nan Canggih

Pandemi Covid-19 sudah berjalan 19 bulan sejak pertama kali diumumkan di Indonesia pada Maret 2020 lalu. Selama itu pula, berbagai program penanganan telah digulirkan pemerintah, mulai dari program #diRumahAja, menggalakkan budaya 3M hingga 5M, serta program vaksinasi yang saat ini terus digenjut untuk mencapai target 208,2 juta masyarakat yang tervaksinasi. Di tengah pelaksanaan program ini, apresiasi diberikan oleh John Hopkins University CSSE Covid-19 Data yang menyatakan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga 58% dalam kurun waktu 2 minggu sejak kenaikan kasus di periode Juni – Juli 2021 lalu.

Tentunya, hal ini membanggakan bagi kita. Namun, patut kita sadari bahwa Covid-19 masih ada di sekitar kita. Sehingga *euphoria* terhadap prestasi penanganan Covid-19 saat ini, musti disikapi

dengan bijak oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain terus mendorong program vaksinasi, pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta memakai masker, tidak boleh kendor sedikitpun, bahkan sudah harus menjadi budaya masyarakat jaman *now*. Saat ini, tidak lengkap rasanya jika keluar rumah tanpa membawa masker dan peralatan *hand sanitizer*.

Masker sebagai salah satu peralatan wajib ketika beraktivitas di luar, berevolusi dengan beragam bentuk, corak, maupun fungsinya. Naa Sobatkom, kali ini, rubrik gadget dan teknologi akan membahas teknologi masker yang sudah berkembang selama beberapa bulan ini. Yuk kita simak.

Sumber Foto : Unsplash

## LG Puricare Wearable

Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan udara yang dihirup dalam berbagai aktivitas, membuat LG meluncurkan perangkat air purifier portable yang bisa digunakan dimana saja, dan tentunya, dalam bentuk masker. Masker air purifier buatan LG ini, merupakan generasi kedua, setelah generasi pertamanya diluncurkan pada akhir tahun 2020.

Dengan tetap menggunakan HEPA Filter yang memiliki tingkat efektivitas penyaringan udara yang optimal dalam menghalau bakteri, virus, serta allergen yang melayang di udara, generasi terbaru LG Puricare ini memiliki dimensi yang lebih kecil dan ringan dibanding pendahulunya. Dilansir dari situs resmi LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)), masker yang diproduksi di Korea ini memiliki dimensi 142x109x52 mm dengan berat 94 gram.

Masker purifier ini dilengkapi dengan **baterai Li-on Rechargeable 1000 mAh yang bisa beroperasi hingga 8 jam**. Untuk mengoperasikan dan melakukan setting, masker ini dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth 5.0 dan juga voice recognition. Produk ini bisa Sobatkom tebus dengan harga Rp. 2.499.000 melalui marketplace atau outlet resmi LG.

## Masker Pendeteksi Covid-19

Masker, dimasa pandemi Covid-19 saat ini, berfungsi untuk melindungi, terutama dari penularan virus SARS-CoV-2. Namun apa jadinya jika ternyata masker yang kita pakai, bisa juga kita gunakan untuk mendeteksi kehadiran virus ini? Sebuah tim peneliti di Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering di Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology telah menemukan cara untuk menanamkan reaksi biologi sintesis ke dalam kain, menciptakan biosensor yang bisa dipakai untuk mendeteksi patogen dan racun.

Tim ini telah mengintegrasikan teknologi ke dalam masker wajah standar untuk mendeteksi keberadaan virus SARS-CoV-2 dalam napas pasien. Masker yang diaktifkan dengan tombol ini, memberikan hasil dalam waktu 90 menit pada tingkat akurasi yang sebanding dengan tes PCR. Pencapaian tersebut dilaporkan dalam Nature Biotechnology. Namun Sobatkom musti bersabar ya, karena masker ini masih pada tahap prototype dan belum beredar secara luas di masyarakat.

## Razer's Project Hazel

Perusahaan perangkat aksesoris game, Razer, seakan tidak ketinggalan dalam memanfaatkan pasar pengguna masker di tengah pandemi Covid-19 yang melanda. Melalui Project Hazelnya, Razer menghadirkan konsep masker berbasis N-95. Masker ini memiliki fitur active ventilation dan auto sterilization untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna dan juga tentunya keamanan dari paparan virus.

Selain fitur kesehatan, masker ini juga dilengkapi dengan lampu LED di dalam maskernya, yang memungkinkan mulut dari penggunanya bisa terlihat ketika kondisi minim cahaya. Bagi yang sering ragu, suara vocal yang keluar akan kecil karena tertutup masker, kini tidak perlu khawatir. Masker ini dilengkapi dengan algoritma audio-processing khusus, yang akan membuat suara pemakainya lebih jelas dan natural. Jadi, buat SobatKom yang suka jadi MC, moderator, ataupun narasumber yang diharuskan untuk bicara panjang lebar, SobatKom tidak perlu khawatir, performa suara tetap bagus dan juga tetap aman dari Covid-19.



Lantas, berapa kira-kira harga masker ini? Pihak Razer belum mengkonfirmasi harga masker Project Hazel ini, karena sampai dengan saat ini, statusnya masih concept. Namun siapa tahu, dua atau tiga bulan lagi ternyata Razer merilis masker ini, siap-siap aja Sobatkom untuk merogoh kocek lebih dalam untuk masker hi-tech ini.

### Sumber Foto :

Unsplash

<https://www.cnet.com/health/ces-2021-razer-project-hazel-is-a-high-tech-n95-mask-for-covid-19-times-that-looks-neat-too/>

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# 5G





The image shows a browser window with the address bar containing 'https://www.search.com/search=Kominfopedia5G'. The search bar contains 'Kominfopedia 5G'. The main content area has a heading 'Halo SobatKom!' followed by several paragraphs of text about 5G technology in Indonesia. A blue banner contains a list of 2G, 3G, 4G, and 5G characteristics. The text continues with details about latency and the timeline of 5G commercialization.

**Kominfopedia** X

← → ↻ <https://www.search.com/search=Kominfopedia5G> ★ ☰

**Search** Kominfopedia 5G 🔍

**Halo SobatKom!**

Sudah tahu kan, bahwa Indonesia tengah bersiap menyambut 5G? Pemerintah saat ini tengah menyiapkan peta jalan (*road map*) penerapan teknologi 5G di Indonesia, dan bahkan beberapa operator sudah mulai meluncurkan layanan teknologi generasi kelima ini.

5G adalah telekomunikasi seluler generasi ke-5. Secara teori 5G dapat menggunakan spektrum pada gelombang milimeter dari 24.5 Ghz sampai 52.6 Ghz, tapi dengan gelombang milimeter yang mudah terganggu oleh uap dan kelembaban di atmosfer, menjadi kurang praktis digunakan. Nah, di Indonesia, 5G menggunakan spektrum yang sudah digunakan untuk layanan telekomunikasi.

Dalam skenario yang paling ideal, menggunakan spektrum mmWave (*millimeter wave*), 5G tercatat bisa mencapai kecepatan *download* setinggi 1,8 Gbps.

5G bukan hanya tentang kecepatan *transfer* data yang lebih tinggi dibandingkan 4G, tetapi 5G membuka kemungkinan pengembangan *use case* dan aplikasi yang lebih beragam & mutakhir sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi. Berikut perbandingan 5G dengan generasi pendahulunya:

**2G - panggilan suara, teks (SMS), dan tahap awal komunikasi data (GPRS)**  
**3G - mengakses internet secara mobile, tidak harus di depan komputer**  
**4G - memungkinkan video streaming dan banyak aplikasi Over-The-Top bermunculan**  
**5G - menurunkan delay time sehingga komunikasi multimedia lebih real time & mendukung Industri 4.0**

Nah, generasi kelima, selain kecepatannya meningkat, juga menurunkan latensi. Menurut KBBI, latensi adalah periode waktu yang dibutuhkan oleh salah satu komponen dalam sistem untuk menunggu komponen lain. Intinya waktu *lag*-nya berkurang. Saat kita menekan tombol kirim, jika awalnya butuh 100 milidetik, dengan teknologi 5G kecepatannya hanya membutuhkan 1 milidetik langsung sampai ke server dan segera diproses. Dengan 5G, perusahaan-perusahaan dapat mengimplementasikan IoT untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

Untuk menyediakan regulasi layanan 5G yang berkualitas bagi masyarakat luas dan pelaku industri, maka industri dan ekosistemnya perlu dikelola secara komprehensif. Pemerintah juga memberikan dukungan lewat lima aspek kebijakan, mulai dari regulasi, spektrum frekuensi radio, model bisnis, infrastruktur, hingga perangkat, ekosistem, dan talenta digital. Dalam periode tahun 2017-2020, Kementerian Kominfo bersama lima operator seluler telah berhasil melaksanakan 12 kali uji coba 5G termasuk saat Asian Games XVIII tahun 2018.

Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat ada 135 operator di 52 negara yang telah meluncurkan layanan 5G secara komersial. Dari 52 negara tersebut, 10 di antaranya berada di kawasan Asia Pasifik, dan 11 negara Asia Pasifik lainnya telah mengumumkan rencana untuk segera meluncurkan 5G komersial.

Referensi:  
<https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/millimeter-wave-MM-wave>

# Indonesia Berpeluang Jadi Pemain Utama

## Ekonomi Syariah dan Industri Halal Dunia

**P**residen Joko Widodo menyampaikan, dari tahun 2018 ekonomi syariah Indonesia terus naik peringkat hingga terakhir di tahun 2020 berada di peringkat 4 dunia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri halal di dunia. Terlebih, perkembangan dalam sektor ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan yang berarti.

Presiden Joko Widodo menyampaikan, dari tahun 2018 ekonomi syariah Indonesia terus naik peringkat hingga terakhir di tahun 2020 berada di peringkat 4 dunia. Meski demikian, Presiden meminta untuk tidak berpuas diri.

"Perlu ada upaya yang sinergis antar pemangku kepentingan agar ekonomi syariah kita tumbuh lebih pesat lagi. Dan itulah peran penting yang harus dimainkan oleh masyarakat ekonomi syariah," ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka Peringatan Hari Santri Nasional 2021 dan Peluncuran Logo Baru Masyarakat Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Oktober 2021.

Sebagai organisasi keumatan, Presiden berharap masyarakat ekonomi syariah (MES) dapat menjadi lokomotif ekonomi syariah yang membumi, menyentuh ekonomi umat, dan menggerakkan perekonomian yang inklusif, serta melahirkan banyak wirausahawan utamanya dari kalangan santri.

"Karena itu kita harus mendorong munculnya lebih banyak *entrepreneur*, wirausahawan dari kalangan santri dan lulusan pondok pesantren," tambahnya.

Presiden menuturkan, orientasi santri saat ini bukan lagi untuk mencari pekerjaan, tetapi menciptakan kesempatan kerja dan menebarkan manfaat yang lebih luas.

"Peran pendidikan di pesantren, madrasah, maupun pendidikan tinggi agama Islam sangat strategis. Mencetak lulusan yang inovatif dan berkewirausahaan, mencetak lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja, dan menjadi wirausahawan sosial yang sukses," tuturnya.

Selain itu, Presiden mengingatkan bahwa semangat kewirausahaan yang mulai tumbuh harus diikuti dengan percepatan inklusi keuangan. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung tumbuhnya wirausahawan baru.

"Saya berharap pesantren dan para santri dapat memanfaatkan berbagai program pembiayaan ini dengan baik sehingga pesantren dan para santri dapat makin berperan dalam memperkuat ekonomi umat," tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden juga menekankan pentingnya transformasi digital guna mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke dalam pasar global.

"Kita harus terus mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah kita untuk *go digital*, masuk ke toko *online*, masuk ke marketplace, masuk ke *e-commerce*, dan bisa masuk *supply chain* nasional maupun global dan menjadi pemain utama dalam pertumbuhan industri halal tingkat global," tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Acara juga dihadiri sejumlah tokoh agama dan santri dari beberapa pesantren.



Presiden Joko Widodo membuka Peringatan Hari Santri Nasional 2021 dan Peluncuran Logo Baru Masyarakat Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Oktober 2021.  
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

# Senang PTM Dimulai, Pelajar Apresiasi Program Vaksinasi Pemerintah

Presiden Joko Widodo berbincang dengan pelajar saat meninjau vaksinasi untuk pelajar di SMPN 1 Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 19 Oktober 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman

**P**emerintah mempersilakan sekolah untuk kembali melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas. Presiden menegaskan, PTM dapat dilakukan apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kabupaten/kota tersebut berada pada level 1, 2, atau 3.

"Suntik pertama sudah bisa tatap muka kemudian nanti setelah itu 3-4 minggu lagi suntik yang kedua," ucap Presiden saat berdialog bersama para pelajar melalui konferensi video di SMPN 1 Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Kamis, 19 Oktober 2021.

Selain meninjau vaksinasi pelajar di Kalimantan Utara, Presiden juga berdialog secara virtual bersama pelajar di 10 sekolah di daerah lain yang secara bersamaan melakukan vaksinasi massal.

Dalam dialog tersebut, para pelajar menyampaikan rasa terima kasih atas program vaksinasi massal yang terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu pelajar dari SMAN 3 Gorontalo, Siti, mengaku senang karena bisa kembali belajar tatap muka meskipun secara terbatas.

"Dengan program vaksinasi massal untuk pelajar dan santri, akhirnya kami bisa kembali ke sekolah. Bisa bersenda gurau dengan teman-teman, bertegur sapa dengan para guru, dan mengobati rasa kangen kami terhadap lingkungan sekolah," ujar Siti.

Perwakilan siswa lain dari MTs PKP Al Hidayah Provinsi Jambi, Ilham, mengaku rindu dengan suasana sekolah seperti dahulu. Ilham berharap dengan program vaksinasi tersebut ia dapat kembali bersekolah.

"Jujur Bapak, kami sangat rindu dengan suasana sekolah seperti dulu. Kami rindu bercengkerama, kami rindu bersekolah bersama-sama seperti dulu," ucap Ilham.

Meski telah dimulai PTM secara terbatas, Presiden mengingatkan kepada para siswa untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan sehingga PTM dapat dilakukan secara aman.

"Saya ingin mengingatkan pada anak-anak kalau nanti sudah mulai masuk kelas pembelajaran tatap muka dimulai, jangan lupa disiplin terhadap protokol kesehatan, selalu memakai masker, kalau habis kegiatan cuci tangan, jangan bergerombol, berkerumun," ujar Presiden.

Pada peninjauan vaksinasi kali ini, para pelajar tampak antusias menyambut kedatangan Presiden. Salah satu pelajar dari SMPN 1 Tarakan bahkan dengan berani membacakan puisi di depan Presiden. Selain itu, siswa tersebut juga menunjukkan sketsa wajah Presiden yang merupakan hasil karya salah satu siswa.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu sejumlah duta besar negara sahabat, perwakilan dari Bank Dunia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/senang-ptm-dimulai-pelajar-apresiasi-program-vaksinasi-pemerintah/>

# Wujudkan BUMN Go Global, Presiden Minta Adaptasi Teknologi Secepatnya

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 14 Oktober 2021.

Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev



**P**residen Joko Widodo menginginkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat bersaing di kancah internasional. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan merespons dan mengadaptasi secepat-cepatnya terhadap era revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, dan pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis, 14 Oktober 2021.

"Ini mau kita bawa, BUMN ini *go global*, bersaing di internasional. Jadi, ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi," ucap Presiden.

Kepala Negara meminta seluruh perusahaan BUMN untuk dapat beradaptasi pada model bisnis baru seiring dengan perkembangan teknologi, salah satunya dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan perusahaan global lainnya.

"Kalau mau cepat, kita beradaptasi itu, cara yang paling cepat adalah ber-partner, perusahaan global mana yang paling baik, ajak, pasti mau itu dengan kita," ucapnya.

Di samping itu, Presiden pun mengingatkan perusahaan BUMN untuk memperhatikan aspek perekonomian dan indikator tingkat efisiensi dari investasinya atau *internal rate of return* (IRR). "Tolong dihitung, karena apapun BUMN ini adalah perusahaan negara, *social impact*-nya dihitung juga. Dan yang paling penting, *review* terus keekonomiannya. Berhitung, kalkulasi, sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa," tutur Kepala Negara.

Presiden menuturkan, untuk dapat bertahan pada era revolusi industri 4.0, suatu perusahaan perlu menyiapkan SDM dan ekosistemnya agar dapat beradaptasi pada perkembangan teknologi tersebut.

"Yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi sudah menjadi keharusan dan tidak bisa tidak. Kita hanya hitungan kita, kita ini *balapan*," tandas Presiden.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/wujudkan-bumn-go-global-presiden-minta-adaptasi-teknologi-secepatnya/>



- LIPUTAN UTAMA -  
**#1**

# Layanan Telekomunikasi Optimal

## Dukung Kesuksesan PON XX Papua

Perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 sukses digelar di Papua pada 2-15 Oktober 2021 lalu. Digelar di empat kabupaten/kota di wilayah Papua, PON XX ini berhasil menorehkan prestasi nasional. Tercatat ada 90 rekor yang berhasil dipecahkan dari cabang-cabang olahraga yang masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), mulai dari cabang atletik, renang, angkat besi, menembak, angkat berat, hingga cabang selam. Bahkan Papua selaku tuan rumah turut meraih prestasi membanggakan dengan menduduki posisi empat besar klasemen pada PON XX ini.

Kesuksesan penyelenggaraan ajang akbar empat tahunan ini tentunya tak lepas dari dukungan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) serta layanan komunikasi publik yang prima. Raihan prestasi putra-putri terbaik Indonesia maupun keunikan budaya serta potensi sumber daya Tanah Papua tidak hanya tersiar di tanah air namun juga sejagat raya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, layanan telekomunikasi yang dimanfaatkan untuk mendukung PON XX 2021 merupakan bagian pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian pelaksanaan tugas Kementerian Kominfo dalam melakukan akselerasi transformasi digital.

"Secara khusus, pembangunan *the last mile* atau pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di seluruh pelosok Papua, baik di wilayah perairan maupun di tengah pegunungan. Di Provinsi Papua, Kominfo melalui BAKTI telah membangun 213 BTS eksisting 4G dan 244 BTS eksisting 4G di (Provinsi) Papua Barat pada tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2021 ini sedang berjalan dan tahun 2022 nanti (akan tuntas untuk semua wilayah)," ujarnya dalam Konferensi Pers bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jayapura yang berlangsung secara hybrid, dari *Media Center* Klaster Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (23/09/2021).



Sumber Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru/wsj.

Kementerian Kominfo telah membangun rute baru kabel fiber optik jaringan bawah laut yang terdapat di kedalaman 4.000 meter di sebelah utara Jayapura. Seluruh lokasi dan *venue* yang dijadikan tempat kompetisi olahraga dan sarana pendukung lainnya juga dipastikan memiliki akses komunikasi seluler 4G.

Di samping itu, Kominfo juga berkomitmen menjaga layanan telekomunikasi tetap berkualitas dengan berkoordinasi secara intensif dengan operator seluler. Dengan begitu, kapasitas dari trafik paket data jaringan telekomunikasi seluler 4G dapat digunakan secara optimal selama ajang olahraga tersebut berlangsung.

Berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan yang layanan telekomunikasi tersebut diambil mengingat akses komunikasi menjadi pilar penting dalam menyukseskan ajang olahraga PON Papua.

Menyangkut keandalan infrastruktur digital, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Latif, turut menambahkan bahwa TelkomGroup yang menjadi mitra resmi PON XX Papua untuk infrastruktur telekomunikasi saat ini memiliki infrastruktur terluas di

## Mengingat wilayah daratan dan lautan Papua yang luas, kami bekerjasama dengan Telkom merancang back up jaringan telekomunikasi untuk mendukung PON dan kegiatan masyarakat, serta pemberitaan di saat bersamaan,

Papua dari tiga penyelenggara seluler yang ada di wilayah tersebut.

BAKTI Kominfo menggunakan infrastruktur jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi Palapa Ring Timur untuk cadangan jaringan yang sudah dimiliki TelkomGroup. Cadangan jaringan dari BAKTI Kominfo ini akan digunakan untuk berbagai skenario, seperti kelebihan lalu lintas (*traffic*) komunikasi dan jaringan putus.

Lalu lintas telekomunikasi saat gelaran PON berlangsung diperkirakan sangat besar. Maka itu, pemerintah menyiapkan cadangan telekomunikasi terutama di lokasi penyelenggara pertandingan, penginapan atlet dan lokasi penyelenggara kegiatan.

Sinyal seluler untuk penyelenggaraan PON XX Papua disiapkan oleh Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan juga XL Axiata. Kementerian Kominfo pun telah mengadakan pengukuran sinyal di tempat penyelenggaraan PON XX Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan pelaksanaan PON Papua dapat sukses dalam tiga

hal sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses administrasi. Ia turut berharap masyarakat menikmati pesta olahraga empat tahunan dengan kegembiraan yang bisa menyebar hingga seluruh pelosok.

"PON adalah etalase Papua dan Indonesia di lingkungan global. Kita bisa menyampaikan pada dunia bahwa kita bisa menyelenggarakan pesta olahraga di tengah pandemi dengan tetap mentaati protokol kesehatan," tukas Menteri Johnny.

### Antisipasi Gangguan

Pemerintah turut mengantisipasi potensi gangguan jaringan telekomunikasi di wilayah Papua dan Papua Barat selama PON XX 2021 berlangsung.

"Mengingat wilayah daratan dan lautan Papua yang luas, kami bekerjasama dengan Telkom merancang *back up* jaringan telekomunikasi untuk mendukung PON dan kegiatan masyarakat, serta pemberitaan di saat bersamaan," jelasnya dalam Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah Papua yang digelar di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (24/09/2021).

Menurut Menkominfo, antisipasi gangguan jaringan telekomunikasi tersebut dilakukan dengan menyiapkan jalur cadangan yang mencakup wilayah Jayapura - Madang - Port Moresby - Guam - Manado sebagai alternatif pertama, dan wilayah Jayapura - Madang - Port Moresby - Sydney - Batam sebagai alternatif kedua.

"Dukungan dari sisi infrastruktur telekomunikasi tersedia dan memadai. Mudah-mudahan aman. Ini kami siapkan untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan telekomunikasi akibat dari kejadian alam, seperti misalnya terjadi aktivitas vulkanis bawah laut yang akan mengganggu keseluruhan jaringan maupun akibat dari ulah manusia sendiri di mana kabel bisa juga putus akibat dari jangkar atau karena perbuatan vandalisme berupa perusakan dan pembakaran tower yang merusak infrastruktur," jelasnya.



## Layanan 5G Optimalkan Sebarkan Narasi Baik

Selain menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) juga menyediakan *media center* di tiga klaster pelaksanaan pertandingan dalam PON XX 2021 Papua.

"*Media Center* ini ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Ketiga *Media Center* Klaster ini disiapkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dalam upaya mendukung produksi konten-konten positif terkait

penyelenggaraan PON XX Papua," jelas Menkominfo.

Fasilitas *Media Center* Kementerian Kominfo ini didukung dengan penggelaran layanan telekomunikasi jaringan 5G yang disiapkan oleh operator seluler Telkomsel, yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan dengan kualitas yang lebih baik, yang dapat menjangkau seluruh masyarakat secara nasional.

"Baik dari sisi kecepatan berita dan gambar yang lebih jernih. Saya berterima kasih kepada *Media Center* Kominfo karena bisa melakukan transmisi berita secara cepat kepada masyarakat. Mudah-mudahan, selanjutnya selama penyelenggaraan PON ini bisa berjalan dengan baik seperti yang kita bersama harapkan, sehingga suksesnya penyelenggaraan PON ini bisa dinikmati dan dirasakan secara

langsung oleh masyarakat nasional," tandasnya.

Selain jangkauan penyebaran informasi di level nasional, Menteri Johnny mengharapkan agar informasi mengenai PON XX Papua juga dapat menjangkau negara tetangga Indonesia.

"Sehingga etalase PON ini menjadi salah satu contoh *benchmark* bagaimana penyelenggaraan *event* nasional yang besar dilakukan selama masa pandemi dapat dilaksanakan dengan baik, ini yang kita harapkan bersama," ungkapnya.



Sumber Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.



LIPUTAN UTAMA  
#2

# Dukungan Komunikasi Publik

## di Balik Kesuksesan PON XX Papua

Kesuksesan pelaksanaan PON XX Papua pada 2 – 15 Oktober 2021 lalu tidak terlepas dari adanya dukungan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah. Layanan informasi dan komunikasi publik agar PON Papua sukses dan semarak tersebut di antaranya dilakukan dengan penyiapan kanal komunikasi berisi konten informasi melalui [www.infopublik.id/ponpapua](http://www.infopublik.id/ponpapua) dan fasilitas *media center* bagi para jurnalis yang terdapat di tiga kluster, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jayapura, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan dua hal utama yaitu dukungan infrastruktur telekomunikasi dan dukungan komunikasi publik untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan PON Papua. "Kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua juga tidak lepas dari dukungan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) serta layanan komunikasi publik yang prima," ujarnya.

Konten informasi dan kanal komunikasi memegang peranan penting dalam kesuksesan perhelatan olahraga nasional empat tahunan ini. Hal ini pula yang menjadi perhatian pemerintah. "Komunikasi publik untuk PON Papua, baik dari sisi sarana dan prasarana, *media center*, kanal komunikasi, dan konten-konten yang disajikan menggambarkan semarak olahraga sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujar Menteri Johnny.



Sumber Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

## Media Center di 3 Klaster

Dukungan komunikasi publik di antaranya dilakukan dengan menyiapkan *media center* oleh Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). *Media Center* Klaster Kominfo terdapat di tiga klaster pelaksanaan pertandingan dalam PON XX 2021 Papua yaitu, di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. *Media center* ini didukung dengan layanan telekomunikasi jaringan 5G sehingga layanan informasi mengenai penyelenggaraan PON XX Papua dapat dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia.

Secara umum keberadaan *media center* klaster Kominfo ini adalah sebagai pendukung *media center* Panitia Besar (PB) PON Papua. Dalam implementasi selama PON Papua berlangsung, dukungan antara *Media Center* Klaster Kominfo dan *Media Center* Panitia Besar PB PON dapat dirasakan kehadirannya di ruang publik dengan terciptanya ruang komunikasi publik yang positif, mencerahkan, dan bahkan menginspirasi untuk kemudian menumbuhkan semangat bersama mendukung kesuksesan PON XX Papua.

Koordinator *Media Center* Klaster Kominfo PON XX Papua, Moh. Taofiq Rauf, menjelaskan bahwa selain berkolaborasi dengan *Media Center* PB PON Papua, *Media Center* Klaster Kominfo ini didukung penuh oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika di tiga klaster, terutama untuk akses-akses narasumber lokal, akses lokasi peliputan, akses untuk mengundang media lokal, serta aspek teknis pelaksanaan seperti bantuan SDM peliputan, administrasi, dan pendistribusian bahan-bahan siap tayang.

“Selain menyediakan berbagai konten (teks *hardnews*, *feature*,

foto, dan video) yang *free* digunakan dan disebarakan kembali oleh media melalui *microsite* [www.infopublik.id/ponpapua](http://www.infopublik.id/ponpapua), masing-masing klaster *media center* Kominfo juga memfasilitasi awak media dalam memproduksi berita,” jelas Rauf.

*Media Center* Klaster Kabupaten Jayapura bertempat di Ballroom Hotel Allison, dan telah beroperasi pada 20 September hingga 15 Oktober 2021. *Working area* bagi jurnalis pada klaster ini mampu menampung 100 awak media. Sementara *Media Center* Klaster Kabupaten Mimika bertempat di Ballroom Hotel Mozza, beroperasi mulai 26 September hingga 15 Oktober 2021. Klaster ini memiliki daya tampung *working area* sebanyak 50 awak jurnalis.

Terakhir, Ditjen IKP Kominfo menyediakan *Media Center* Klaster Kabupaten Merauke yang bertempat di Gedung Perpustakaan Daerah Merauke. Operasional fasilitas ini mulai 20 September hingga 15 Oktober 2021, dengan daya tampung yang dapat mencapai 50 awak jurnalis dari media lokal di Kabupaten Merauke dan sekitarnya.

“Di *working area*, media lokal dan nasional disediakan 10 – 20 PC yang terhubung dengan jaringan internet yang cepat, printer, TV LED yang menampilkan pertandingan-pertandingan secara *real time*, serta rilis harian terkait pertandingan maupun sisi-sisi lain penyelenggaraan PON XX Papua,” ujar Rauf.

Pada ketiga *media center* tersebut juga disediakan ruangan konferensi pers untuk menggelar jumpa pers yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Tujuannya membantu peliputan non pertandingan di daerah setempat, untuk mengeksplor Papua dari sisi kekayaan alam, partisipasi publik, dampak ekonomi, dampak sosial dan lainnya.

Setiap minggunya dapat digelar 3 hingga 4 kali konferensi pers di masing-masing *media center*. “Ini sangat bermanfaat karena selain dapat memberikan ruang tanya jawab langsung terkait isu-isu yang perlu segera mendapat jawaban,” ungkap Rauf.

## Peran Media Center PON PAPUA

Lebih lanjut Koordinator *Media Center* Klaster Kominfo Rauf menambahkan, media nasional atau media lokal di luar Papua sangat terbantu dengan keberadaan *Media Center*, karena mereka tetap terupdate kondisi Papua selama PON berlangsung. Output akhir dari *Media Center* berupa rilis, berita, foto dan video dapat digunakan oleh media. Sehingga pemberitaan PON Papua tetap dapat mengisi ruang publik meski tidak banyak media yang menurunkan tim liputan ke PON PAPUA, di tengah keterbatasan penyelenggaraan PON di masa pandemi



“Media lokal yang berada di 4 klaster pertandingan (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke) merasa terfasilitasi oleh negara. Selain menyediakan tempat bekerja yang nyaman, mereka juga bisa saling berbincang bertukar informasi seputar penyelenggaraan PON. Teman-teman media lokal yang terfasilitasi lebih mudah diajak untuk menciptakan berita-berita bertendensi positif,” jelas Rouf.

Ruang publik dipenuhi dengan narasi-narasi positif penyelenggaraan PON, hal ini tentu selain karena kemudahan akses berita, foto, dan video bagi media-media yang tidak menurunkan tim ke Papua, juga karena cepat tanggapnya *Media Center* untuk mengidentifikasi isu-isu sensitif yang perlu segera *dicounter*.



**Sentani, Papua, Indonesia**  
 Jl. Raya Kemiri No.282, Hinekombe, Sentani, Jayapura, Papua, Indonesia  
 Lat -2.563896°  
 Long 140.500971°



**Sentani, Papua, Indonesia**  
 Jl. Raya Abepura - Sentani, Hinekombe, Sentani, Jayapura, Papua 99350, Indonesia  
 Lat -2.563680°  
 Long 140.500934°  
 11/12/21 06:53 PM





## Narasi Positif PON Papua

Dalam membangun komunikasi publik, kunci utamanya adalah kolaborasi untuk menciptakan komunikasi publik yang positif, mencerahkan, dan menginspirasi untuk menumbuhkan semangat bersama mendukung kesuksesan PON XX Papua.

“Tujuan salah satunya adalah bagaimana menciptakan ruang komunikasi publik yang positif, mencerahkan, dan bahkan menginspirasi untuk kemudian menumbuhkan semangat bersama mendukung kesuksesan PON XX Papua. Secara umum lagi semangat bersama untuk bangkit dari hantaman pandemi Covid-19,” jelas Rouf.

Microsite [www.infopublik.id/ponpapua](http://www.infopublik.id/ponpapua) telah aktif dua minggu sebelum pertandingan pertama digelar, yang juga didukung dengan kerja sama dengan *media center* InfoPublik.id yang tersebar di sekitar 150 daerah, berbagi produksi berita, *feature*, dan dokumentasi foto-foto seputar persiapan atlet daerah hingga sisi-sisi inspiratif persiapan menuju PON XX Papua.

Jelang pelaksanaan, kolaborasi kembali dilakukan dengan LKBN Antara, TVRI, RRI yang tergabung dalam redaksi bersama. Pertukaran konten juga masih dilakukan dengan berbagai pihak, khususnya dengan PB PON dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat

Narasi-narasi PON XX Papua menjadi bukti dan momentum bahwa bangsa Indonesia mampu bersatu, berolahraga dan berprestasi meski di masa pandemi. Atlet dan official, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat, menjadi bagian dari makna besar tersebut. Pada pelaksanaannya ajang nasional terbesar ini menunjukkan pada dunia bahwa Papua dan Indonesia secara umum, mampu berprestasi dan bersatu bangkit meski di tengah pandemi.

Dari sisi prestasi atlet, total 90 rekor baru dari beberapa cabang olahraga tercipta di PON XX Papua. Rekor PON, nasional bahkan rekor dunia tingkat junior. Artinya, di tengah pandemi, seluruh jajaran yang terlibat dari sisi ini, mampu menjaga momentum dan semangat setelah penyelenggaraan PON yang seharusnya digelar di tahun 2020.

Pesta olahraga inipun menorehkan catatan emas, bagaimana semua pihak bahu membahu menjaga penerapan protokol kesehatan. Perhelatan digelar di tengah pandemi, dan paparan virus Covid-19 tak terhindarkan. Namun selain menekan penyebarannya, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dan semua pihak dalam hal ini Dinas Kesehatan di masing-masing kluster mampu menjalankan fungsinya dalam *tracing* dan *tracking*.

Dengan sekitar 10 ribu peserta belum termasuk penonton, hanya ditemukan kurang lebih 83 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini menunjukkan *tracing* dan *tracking* berjalan dengan baik dan dilakukan ketat. Meski ada kasus, jika dilihat dari sisi yang berbeda itu justru menunjukkan bahwa protokol kesehatan dalam hal ini *testing*, *tracing* dan *treatment* dilakukan secara baik oleh semua pihak.

“Semangat PON Papua, persatuan dan prestasi dapat terwujud berkat sinergi dari berbagai lembaga yang berupaya menyukseskan perhelatan akbar ini. PON tidak hanya sebatas pesta olahraga, namun lebih dari itu adalah persatuan, sinergitas, momentum kebangkitan bangsa dari hantaman badai pandemi. Indonesia bisa bangkit bersama. Dari Papua untuk Indonesia,” ujar Rouf mengakhiri wawancara.

# RESS CONFERENCE

<https://www.ponxx2021papua.com/>

<https://infopublik.id/ponp>



Artikel ini disusun berdasarkan wawancara dengan Koordinator Media Center Klaster Kominfo PON XX Papua/Pranata Humas Muda Kominfo, Moh. Taofiq Rauf.



LIPUTAN UTAMA  
#3



# Pengamanan Spektrum Frekuensi Radio

## PON XX Papua



Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua semula dijadwalkan pada tahun 2020, namun karena adanya pandemi Covid-19 pelaksanaannya diundur ke tahun 2021, tepatnya pada tanggal 2 s/d 15 Oktober 2021. PON XX Papua dilaksanakan di empat klaster, yaitu Kota Jayapura (16 *venue*), Kabupaten Jayapura (14 *venue*), Kabupaten Mimika (9 *venue*) dan Kabupaten Merauke (6 *venue*), dengan mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin olahraga serta 11 cabang eksebisi. Dari seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan tersebut terdapat 681 nomor pertandingan dengan melibatkan 7.039 atlet.

Pada perhelatan PON XX Papua yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada hari Sabtu 2 Oktober 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal SDPPI turut memberikan dukungan dengan melaksanakan pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

(SFR) yang digunakan mulai dari upacara pembukaan, pertandingan di *venue-venue*, sampai pada acara penutupan di Stadion Utama Lukas Enembe.

Pada pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan tersebut, Ditjen SDPPI sukses mengamankan spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk mengendalikan jalannya acara seperti komunikasi panitia pelaksana, komunikasi artis pendukung dan personel acara, kamera wireless (RF Helicam), serta bermacam sensor dan kontrol yang digunakan saat acara berlangsung.

Suksesnya kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Spektrum Frekuensi Radio ini tidak lepas dari peran serta Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo yang secara khusus membentuk Tim Pengawasan Penggunaan SFR, yang terdiri dari Direktorat Pengendalian SDPPI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jayapura dan UPT Merauke, serta

personil dari 9 (sembilan) UPT Monitoring Frekuensi SFR pendukung yaitu Denpasar, Makassar, Manado, Manokwari, Medan, Palu, Pontianak, Samarinda, dan Ternate, yang bertugas melaksanakan monitoring frekuensi di *venue-venue* pertandingan yang tersebar di empat klaster PON XX Papua serta *media center* dan *broadcasting center* selama penyelenggaraan PON XX Papua tersebut.

Pada *venue-venue* pertandingan ini, frekuensi yang dimonitor adalah penggunaan frekuensi komunikasi

*Handy Talkie* (HT) dari panitia serta penggunaan beberapa sensor pendukung pertandingan. Selain itu juga petugas monitoring juga memantau frekuensi *wi-fi* pada band 2.4 dan 5.8 GHz agar aman dari interferensi. Secara umum tidak ditemukan adanya gangguan terhadap penggunaan SFR pada seluruh rangkaian kegiatan PON XX Papua, sejak pembukaan sampai dengan penutupan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 yang ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.







- LIPUTAN UTAMA -  
#4

# Akses Telekomunikasi Terjamin: Papua Bangkit, Indonesia Maju

(PON XX Papua) ini juga bisa berhasil dengan baik karena didukung dengan 5G experience, yang dilakukan oleh Telkomsel di Media Center Kominfo

Pembangunan dan konsistensi merupakan dua hal yang perlu menyatu, tidak bisa dipisahkan dan tanpa sekat. Pembangunan yang berkelanjutan adalah bentuk konsistensi dalam melaksanakan amanat rakyat dan negara. Di saat menggenjot pembangunan yang merata di seluruh pelosok negeri, maka dampak dari pembangunan itu sendiri dirasakan oleh masyarakat, dimanfaatkan untuk kesejahteraan, serta menumbuhkan rasa optimisme dalam membangkitkan pelbagai sektor dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo sejak periode pertamanya telah membangun Indonesia Sentris, di mana pemerataan pembangunan infrastruktur baik fisik dan non fisik menjadi agenda prioritas.

Salah satu wujud membangun Indonesia Sentris adalah dengan menghadirkan infrastruktur

telekomunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi pun memastikan *Indonesian society no one left behind*. Jangan ada yang tertinggal dalam mendapatkan layanan internet.

Dari ujung timur Indonesia, kita menyadari Papua dan Papua Barat masih tertinggal jauh dalam hal pembangunan, termasuk penyediaan akses telekomunikasi. Namun dalam hitungan beberapa tahun saja, masyarakat Papua baik dari pesisir hingga di pedalaman hampir semuanya telah dan akan ikut mewujudkan transformasi digital nasional. Wujud dari langkah transformatif ini dengan dibangunnya Base Transceiver Station (BTS) sinyal 4G di Bumi Cendrawasih.



Sumber Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.



## Paket BTS untuk Papua dan Papua Barat

Menteri Kominfo Johnny G. Plate telah mengumumkan mitra Kerja Sama Operasional (KSO) untuk 9 Area yang mencakup 5 Paket BTS 4G. Dari 5 Paket tersebut, khusus Papua dan Papua Barat masuk dalam Paket 3, 4, dan 5 yang meliputi Area 6, 7, 8, dan 9.

Secara rincian, Paket 3 sebanyak 1.795 desa/kelurahan yang meliputi Area 6 Papua Barat (824) dan Area 7 Papua Bagian Tengah Barat (971). Untuk Paket 4 sebanyak 1.879 desa/kelurahan yang mencakup Area 8 Papua Bagian Tengah Utara (1.819), sedangkan Paket 5 sebanyak 1.590 desa/kelurahan yang mencakup Area 9 Papua Bagian Timur Selatan (1.590).

Dua operator seluler yang terpilih sebagai mitra KSO adalah PT XL Axiata Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler yang akan membangun penyediaan BTS 4G di wilayah 3T. Selanjutnya, Menkominfo menekankan kesiapan integrasi BTS segera dilakukan guna memberikan layanan akses internet kepada masyarakat.

"Dengan terpilihnya mitra KSO BLU BAKTI Kominfo di 9 area paket kerja sama, maka proses persiapan integrasi BTS secara bertahap dapat dilakukan, dan BTS yang sudah dibangun dapat segera beroperasi memberikan layanan seluler 4G kepada masyarakat di wilayah 3T," ujarnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut dan memastikan pembangunan secara bertahap dilakukan, Menteri Johnny memantau langsung sarana dan prasarana pendukung di setiap daerah 3T, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat.

## Kunker Manokwari

Dalam kunjungan ke Manokwari Provinsi Papua Barat, Menteri Johnny meresmikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi ditandai dengan dimulainya peresmian BTS 4G yang telah *on air* di dua kabupaten yang mencakup Desa Iseren, Kecamatan Rumberpon; dan Desa Siresi Kecamatan Soug Jaya di Kabupaten Teluk Wondama, serta Desa Kasi Indah Kecamatan Kasi Kabupaten Tambrauw.

Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, seluruh Kepala Daerah dan Wakil Khusus Masyarakat Papua Barat, Menteri Johnny menegaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi digital nasional. Oleh karena itu, pemerintah

mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem ruang digital dengan baik.

"Pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G merupakan bagian penting dari arahan Presiden Joko Widodo dalam agenda percepatan transformasi digital nasional. Setelah infrastrukturnya tersedia, tentu pesan Bapak Presiden ini dijaga dengan baik. Bukan hanya dijaga oleh Kominfo atau kontraktor, tapi dijaga bersama-sama dengan masyarakat, karena itu menggunakan APBN, uang rakyat. Jadi kita jaga bersama-sama," ujarnya.

Khusus di Papua Barat, BAKTI Kementerian Kominfo bersama mitra operator seluler telah membangun sebanyak 824 BTS 4G dan masih akan terus berlanjut di desa/kelurahan lainnya. Sehingga keberadaan layanan BTS 4G saat ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan tata ruang dan pembangunan daerah.

"Rapat koordinasi kita hari ini tidak saja untuk menentukan titik lokasi pembangunan BTS (berikutnya), tetapi juga menjadi acuan pengembangan tata ruang dan pembangunan daerah," jelasnya.

Agar masyarakat dapat memanfaatkan pembangunan telekomunikasi yang disediakan, Menkominfo juga meminta koordinasi dan penataan ruang pembangunan daerah

memperhatikan ketersediaan *coverage* sinyal 4G yang menjadi aktivitas saat ini dan masa depan masyarakat. Menteri Johnny berharap, jangan sampai setelah tersedia layanan BTS 4G, para pelajar masih mencari sinyal dengan cara naik pohon, ibu-ibu pengusaha, para UMKM juga harus naik gunung untuk mencari sinyal.

Peresmian ini menandai dimulainya layanan BTS 4G di 4.200 lokasi yang dibangun BAKTI Kementerian Kominfo pada tahun 2021. Semua BTS 4G akan *on air* secara bertahap. Peresmian berlangsung melalui konferensi video antara Manokwari dengan para perangkat dari ketiga desa di mana lokasi BTS berada.

## Kunker Jayapura

Setelah melakukan kunjungan kerja di Manokwari Papua Barat, Menteri Johnny melanjutkan kunjungannya ke Jayapura Provinsi Papua. Bertepatan dengan perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, Kementerian Kominfo juga memastikan dukungan penuh penyediaan infrastruktur telekomunikasi dalam menyukseskan *event* empat tahunan tersebut.

Menurut Menteri Johnny, salah satu penopang suksesnya PON XX Papua yakni dengan penggelaran layanan telekomunikasi jaringan 5G serta penyebaran informasi yang cepat dan luas. "(PON XX Papua) ini juga bisa berhasil dengan baik karena didukung dengan 5G experience, yang dilakukan oleh Telkomsel di *Media Center* Kominfo," ujarnya.

Menkominfo menjelaskan bahwa layanan 5G yang mendukung *Media Center* Kementerian Kominfo memungkinkan informasi mengenai penyelenggaraan PON XX Papua dapat dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia.

Selain itu, pelayanan di *media center*, baik *media center* utama maupun tiga klaster lainnya berlangsung dengan baik. Hal tersebut dilihat dari sebaran berita secara nasional. Bahkan pada saat pembukaan PON XX Papua yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo yang telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara nasional.



Oleh karenanya, dukungan layanan sinyal 5G membantu awak media dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat yang lebih cepat dan kualitas lebih baik.

"Baik dari sisi kecepatan berita dan gambar yang lebih jernih. Saya berterima kasih kepada *Media Center* Kominfo karena bisa melakukan transmisi berita secara cepat kepada masyarakat. Mudah-mudahan, selanjutnya selama penyelenggaraan PON ini bisa berjalan dengan baik seperti yang kita bersama harapkan, sehingga suksesnya penyelenggaraan PON ini bisa dinikmati dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat nasional," tandasnya.

Transmisi informasi yang diharapkan tidak saja menjangkau masyarakat Indonesia, Menteri Johnny juga berharap agar informasi mengenai PON XX Papua dapat menjangkau negara tetangga Indonesia. Sehingga etalase PON menjadi salah satu contoh *benchmark* bagaimana penyelenggaraan *event* nasional yang besar dilakukan selama masa pandemi dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kalau pelaksanaan PON-nya kita lihat sudah bagus, berjalan dengan baik, kemeriannya dirasakan oleh rakyat, prestasi dan pertandingan juga berjalan dengan baik. Ada prestasi-prestasi olahraga yang

dicapai, tersebar pula medalinya secara nasional di berbagai provinsi. Hal ini menandakan juga bahwa olahraga juga sudah tersebar di seluruh wilayah tanah air," ungkapnya.

Selanjutnya, Menkominfo mengharapkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia selama PON XX akan dapat memfasilitasi atlet, khususnya putra putri Papua dan Papua Barat agar lebih siap untuk mengikuti *event* olahraga selanjutnya.

"Kita tentu berharap setelah ini nanti ada *event-event* tahunan di cabang olahraga tertentu yang di mana fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia di Papua. Karena fasilitas ini bagus sekali, saya kira yang dibangun ini modern, memudahkan bagi atlet sehingga tentu dengan demikian nanti prestasi atlet nasional kita harapkan juga lebih meningkat, lebih banyak turnamen, dan itu adalah pintu masuknya untuk pariwisata nasional di bidang olahraga," imbuhnya.

Infrastruktur  
Digital  
Prasyarat  
Menuju  
Indonesia Terkoneksi







Masa kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate di Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sudah memasuki dua tahun sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo masuk dalam Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 yang lalu.

Pasca pelantikan tersebut, Menteri Johnny mulai menjalankan program percepatan transformasi digital sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. Upaya Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam mewujudkan transformasi digital hingga kini terus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Selama dua tahun menahkodai Kementerian Kominfo, Menteri Johnny memiliki komitmen yang besar dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan Infrastruktur digital.

Salah satu upaya tersebut diterjemahkan dalam Peta Jalan Transformasi Digital Indonesia 2021-2024 sebagai dokumen panduan strategis demi mewujudkan transformasi digital nasional yang cepat, kuat, dan merata yang mencakup 4 sektor strategis, yaitu Infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Dalam Forum Asia Tech x Singapore 2021 – *AtxSummit, Future Role of Connectivity: Bridging the Digital Divide* yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Selasa 13 Juli 2021 lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas dan menjembatani kesenjangan digital.

## **Pemerintah Indonesia ingin lebih kuat di era digital ini, baik dalam keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, pariwisata digital, UMKM digital, dan banyak lainnya. Untuk mewujudkan menuju Indonesia terkoneksi: semakin digital, semakin sejahtera**

"Pemerintah Indonesia ingin lebih kuat di era digital ini, baik dalam keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, pariwisata digital, UMKM digital, dan banyak lainnya. Untuk mewujudkan menuju Indonesia terkoneksi: semakin digital, semakin sejahtera," jelasnya dalam forum tersebut.

Pembangunan infrastruktur digital merupakan salah satu fokus perhatian Presiden Joko Widodo untuk menciptakan kedaulatan digital di Tanah Air. Di tengah situasi Indonesia yang kini tengah memerangi pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur digital menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat.

"Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Pengantar Pemerintah Atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021, dalam Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/8/2020).

## BTS Jangkau Wilayah 3T

Sejak Covid-19 melanda tanah air, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo mempercepat akselerasi transformasi digital dengan membangun BTS, menciptakan akses internet, digitalisasi penyiaran (ASO), satelit SATRIA dan Palapa Ring hingga pembangunan Pusat Data Nasional.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, guna pemerataan pembangunan infrastruktur di semua level, Pemerintah Republik Indonesia telah secara masif membangun infrastruktur internet di wilayah yang belum terjangkau akses internet.

"Infrastruktur digital yang memadai ini adalah prasyarat untuk mewujudkan transformasi digital," ungkapnya dalam Sesi Ketiga Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital secara virtual dari Jakarta, Kamis (05/08/2021).

Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Johnny G. Plate sepanjang dua tahun ini berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang informasi dengan membangun

Base Transceiver Station (BTS) untuk menjangkau masyarakat terutama di wilayah 3T. Proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G yang semula merupakan bagian dari program percepatan yang ditargetkan pada 2032, kini dipercepat 10 tahun lebih awal.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi I, di Ruang Rapat Komisi I DPR-RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 7 Juni 2021 yang lalu, Menteri Johnny mengungkapkan bahwa di tahun 2021 Kementerian Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 4.200 BTS, di mana saat ini sedang dalam proses konstruksi, dan dilanjutkan di tahun 2022 sebanyak 3.704 BTS baru. Harapannya hingga tahun 2024 penyelesaian pembangunan 9.586 BTS telah rampung dan beroperasi penuh.

"Selain BTS, Palapa Ring pada tahun 2021 memiliki total jaringan sepanjang 12.229 km," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Menkominfo juga menjelaskan penyediaan akses internet baru saat ini berjumlah 4.574 titik di mana data tersebut melengkapi 11.817 titik akses internet yang telah tersedia sebelumnya. "Di Tahun 2022 akan dilakukan penggelaran akses 22.000 titik secara masif dan terus meningkat tiap tahunnya hingga tersedia 78.391 titik akses internet pada akhir tahun 2024 nanti," tandasnya.

Selanjutnya, pada tahun 2022 juga akan dilakukan optimasi pemanfaatan Palapa Ring dengan total jaringan sepanjang 12.083 km atau sekitar 40% yang masing-masing terdiri dari 8.203 km kabel darat dan kabel laut sepanjang 3.880 KM. Konstruksi dan penggelaran yang akan dilakukan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 meliputi nilai total capital expenditure sekitar Rp8,6 triliun dengan kebutuhan anggaran Rp3,5 triliun untuk tahun 2022 dan 5,1 triliun di tahun 2023. Untuk penyediaan kapasitas satelit, Menteri Johnny menyebutkan saat ini telah tersedia dan beroperasi satelit berkapasitas 21 *gigabyte per second* (Gbps).

"Di tahun 2021, Kominfo akan menambahkan kapasitas sebesar 9 Gbps, tahun 2022 dilakukan penambahan 7 Gbps. Dan sampai tahun 2024 nanti akan tersedia kapasitas satelit sekitar 117 *gigabyte per second*," ujarnya.

## Digitalisasi Penyiaran (ASO)

Di bidang penyiaran, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo saat menciptakan ekosistem digital yang sesuai dengan perkembangan global. Pemerintah Indonesia bersama DPR telah menyiapkan regulasi sebagai payung hukum untuk mengimplementasikan program tersebut secara efektif dan efisien. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, implementasi ASO di Indonesia diatur secara khusus dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Hal ini tertuang dalam amanat Undang-Undang Cipta Kerja pasal 72 angka 8, sisipan pasal 60 A, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,” ujarnya dalam Dialog Produktif Tahap Pertama ASO untuk Warga Aceh yang berlangsung virtual, dari Jakarta, Rabu (09/06/2021).

Langkah strategis Pemerintah mulai dari penyusunan regulasi berupa UU dan Peraturan Pemerintah hingga sosialisasi ASO menggambarkan betapa negara memiliki keseriusan dan komitmen yang besar untuk mengimplementasikan migrasi televisi analog ke televisi digital di tanah air.

Mengingat amanat UU No. 11 tahun 2020 hanya memberi batas waktu selama 2 tahun untuk melakukan migrasi televisi analog ke televisi digital, Kementerian Kominfo pun kini semakin gencar melakukan sosialisasi, baik melalui iklan di media elektronik, media online, hingga media sosial agar ASO bisa dilaksanakan.

“Sehingga masyarakat dapat menikmati siaran televisi digital. Jadi, dalam kaitan dengan ini, bagi masyarakat masyarakat tertentu yang sangat membutuhkan Set-Top-Box, tentu akan diperhatikan oleh Pemerintah,” paparnya.



## SATRIA-I Kikis Kesenjangan Digital

Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-I merupakan salah satu proyek strategis di masa Presiden Joko Widodo dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan *groundbreaking* Stasiun Bumi Satelit Multifungsi SATRIA-I menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia serius melakukan percepatan transformasi digital untuk menghadirkan konektivitas digital di seluruh pelosok Nusantara.

Hal itu diungkapkan Menteri Johnny dalam *Groundbreaking Ceremony* Stasiun Bumi Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah, di Gedung PSN, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (18/08/2021).

“Hari ini, kita menorehkan tonggak bersejarah bangsa dengan bersama-sama menyaksikan peletakan batu pertama atau *groundbreaking* Stasiun Pusat Pengendali Satelit Primer, Network Operation Control, dan Gateway Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi, yang kita kenal sebagai Satelit Republik Indonesia (SATRIA),” jelasnya.

Menurut Menkominfo, penyediaan infrastruktur tersebut merupakan prasyarat awal yang krusial untuk mewujudkan percepatan transformasi digital Indonesia. Dengan berbasis pada human-centred approach, diharapkan penyelenggaraan infrastruktur dapat memberikan manfaat besar sekaligus membuka peluang-peluang digital bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu Menkominfo mengajak agar masyarakat menjadikan *groundbreaking* sebagai milestone awal bersama, demi memajukan ketangguhan digital bangsa melalui konektivitas yang menyatukan dan menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia.

“Mari kita jadikan pula momentum ini sebagai titik lompatan besar untuk terus bertransformasi, terus bertumbuh dan tangguh menuju Indonesia Terkoneksi: Semakin digital, Semakin maju!” imbuhnya.

Ikhtiar Kominfo Wujudkan  
**Akselerasi**  
**Transformasi Ekonomi**  
Berbasis Digital





**Kita harus memanfaatkan infrastruktur kita untuk memanfaatkan ekonomi digital. Di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari GDP nasional**

Tak dimungkiri bahwa saat ini geliat transformasi digital terus bergaung ke seluruh penjuru negeri. Hal ini sebagai respon aktif terhadap disrupsi telekomunikasi dan digitalisasi yang terus bergerak maju secara akseleratif. Karena era industri 4.0 tidak lagi menjadi sesuatu yang opsional, melainkan merupakan *conditio per quam* atau kondisi yang memang harus ada di bumi Nusantara.

Secara nasional, lanskap digital terus berekspansi. Tentunya, berbagai upaya besar serta terarah, sangat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan jagad digital yang semakin hari semakin berkembang, khususnya sektor publik dan swasta di Indonesia.

Sebagai *leading sector* transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menetapkan tiga sasaran strategis, yang mana salah satu diantaranya adalah mendorong percepatan transformasi pada sektor ekonomi, atau yang disebut ekonomi digital.

Percepatan implementasi ekonomi digital merupakan hal yang sangat penting, dalam hubungan dengan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19.

## Progres Ekonomi Digital

Populasi pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 202,6 juta. Penetrasi ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dan transaksi ekonomi di ruang digital mempunyai potensi yang begitu besar.

Berdasarkan hasil riset dari Google, Termasuk dan Bain & Company, Indonesia pada tahun 2020 telah menjadi negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara yakni mencapai US\$ 44 miliar, dan pada tahun 2025 diprediksi akan meningkat signifikan menjadi US\$ 124 miliar.

Selain itu, Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pada tahun 2021 ini, transaksi digital di berbagai platform *e-commerce* akan mencapai nilai sebesar Rp 337 triliun, atau bertumbuh 33% dari tahun 2020 yang mencatatkan valuasi senilai Rp 253 triliun.

Berkaca pada hasil riset dan proyeksi tersebut, Kementerian Kominfo, selamat dua tahun kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate terus mengupayakan akselerasi transformasi digital pada

sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital.

Program seperti Program 1000 Startup Digital yang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional. Selain itu, juga dilaksanakan program-program yang mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan adopsi TIK, contohnya Program UMKM Go Online yang bertujuan untuk mendorong UMKM dalam negeri *onboard ke marketplace*, dan Program Petani Nelayan Go Online yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam memperluas pasar dan mengelola hasil produksi.

Demi menciptakan ekosistem digital yang inklusif, pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM/UMi), untuk turut serta ke dalam pasar ekonomi digital, diantaranya melalui UMKM Digital On Board serta dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Kementerian Kominfo juga tengah mendorong pengembangan UMKM berbasis digital hingga program pengembangan startup digital. Saat ini, sudah ada sekitar 11 juta UMKM digital Indonesia dan beberapa di antaranya sedang dalam tahap *scaling-up* untuk mendukung perekonomian Indonesia.

Tentunya, infrastruktur digital yang memadai akan membuat para pelaku UMKM Indonesia dapat bermigrasi ke digital *onboard* sehingga progres ekonomi digital bisa mencapai target, yaitu 30 juta UMKM digital di tahun 2024.

Tidak hanya sampai di situ, Kementerian Kominfo pun telah sedang berupaya mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*).

Menteri Johnny juga memproyeksikan ekonomi digital

Indonesia akan melampaui 124 miliar dolar AS atau Rp 1.796 triliun pada akhir 2024.

Hal ini yang menjadi faktor pendorong ekonomi digital Indonesia di kawasan telah tumbuh dua digit pada 10,58 persen tahun lalu. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur digital yang masif dan penyediaan pusat data pemerintah, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia.

"Kita harus memanfaatkan infrastruktur kita untuk memanfaatkan ekonomi digital. Di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari GDP nasional," jelasnya pada Rabu (14/07/2021).



## Orkestrasi Gernas Bangga Buatan Indonesia

Kementerian Kominfo juga menunjukkan aksentuasi pada pengembangan ekonomi digital ketika bersama-sama dengan komunitas penyelenggara e-dagang atau *e-commerce* menyepakati tanggal 5 Mei sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia. Disposisi Kominfo adalah berpihak pada tumbuh kembangnya produk dalam negeri.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga menyatakan penetapan HBBI menjadi wujud keberpihakan Pemerintah dan ekosistem digital atas hasil karya kreatif anak bangsa, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Sebagai ungkapan kebanggaan atas UMKM dan hasil karya-karya kreatif anak-anak bangsa, harus bisa ditransmisikan secara khusus oleh *e-Commerce* Indonesia untuk meningkatkan demand side di dalam negeri, yaitu pembeli dan konsumsi dalam negeri," jelasnya dalam program Prime Talk Metro TV "Gerakan Bangga Buatan Indonesia", dari Jakarta, Selasa (04/04/2021).

Menkominfo menyatakan penyelenggaraan Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertepatan dilaksanakan di Bulan Suci Ramadhan ini diharapkan dapat memberikan banyak berkah di sektor e-dagang Indonesia.

"Dengan adanya Hari Bangga Buatan Indonesia atau HBBI, pengguna *e-commerce* diharapkan lebih memilih produk dalam



negeri daripada produk luar negeri. Kita harapkan tentu dalam tahapannya nanti, kita akan mengisi pasar-pasar internasional," harapnya.

Menurut Menteri Johnny semua pihak untuk meningkatkan konsumsi atas produk dalam negeri dengan memanfaatkan momentum HBBI.

"Kita harus mampu menjadikan pasar Indonesia, produk Indonesia dan memperkecil atau meningkatkan substitusi importasi kita. Karena apa? Mengangkuatkan perekonomian nasional kita diawali dari produksi, distribusi, dan konsumsi dalam negeri sendiri," tuturnya.

Oleh karena itu, di era pandemi Covid-19 ini, Menteri Johnny mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan hasil karya anak bangsa dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur hulu atau upstream dari teknologi informasi.

"Kominfo terus melakukan percepatan transformasi digital melalui peningkatan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Kominfo juga mendorong agar semakin banyak pelaku UMKM masuk ke dalam platform digital. Kita harapkan tentu kolaborasi tanpa henti untuk negeri menuju Indonesia Semakin Digital, Semakin Maju, Semakin Bangga. Buat Indonesia, bangga karya anak bangsa sendiri," tandasnya.

Penetapan 5 Mei sebagai HBBI tertuang dalam Kesepakatan Bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo dan Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA).

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dalam rangka untuk memberikan dukungan yang kuat dari pemerintah, kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha khususnya platform e-Commerce akan semangat bersama terkait dengan produk-produk hasil karya anak-anak bangsa, bangga buatan Indonesia.

Sesuai kesepakatan bersama itu, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo melaksanakan tugas diseminasi informasi menyangkut Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI).

"Karenanya tentu, saya minta kerjasama tidak saja lembaga-



Sumber Foto: ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

lembaga penyiaran (media pers), namun juga platform-platform e-Commerce untuk menyediakan porsi yang cukup bagi pusat promosi dan literasi, aktivitas besar nasional Indonesia di sektor, yaitu promosi akan Bangga Buatan Indonesia, membeli, menggunakan dan bangga akan barang yang kita beli sendiri," ungkapnya.

Promosi Hari Bangga Buatan Indonesia di platform dagang daring berlangsung pada 5 s.d 13 Mei 2021, berisi tentang dukungan platform digital untuk HBBI, pemberian fasilitas bebas biaya pengiriman sampai jumlah tertentu oleh platform dagang elektronik dan penyampaian laporan penyelenggaraan Hari Bangga Buatan Indonesia 2021 dari platform dagang ke pemerintah.

Tahun ini, Hari Bangga Buatan Indonesia 2021 mengusung tema "Semakin Bangga Buatan Indonesia", mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menumbuhkan kebanggaan menggunakan produk buatan Indonesia

## Pembangunan SDM Digital



### Digital Leader Academy

### Digital Talent Scholarship

### Siberkreasi

Dalam upaya mendukung terwujudnya transformasi ekonomi berbasis digital, Kominfo juga menyelenggarakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Berbagai program pengembangan ekonomi kreatif dan digital terus dilakukan, mulai dari pelatihan yang sifatnya *basic*, *intermediate*, hingga *advance*.

Pelatihan tingkat *basic* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar digital masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten negatif.

Selanjutnya pada tingkat *intermediate*, Kominfo menyiapkan program Digital Talent Scholarship, yang ditujukan kepada mahasiswa, masyarakat umum, profesional, guru dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan hingga aparatur sipil negara.

**Pada tingkat ini, Kominfo menyiapkan sekitar 103 tema. Beberapa di antaranya seperti: *big data analytics*, keamanan siber, kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI), Augmented Reality (AR), dan Virtual Reality (VR).**

Kemudian pada tingkat *advance*, Kominfo menyelenggarakan pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang ditujukan pada para pimpinan aparatur sipil negara (ASN) dan swasta. Saat ini DLA tengah berlangsung dari Agustus hingga November 2021, dengan kuota terbatas 300 peserta.

Adapun pengajar dalam DLA berasal dari National University of Singapore, Tsinghua University dan Harvard Kennedy School, dan Harvard University.

Melalui pelatihan-pelatihan tersebut, Kominfo menargetkan 12,5 juta masyarakat Indonesia terliterasi digital setiap tahunnya, untuk mencapai 50 juta masyarakat terliterasi di tahun 2024.

Tentunya, SDM digital yang mumpuni akan membawa dampak yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi digital.



## Infrastruktur Digital sebagai *Conditio Sine Qua Non*

Namun, aspek ekonomi digital dan DSM digital tidak akan terwujud tanpa ketersediaan infrastruktur digital yang mumpuni.

Untuk itu, Kementerian Kominfo juga memprioritaskan pada penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik.

Saat ini masyarakat di seluruh pelosok tanah air, khususnya di wilayah 3T berharap dan mendambakan deployment internet, tersedianya wifi dengan kecepatan yang memadai, untuk menghantar mereka untuk secara bersama-sama bergerak menuju transformasi digital.

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital tentunya menjadi perhatian dan komitmen Kominfo.

Apalagi saat ini, Pandemi Covid-19 yang mengharuskan *social* dan *physical distancing*, serta *Work from Home* dan *Study from Home*, membuat kebutuhan akan aksesibilitas internet meningkatkan dengan begitu pesatnya.

Saat ini, pemerintah dan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di serat optik daratan dan lautan, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini juga kita telah memiliki 9 satelit telekomunikasi, *microwave link*, dan jaringan *fiber-link* yang digunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dan digital di Indonesia.

Selain itu, lebih dari 500.000 *Base Transceiver Stations* (BTS) juga telah dibangun untuk memungkinkan jangkauan sinyal 4G, menjangkau masyarakat Indonesia termasuk di daerah yang sangat terpencil. Jangkauan sinyal 4G ini akan menjadi tulang punggung infrastruktur digital, untuk mendukung Indonesia dalam percepatan Transformasi Digital.

Semua perangkat digital tersebut akan didukung oleh High Throughput Multifunction Satelit SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps, untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah ada, dan akan mengorbit pada Triwulan ke-4 tahun 2023.



SDM Bertalenta Menuju  
Indonesia sebagai Bangsa

# DIGITAL



**Pada edisi Maret 2020 lalu, Majalah Kominfo Next menerbitkan satu artikel yang berjudul Manusia Digital Indonesia. Sebuah ulasan yang menggambarkan peta jalan atau strategi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya menciptakan sumber daya manusia digital yang mumpuni dan ahli di berbagai sektor.**

Maret 2020 pula menandai awal bagi Indonesia berhadapan dengan pandemi Covid-19, di mana hampir semua negara juga tengah berjuang menghadapi ancaman bencana non-alam itu. Pemerintah Indonesia menyadari, pandemi yang masih terus ada yang memaksa kita untuk beradaptasi dan berdamai dengan Covid-19 harus terus digelorakan. Oleh karenanya, menghantarkan masyarakat untuk masuk dalam era transformasi digital menjadi suatu keharusan.

Namun demikian, jauh sebelum adanya pandemi Covid-19, Kementerian Kominfo telah menyiapkan berbagai program pengembangan SDM digital yang dimulai dari kecakapan digital tingkat dasar. Sebut saja literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siber Kreasi yang menggandeng banyak organisasi dan komunitas masyarakat.



## Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital, ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital,”

Pada Agustus 2020, Presiden Joko Widodo kemudian memberikan arahan terkait dengan agenda percepatan transformasi digital nasional. Satu dari lima arahan Presiden Jokowi adalah menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital.

“Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital, ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital,” ujar Presiden Jokowi dalam memimpin rapat terbatas mengenai Perencanaan Transformasi Digital, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/08/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menekankan pentingnya penguatan SDM talenta digital untuk menggenjot peringkat Indonesia yang masih jauh tertinggal terkait transformasi digital. Hal itu berdasarkan survei dari lembaga IMD World Digital

Competitiveness pada 2019, bahwa Indonesia masih berada di peringkat ke 56 dari 63 negara terkait perkembangan transformasi digital di dunia.

Dari survei tersebut, kita menyadari bahwa Indonesia dengan populasi penduduk terbanyak keempat di dunia memiliki peluang dan juga tantangan yang perlu dihadapi bersama. Untuk itulah, Presiden Jokowi menginginkan dan menegaskan Indonesia jangan lagi tertinggal. Sehingga dalam beberapa tahun kedepan, perbanyak program pengembangan talenta digital Indonesia dengan konsisten mencapai target per tahunnya.

Ini perlu betul-betul sebuah persiapan untuk kurang lebih 600 ribu talenta digital per tahun, sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik,” tegas Kepala Negara.

# Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

---

Dari arahan Presiden inilah Kementerian Kominfo di bawah leadership Johnny G. Plate bekerja dengan sungguh-sungguh. Memasuki dua tahun memimpin Kementerian Kominfo melaksanakan arahan Presiden Jokowi dalam agenda transformasi digital, Menteri Johnny telah melakukan berbagai hal untuk pengembangan SDM talenta digital.

Wujud dari komitmen tersebut diejawantahkan dalam Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 yang berfokus di 4 sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Johnny menekankan bahwa pemerintah sangat optimis menjadikan Indonesia sebagai bangsa digital melalui empat sektor strategis tersebut.

“Pemerintah Indonesia ingin lebih kuat di era digital ini, baik dalam keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, pariwisata digital, UMKM digital, dan banyak lainnya. Untuk mewujudkan menuju Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju,” kata Menteri Johnny.

Adapun tiga sektor lainnya yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, dan ekonomi digital sangatlah tergantung kepada masyarakat itu sendiri dalam menguasai dan mengimplementasi ekosistem digital di semua sektor. Sebab, pada saat pemerintah menyediakan infrastruktur telekomunikasi secara besar-besaran dan merata di seluruh tanah air, tetapi jika masyarakat belum siap untuk menggunakan dan memanfaatkannya baik, maka tentu menjadi sia-sia.

“Setelah tersedia infrastruktur digital seperti layanan BTS 4G, maka selanjutnya memanfaatkannya secara cerdas dan berguna melalui pemanfaatan ruang digital untuk ekonomi digital, UMKM, ultra mikro, untuk layanan pendidikan, layanan kesehatan dan yang lainnya itu bisa digunakan,” ujarnya

Begitu juga dengan pemerintahan digital dalam upaya menciptakan *good governance* atau *digital government*. Di era serba digital ini masyarakat begitu dimudahkan dengan pelayanan secara daring, lebih cepat dan lebih efektif. Oleh karena itu, ekosistem SDM di pemerintahan baik di pemerintah



ke ruang digital secara produktif juga menjadi penentu kuatnya Indonesia dalam menumbuhkan perekonomian nasional.

“Melalui optimalisasi produktivitas digital yang didorong transformasi digital, PDB (Produk Domestik Bruto) nasional diperkirakan bisa meningkat 1 persen pada 2024. Nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2025 juga diprediksi tumbuh hingga 23 persen, yakni sekitar USD 124 miliar atau Rp. 1.781 triliun,” tandasnya.

Bagaimanapun dan seberapa konsistennya kesiapan pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur digital di seluruh Indonesia, memperkuat kinerja pemerintah dengan berbasis pada *e-government*, serta menumbuhkan perekonomian nasional melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun jika semua itu tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan industri digital, maka sekali lagi Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lainnya.

pusat dan pemerintah daerah dituntut untuk melek digital, menguasai ruang-ruang digital dan hadir sebagai pemimpin di era digital. Inilah urgensinya pengembangan dan penguatan pemerintahan berbasis digital.

“Kita dituntut untuk mensukseskan implementasi *e-government* menuju *digital government*. Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya,” jelasnya.

Kemudian terkait ekonomi digital, sudah menjadi rahasia umum pemerintah di era Presiden Joko Widodo sedang dan terus menggelorakan semangat transformasi digital di sektor ekonomi. Sebagai sektor yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional harus mengikuti perkembangan global.

Kita ketahui Indonesia kini memiliki banyak platform digital atau *e-commerce*, baik dengan level digital startup unicorn dan decacorn. Selain itu, migrasi aktivitas masyarakat

Sebagaimana telah diuraikan di atas, mempersiapkan kebutuhan talenta digital atau masyarakat digital dilakukan melalui berbagai program pengembangan kecakapan digital. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, Kementerian Kominfo memiliki program kecakapan digital dari tingkat *basic*, *intermediate*, dan *advance*.

Kecakapan digital tingkat basic dilakukan melalui GNLD Siberkreasi yang menargetkan 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi hingga tahun 2024. Pada tahun ini, Kementerian Kominfo telah meluncurkan empat modul literasi digital yang mencakup Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital.

“Keempat modul ini akan dilakukan di 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota selama 8 bulan ke depan sampai akhir tahun (tahun 2021). Dan secara berkesinambungan akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya sampai akhir masa kabinet ini, mudah-mudahan nanti program ini diteruskan oleh kabinet yang baru,” ujarnya.

Menteri Johnny menekankan pentingnya pengembangan ekosistem digital di Indonesia, sehingga penguatan kecakapan digital tingkat dasar kepada masyarakat menjadi mutlak untuk diketahui. Oleh karenanya, pada program ini Kementerian Kominfo telah menyediakan sebanyak 20 ribu kegiatan yang bekerja sama dengan berbagai pihak.

---

## Masyarakat Digital dari Hulu ke Hilir

“20.000 kegiatan itu merupakan hasil kerjasama antara Kominfo, bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, pemerintah daerah, sekitar 110 lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang akan melakukan secara bersama-sama, kerja kolaboratif. Ini tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri dan terpisah, tapi harus dilakukan secara bersama-sama,” tandasnya.

Pada tingkat menengah, Kementerian Kominfo menyediakan program *Digital Talent Scholarship* (DTS).

Program tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan teknis bagi para angkatan kerja muda, lulusan baru, profesional, dan elemen masyarakat lainnya.

“Program ini mengajarkan berbagai kecakapan era digital seperti *artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cybersecurity, digital entrepreneurship, digital communication*, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Pada tahun 2021 ini, Kementerian Kominfo memberikan 100.000 beasiswa DTS untuk masyarakat Indonesia dengan tema-tema pelatihan tersebut. Selain itu, Program DTS Kominfo bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

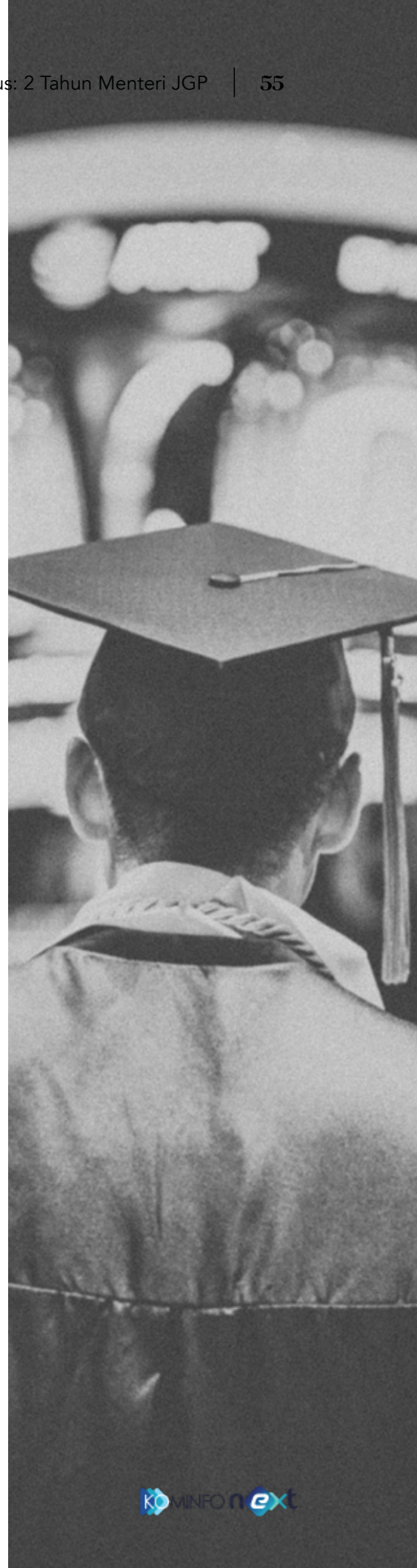
“DTS diharapkan juga dapat berperan sebagai program stimulus strategis, yang membuka berbagai langkah kolaborasi lintas sektor lainnya dalam upaya peningkatan kualitas SDM digital di Indonesia,” jelas Menkominfo Johnny G. Plate.

Dalam pelatihan DTS, Kementerian Kominfo menyediakan 7 akademi pelatihan, antara lain *Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Academy (VSGA), Professional Academy (PRO), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Thematic Academy (TA), Government Transformation Academy (GTA), Talent Scouting Academy (TSA)*.

Sedangkan kecakapan digital tingkat atas atau *advance skills*, Kementerian Kominfo mencanangkan program pelatihan *Digital Leadership Academy (DLA)*. Program DLA dikhususkan bagi para pemimpin di sektor publik dan privat yang bertujuan untuk melahirkan pemimpin digital baik di pemerintahan maupun swasta.

Menteri Johnny memaparkan, Program DLA menasar pemimpin di level kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, TNI, Polri, Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD hingga perusahaan-perusahaan swasta.

“Pelatihan DLA merupakan program unggulan sebagai manifestasi dari kerja sama *triple helix* antara unsur pemerintah, pelaku bisnis, serta akademisi dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia,” ungkapnya.



Menurut Menteri Johnny, program DLA bekerja sama dengan empat universitas ternama di dunia yang memberikan pendidikan eksekutif terkustomisasi sesuai dengan kebutuhan transformasi digital di Indonesia. Adapun empat perguruan tinggi tersebut adalah National University of Singapore (NUS), Harvard University, Tsinghua University dan Oxford University.

Bersama NUS, program DLA bekerjasama untuk tema pelatihan Digital Transformation in Smart City, tema Digital Transformation in Digital Business bersama Tsinghua University, tema pelatihan Digital Transformation in Government: Innovating Public Policy & Service bersama Harvard University, serta bersama University of Oxford melalui tema Digital Transformation in Policy and Practice.

“Semangat sinergi dan transformasi yang muncul diharapkan dapat terus kita jaga ke depannya, dalam mencetak pemimpin-pemimpin digital terbaik kelas dunia yang tidak hanya mendorong akselerasi transformasi digital nasional. Namun juga mewujudkan Indonesia terkoneksi yang semakin digital, semakin maju,” imbuhnya.

Menkominfo menegaskan, tiga program kecakapan digital dari hulu ke hilir yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo terus dan akan dilakukan secara sungguh-sungguh dan terukur. Sehingga diharapkan masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan dan turut mengambil bagian dari program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kecakapan digitalnya.





Menuju Pemerintahan

**DIGITAL**

**Transformasi digital pemerintahan menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang lebih baik. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat memberikan *keynote speech* dalam *The 2nd International Conference ICT for Rural Development (IC-ICTRUDEV 2021)* yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021).**

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menkominfo mengatakan, kementerian yang dipimpinnya terus berupaya mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).

“Pembangunan PDN ditujukan untuk integrasi data pemerintah ke dalam satu sistem, sehingga kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mewujudkan sinergi yang lebih cepat dan terpadu,” tuturnya.

Menkominfo menyatakan, pembangunan Government Cloud atau Pusat Data Nasional (PDN) guna mendukung tata kelola data yang lebih mumpuni di sektor publik maupun sebagai pelayanan kebutuhan pemerintahan.

“Tata kelola data yang baik diharuskan dalam lingkup data pribadi, data non-pribadi, maupun dalam lingkup transaksi elektronik. Oleh karena itu, Kominfo sedang menyiapkan pembangunan PDN atau *Government Cloud* di 4 lokasi,” paparnya,

Untuk mewujudkan pemerintahan digital atau *e-government*, Menkominfo menyatakan telah menyiapkan pembangunan pusat-pusat data yang akan ditempatkan di empat lokasi berbeda.

Lebih lanjut Menteri Johnny menjelaskan ke-4 lokasi tersebut, yakni di Jabodetabek (ibukota negara saat ini), di ibukota negara baru atau di sekitarnya, di Batam dan di Labuan Bajo.

Pembangunan PDN itu menyesuaikan dengan ketersediaan dan topologi jaringan-jaringan telekomunikasi yang ada. “Untuk efisiensi operation dan maintenance pusat-pusat data atau *Government Cloud* tersebut,” ujarnya.

Menurut Menkominfo, keberadaan PDN dapat mendorong terciptanya operasionalisasi data yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih efektif. Demikian halnya pula dengan *cloud* yang dibangun dan dikelola oleh sektor privat.

“Sehingga Pusat Data Nasional diharapkan dapat mewujudkan interoperabilitas, di mana data dari berbagai kementerian/ lembaga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa terintegrasi dalam satu sistem yang bisa menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan baik oleh pemerintah maupun sektor-sektor lainnya melalui penyajian data yang lebih akurat, lebih tepat, dan lebih cepat,” jelasnya.

Empat *Government Cloud* yang akan dibangun tersebut memiliki standar Global Tier-IV yang merupakan standar tertinggi pusat data global, dan memiliki spesifikasi 42 ribu cores, serta berkapasitas 72 petabytes.

“Saat ini pemerintah mempunyai atau menggunakan 2.700 pusat data dan server, di antaranya baru 3% yang mempunyai kualifikasi standar global. Bisa dibayangkan bagaimana kesulitan interoperabilitas data dalam menghasilkan satu data untuk pengambilan keputusan,” tutur Menkominfo.

Lewat keberadaan PDN (*Cloud Pemerintah*) diharapkan dapat mengharmonisasikan data di berbagai platform seperti PeduliLindungi, PrimaryCare, dan SILACAK. “Aplikasi-aplikasi itu menjadi platform untuk merespon Covid-19 terintegrasi yang membantu melacak *trace-tracking-fencing*, pengelolaan vaksin, serta untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari,” papar Menteri Kominfo.

Menkominfo menyatakan, saat ini telah tersedia PDN sementara dan interoperabilitasnya berada di bawah tata kelola Kominfo. “Hal itu bertujuan untuk mempercepat konsolidasi database nasional yang digunakan oleh 337 instansi pemerintah,” tandas Johnny. Menkominfo mengungkapkan pembangunan PDN akan menerapkan efisiensi pengelolaan

data publik sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Federal Amerika Serikat. Menurutnya salah satu tolok ukur kebijakan efisiensi pusat data sebagai bentuk mitigasi risiko ancaman keamanan siber untuk regulasi data nonpribadi atau data publik.

“Kominfo membangun Data Center Nasional mengacu pada *benchmark* Pusat Data Pemerintah Amerika Serikat. Bahkan sejak 2019, Pemerintah Amerika Serikat menutup 121 data center dan mereka akan menutup lagi tambahan 184 dari 2.727 Pusat Data Lembaga Federal,” jelasnya.

Mengutip data dari *US Budget Office of Management* tahun 2020, Menteri Johnny menuturkan penutupan tersebut dilakukan Pemerintah Amerika Serikat untuk menghemat anggaran federal sebesar USD249 Juta pada Tahun Anggaran 2019. “Bahkan, Pemerintah Amerika Serikat menyediakan *repository online* yang berisi ragam data pemerintahan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan data oleh publik,” tuturnya.

Menkominfo menyatakan hal serupa juga dilaksanakan di beberapa negara Uni Eropa. Bahkan pada saat bersamaan juga

dikeluarkan beragam ketentuan terkait pemanfaatan pusat data, khususnya untuk keperluan finansial.

Bahkan, ia menyebutkan kementerian yang dipimpinnya bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya akan menyiapkan aplikasi umum bagi masyarakat untuk memudahkan pelayanan publik seperti *e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, hingga e-money*. “Kominfo mendukung seluruh institusi-institusi pemerintahan yang membidangi bidang-bidang tersebut, termasuk *financial technology* dan *digital banking*,” imbuhnya.

Selain itu, *Government Cloud* atau PDN juga akan meningkatkan efisiensi pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan pemerintahan. “Tidak saja itu, pembiayaan yang menyerap APBN dengan jumlah besar jika bisa dilakukan efisiensi, maka pengelolaan *cloud* terpusat akan memberikan penghematan penggunaan belanja negara,” ungkap Menkominfo.



# Harmonisasikan Data Lewat SPBE

---

Dengan keberadaan PDN yang akan dibangun nantinya, Menkominfo yakin dapat menyatukan harmonisasi data dalam rangka untuk mendukung program Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menurutnya, pelaksanaan SPBE dan implementasi inisiatif SDI akan semakin komprehensif dengan penerapan keterbukaan terhadap akses pemanfaatan data oleh publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Dengan demikian pengambilan keputusan berbasis data *driven policy making* bisa dilakukan melalui *Government Cloud* atau PDN ini,” tandas Menteri Johnny.

SPBE bertujuan guna mewujudkan konsolidasi data nasional menuju Satu Data Indonesia (SDI) atau data *driven policy*. “Sehingga kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan publik dapat dilakukan dengan baik,” ujar Menteri Johnny.

Menteri Johnny menjelaskan, penerapan SPBE bertujuan mewujudkan manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas.

“Selain itu, dapat menciptakan pelayanan publik yang bersih, serta peningkatan kualitas dan pengelolaan reformasi birokrasi yang saat ini gencar-gencarnya dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB,” jelasnya lagi.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Kominfo pun melakukan akselerasi pemerintahan digital dengan menyiapkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keterampilan digital melalui Program *Government Transformation Academy* (GTA) yang bekerja sama dengan sejumlah Pemerintah Daerah di kabupaten/kota di Indonesia.

Pelatihan itu ditujukan untuk membekali ASN agar memiliki kecakapan digital dalam melakukan pelayanan publik dengan baik di masa pandemi sekaligus akselerasi pemerintahan digital.

Pelatihan juga dimaksudkan agar ASN meningkatkan kompetensi dalam mendukung akselerasi transformasi digital di instansi pemerintahan atau di unit kerja mereka masing-masing.

Mengutip dari laman [digitalent.go.id](http://digitalent.go.id), Pelatihan *Government Transformation Academy* (GTA) diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi 18.500 ASN dalam mendukung akselerasi transformasi digital di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Skema pelatihan pada program GTA dirancang mulai dari tingkat *basic skill* yang berkaitan dengan literasi digital, *intermediate skill* yang menekankan peningkatan kompetensi teknis, hingga *advance skill* yang menasar ke para pengambil keputusan," tulis laman [digitalent](http://digitalent).

Dalam penyelenggaraannya, pelatihan GTA dengan dua metode, yakni secara *online* dan *blended* yang memadukan antara daring dan *offline*. Durasi pelatihannya pun berbeda-beda, sesuai dengan tema pelatihan yang dipilih.

Pada pelatihan online, peserta dapat mengatur sendiri waktu belajar secara mandiri dalam batas waktu pelatihan. Pelatihan GTA berfokus pada 13 (tiga belas) skema pelatihan yakni *Get Connected, IT Essential, Cybersecurity Essentials, WI-lenial, IT Business Analyst, IT Project Management, Digital Public Relations, Social Media Analyst, Business Process Engineer, Network Administrator, Junior Graphic Designer, Data Mining Fundamental*, dan Analisis Kota Cerdas SNI ISO 37122:2019.

GTA juga membuka kelas khusus dengan metode pembelajaran *blended*. Kelas khusus ini didedikasikan untuk K/L/D yang menghendaki kelas tersendiri untuk para ASN-nya.

Sementara itu, berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh K/L/D yakni; penyediaan ruang belajar, minimal 4 kelas, dan tempat menginap peserta bila diperlukan. Kewajiban dari Kementerian Kominfo adalah konsumsi pelatihan, seminar kit, ATK, honor pengajar, uang saku peserta, transport lokal peserta, honor panitia bersama, dan akun *video conference*.

Untuk persyaratan yang dapat mengikuti program ini, yaitu ASN / Pegawai Perangkat Daerah dengan pendidikan minimal sesuai dengan persyaratan masing-masing tema pelatihan (berbagai jurusan). Kemudian, mendapatkan Surat Penugasan dari Pejabat yang berwenang, sanggup dan bersedia menyediakan sarana dan persyaratan sesuai dengan ketentuan masing-masing tema pelatihan. (hm.ys)

---

## Gandeng K/L/D Latih ASN Miliki Kecakapan Digital

# Prospek Satu Tahun Transformasi Digital Nasional

Oleh: **JH Phillip Gobang**  
Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik

Bill Gates pernah berkata, *"The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow."* (Internet menjadi alun-alun kota untuk desa global masa depan). Pernyataan Gates ini menunjukkan bahwa melalui perkembangan dan aksesibilitas internet, sebuah peradaban akan berkembang menjadi peradaban yang futuristik.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Gates, saat ini dunia telah dan sedang mengalami disrupsi, yang menurut Clayton M. Christensen dalam karyanya yang berjudul *The Innovator's Dilemma*, merupakan sebuah perubahan besar-besaran dalam kehidupan masyarakat secara multidimensi, akibat pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi di segala aspek kehidupan.

Fenomena disrupsi tersebut kemudian menelurkan apa yang dikenal sebagai era industri 4.0, dengan dominasi media baru dan penemuan jagat digital, serta *big data system* dan *artificial intelligence*. Hal ini kemudian membuat masyarakat global mulai bermigrasi dari realitas *offline* ke realitas *online*.

Bahkan di beberapa negara maju, fenomena disrupsi telah menciptakan era industri 5.0, dengan konsep *smart city* yang memungkinkan terjadinya ekosistem terintegrasi antara manusia dalam segala aspek kehidupannya dengan teknologi.

Menyadari pesatnya perkembangan teknologi yang begitu akseleratif, Kementerian Kominfo, sebagai lembaga negara yang membidangi sektor komunikasi dan teknologi, serta yang didaulat sebagai *leading sector* transformasi digital, terus berjabaku mendorong pengimplementasian *major project* transformasi digital, sembari meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital di Indonesia.

**" The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow.**



## Arahan Presiden Jokowi dan *Leading Sector* Transformasi Digital

Menanggapi disrupsi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, Presiden Joko Widodo, saat memimpin Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital pada bulan Agustus 2020 lalu, secara tegas memberikan lima arahan strategis, antara lain:

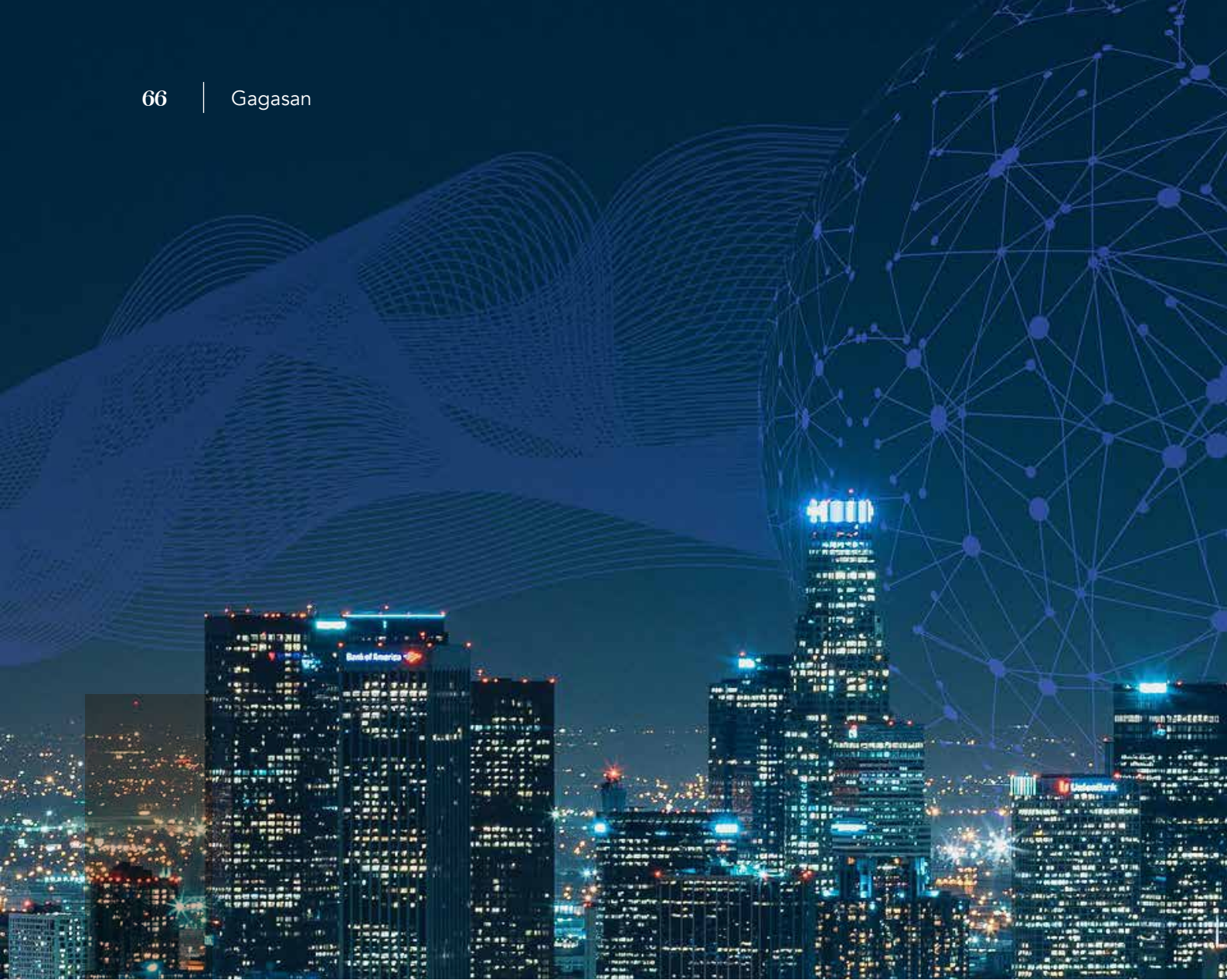
- Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
- Menyiapkan peta jalan atau *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, antara lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran, agar utilisasi infrastruktur juga meningkat.
- Integrasi pusat data nasional dipercepat.
- Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan talenta-talenta digital.
- Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.

Melalui arahan-arahan tersebut, Presiden ingin agar situasi Pandemi Covid-19 saat ini dijadikan sebagai momentum percepatan transformasi digital di Indonesia.

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut, Kementerian Kominfo pun merancang Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, yang meliputi pembangunan digital di 5 sektor, yakni: infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat, pemerintahan digital, dan komunikasi publik.

Pada sektor Infrastruktur Digital, Kementerian Kominfo berupaya menuntaskan permasalahan seputar disparitas aksesibilitas internet. Terkait hal ini, Kominfo berfokus pada penyediaan akses layanan internet cepat dan berkualitas sampai ke pelosok, khususnya wilayah 3T.





Pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital tentunya menjadi perhatian dan komitmen Kominfo. Apalagi saat ini, Pandemi Covid-19 yang mengharuskan *social* dan *physical distancing*, serta *Work from Home* dan *Study from Home*, membuat kebutuhan akan aksesibilitas internet meningkatkan dengan begitu pesatnya.

**Saat ini, pemerintah dan perusahaan telekomunikasi telah menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 342.000 kilometer di serat optik daratan dan lautan, sebagai tulang punggung konektivitas teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian 9 satelit telekomunikasi, microwave link, dan jaringan fiber-link yang digunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dan digital di Indonesia.**

Selain itu, telah lebih dari 500.000 *Base Transceiver Stations* (BTS) dibangun oleh Kominfo melalui BAKTI, untuk memungkinkannya jangkauan sinyal 4G, menjangkau masyarakat Indonesia termasuk di daerah yang sangat terpencil. Jangkauan sinyal 4G ini akan menjadi tulang punggung infrastruktur digital, untuk mendukung Indonesia dalam percepatan Transformasi Digital.

Semua perangkat digital tersebut akan didukung oleh *High Throughput Multifunction* Satelit SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps, untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah ada, dan akan mengorbit pada Triwulan ke-4 tahun 2023.



Selanjutnya pada sektor ekonomi digital, Kementerian Kominfo saat ini tengah mendorong pengembangan UMKM berbasis digital hingga program pengembangan startup digital.

Saat ini sudah ada sekitar 11 juta UMKM digital Indonesia dan beberapa di antaranya sedang dalam tahap *scaling-up* untuk mendukung perekonomian Indonesia. Tentunya, infrastruktur digital yang memadai akan membuat para pelaku UMKM Indonesia dapat bermigrasi ke digital *onboard* sehingga progres ekonomi digital bisa mencapai target, yaitu 30 juta UMKM digital di tahun 2024.

Ketiga, Masyarakat Digital. Tentunya penuntasan masalah disparitas infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Berbagai program pengembangan ekonomi kreatif dan digital terus dilakukan, mulai dari pelatihan yang sifatnya *basic*, *intermediate*, hingga *advance*.

Pelatihan tingkat *basic* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar digital masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten negatif.

Selanjutnya pada tingkat *intermediate*, Kominfo menyiapkan program Digital Talent Scholarship, yang ditujukan kepada mahasiswa, masyarakat umum, profesional, guru dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan hingga aparatur sipil negara.

Pada tingkat ini, Kominfo menyiapkan sekitar 103 tema. Beberapa di antaranya seperti: *big data analytics*, keamanan siber, kecerdasan buatan alias *artificial intelligence (AI)*, *Augmented Reality (AR)*, dan *Virtual Reality (VR)*.

Kemudian pada tingkat *advance*, Kominfo menyelenggarakan pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang ditujukan pada para pimpinan aparatur sipil negara (ASN) dan swasta. Saat ini DLA tengah berlangsung dari Agustus hingga November 2021, dengan kuota terbatas 300 peserta.

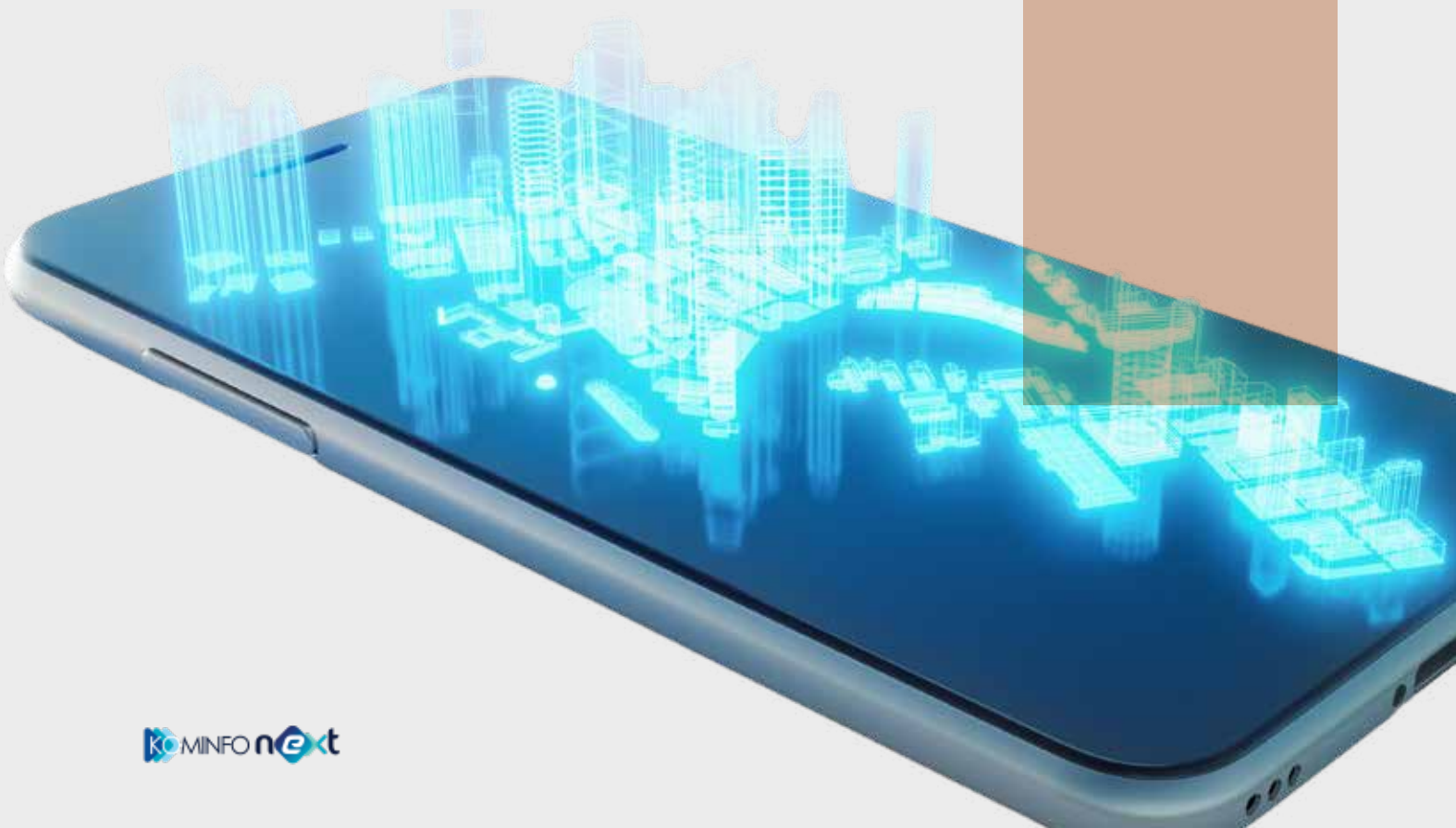
Adapun pengajar dalam DLA berasal dari National University of Singapore, Tsinghua University dan Harvard Kennedy School, dan Harvard University.

Melalui pelatihan-pelatihan tersebut, Kominfo menargetkan 12, 5 juta masyarakat Indonesia terliterasi digital setiap tahunnya, untuk mencapai 50 juta masyarakat terliterasi di tahun 2024.

Keempat, Pemerintahan Digital. Dari sisi pemerintahan, Kominfo akan mempercepat pengimplementasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target operasi penuh pada tahun 2023.

Untuk mencapai target ini, Kominfo saat ini tengah membangun sistem Pusat Data Nasional atau *data center* berbasis *cloud* milik negara menuju Satu Data Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Penerapan SPBE memiliki empat tujuan, antara lain manajemen





kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas. Serta, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Selain itu, Kominfo dalam sinergitas dengan kementerian dan lembaga lainnya juga akan menyiapkan aplikasi umum, bagi masyarakat untuk memudahkan pelayanan publik, seperti: *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-payment*, hingga *e-money*.

Kelima, aspek komunikasi publik. Kementerian Kominfo, yang didaulat sebagai *Government Public Relation*, saat ini terus berjuang untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara holistik, konsisten, dan terarah.

Dalam upaya mengamplifikasi informasi publik pemerintahan secara holistik, Kominfo telah menggandeng awak media, baik itu media-media nasional, maupun media-media lokal untuk mem-*blast* setiap informasi publik yang dikeluarkan Kominfo.

Kominfo juga secara *sustainable* melakukan klarifikasi terhadap narasi-narasi hoaks, misinformasi, disinformasi, bahkan mal-informasi yang acapkali membuat gaduh jagat maya dan menyesatkan masyarakat.

**Lebih lanjut, Kominfo di bawah kepemimpinan Menteri Johnny, terus berjuang menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang baik, progresif, dan berkualitas kepada masyarakat, serta menjadi *agent of change* melalui amplifikasi dan diseminasi informasi-informasi yang bisa menumbuhkan optimisme publik.**

## Sinergi Pentahelix



**Dalam upaya mewujudkan transformasi digital, tentunya Kementerian Kominfo tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kerjasama dan kolaborasi dengan multipihak. Menyadari hal ini, Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate mulai membangun jaringan kolaborasi yang sifatnya pentahelix.**

*Pentahelix* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jaringan spiral kerjasama, kolaborasi, dan sinergitas antara pemerintah, masyarakat/komunitas, pelaku usaha/ sektor swasta, akademisi, media massa (baik itu cetak, *online*, dan media sosial).

Pertama, pemerintah. Dalam upaya mewujudkan Indonesia digital, peranan pemerintah adalah sebagai regulator, eksekutor/implementor, dan evaluator. Kominfo sebagai *leading sector* transformasi digital bertugas untuk membuat rancangan peta jalan digital Indonesia. Kominfo juga terus berjuang membuat regulasi yang kondusif bagi terciptanya ekosistem digital.

Selain itu, Kominfo pun terjun langsung ke dalam masyarakat melalui program-program pelatihan berbasis digital, baik itu tingkat *basic*, *intermediate*, hingga *advance*. Kominfo juga secara berkala terus melakukan evaluasi terhadap semua regulasi dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih progresif.

masyarakat atau komunitas binaan. Selain itu, sektor swasta yang memiliki *concern* di dunia bisnis bisa mengambil peran sebagai *enabler* dan sponsor pada kegiatan-kegiatan berbasis ekonomi dan masyarakat digital.

Salah satu contohnya adalah ketika pada Selasa (14/09/2021) lalu, Kementerian Kominfo melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau nota kesepahaman (MoU) percepatan transformasi digital dengan mengedukasi dan melatih usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) dan masyarakat umum, dengan PT Karya Anak Bangsa (Gojek).



Kedua, masyarakat/komunitas. Peranan masyarakat/komunitas sebagai sasaran kebijakan publik pemerintah sangat penting. Menteri Johnny terus mendorong agar masyarakat bisa *aware* dan terlibat secara simultan dalam program-program pelatihan berbasis digital, baik itu yang sifatnya *basic*, *intermediate*, maupun *advance*. Beberapa program lokakarya, dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM masyarakat dan SDM ekonomi digital terus dijalankan oleh Kementerian Kominfo.

Ketiga, swasta. Sektor swasta perlu hadir untuk memperkuat penataan ekosistem digital. Kementerian Kominfo juga berupaya mendorong agar sektor swasta bisa terlibat dalam membuat pelatihan teknis berbasis digital kepada masyarakat, termasuk di dalamnya membantu menciptakan transformasi ekonomi dalam

Keempat, akademisi. *Khazanah* pemikiran dari para akademisi sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Tentunya aspek pengajaran, penelitian, dan karya pengabdian masyarakat, sebagaimana termaktub dalam tridarma perguruan tinggi, merupakan warna tersendiri. Para akademisi yang berperan sebagai mitra fasilitator di sekolah menengah dan perguruan tinggi pun terus didorong oleh Kominfo untuk turun langsung untuk mendampingi masyarakat. Kominfo juga terus mendorong agar para akademisi bisa membuat terobosan-terobosan yang inovatif dan *out of box*, dalam upaya menciptakan ekosistem digital di Indonesia.

Kelima, media. Eksistensi media, yang mencakup media cetak, elektronik/daring, tidak kalah penting, yakni menjadi amplifikator yang produktif

bagi upaya multi-pihak dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Dalam hal ini, media perlu mengamplifikasi proses, keluaran, dan dampak program untuk memperluas *awareness* dan mempercepat terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki semangat belajar teknologi digital. Di sini, Kementerian Kominfo terus mendorong agar media-media tidak menjadi corong penyebaran konten-konten yang sifatnya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

Selain media pemberitaan, Kementerian Kominfo juga menaruh atensi pada perkembangan media sosial, mengingat kehadirannya yang dapat memengaruhi opini publik. Kita tahu bersama bahwa saat ini, ada begitu banyak hoaks dan provokasi yang berseliweran di dunia maya. Hal ini kemudian membuat aktivitas dunia maya menjadi tidak sehat, bahkan kontra produktif terhadap upaya mewujudkan Indonesia Digital.

Tentunya salah satu tugas utama Kominfo adalah melakukan *take down* terhadap narasi-narasi hoaks, provokasi, SARA, radikalisme, dan konten-konten internet negatif lainnya. Dari awal 2021 hingga September 2021, tercatat sebanyak 24.531 konten negatif yang mengalami penutupan akses oleh Kementerian Kominfo.

Selain melakukan penutupan akses, Kementerian Kominfo pun terus mendorong para *Key Opinion Leader*, termasuk di dalamnya para *influencer* dan konten kreator, untuk menyebarkan konten-konten yang membangkitkan optimisme publik, khususnya tentang bagaimana mengembangkan peradaban Indonesia ke arah digital. Semakin Digital Semakin Maju.

# Sepotong Kisah Kunjungan Menteri Johnny *ke Tanah NTT*



Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat bergembira dan bahagia hari ini, karena kehadiran Pak Menteri dan seluruh pejabat hadir di provinsi di Nusa Tenggara Timur



**G**enap dua tahun kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate sejak namanya pertama kali diumumkan masuk dalam susunan Kabinet Kerja Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019).

Selama masa kepemimpinannya, Menteri Johnny kerap kali melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, dari Barat hingga Timur, memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berjalan dengan baik dan merata di seluruh Indonesia.

Salah satu wilayah ia kunjungi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Tanah kelahiran Menteri Johnny ini menjadi salah satu target pembangunan *Base Transceiver Station*. Terdapat sebanyak 421 BTS untuk 421 desa yang tengah dibangun dan ditargetkan rampung di tahun 2022 mendatang.

Sebagai putra kelahiran Manggarai, kunjungan Menteri Johnny G. Plate ke NTT ini tentunya meninggalkan kesan bagi masyarakat NTT. Dalam salah satu kunjungan kerja Menteri Johnny ke NTT pada Juni 2021 lalu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan bahwa gelaran rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate tersebut memberikan energi positif dan semangat bagi masyarakat NTT dan pemerintah daerah untuk bekerja dan mengejar ketertinggalan.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat bergembira dan bahagia hari ini, karena kehadiran Pak Menteri dan seluruh pejabat hadir di provinsi di Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

Kesan positif ini juga dirasakan oleh para punggawa spektrum frekuensi dari Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Kupang, sebagai perpanjangan tangan Kominfo di tanah kelahiran Menteri Kominfo itu. Berikut sepenggal tulisan dari tim Balmon SFR Kupang saat mendampingi Menteri Johnny dalam kunjungannya ke NTT, pertengahan 2021 lalu.

## “Bapak Menteri yang Energik

Pada tanggal 28 Juni 2021 lalu Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Plate melakukan kunjungan kerja ke Kupang NTT dalam rangka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS di Provinsi NTT di Hotel Aston Kupang.

Dalam sambutannya, Pak Menteri menyampaikan kepada seluruh Bupati dan Walikota yang hadir bahwa Kementerian Kominfo telah, sedang, dan akan terus mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, termasuk pembangunan infrastruktur TIK di NTT untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia.

Oleh Pak Gubernur NTT, sebenarnya Pak Menteri diminta untuk hadir secara virtual tetapi beliau merespon akan hadir secara langsung, sebagai wujud keberpihakan dan komitmen Pak Menteri terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi di NTT.





Kami mengamati bahwa Pak Menteri sangat energik dan bersemangat serta berkomitmen kuat dalam memastikan kebutuhan masyarakat akan akses internet dan literasi digital terpenuhi dengan baik.

Kesan ini kami dapat saat mendampingi beliau dalam perjalanan darat ke Bokong, dua jam dari Kota Kupang dengan kondisi jalan yang tidak semuanya mulus untuk menghadiri acara Literasi Digital di Gereja Bait'el Bokong Kab. Kupang, Klasis Fatuleu Timur. Perjalanan ini beliau tempuh setelah sebelumnya hadir dalam acara di Hotel Aston Kupang.

Pak Menteri juga sempat membeli beberapa kain tenun dan makanan ringan hasil karya anak – anak karang taruna setempat.

Setelah dari Bokong, Pak Menteri melanjutkan perjalanannya ke lokasi landing point Proyek Strategis Nasional Palapa Ring Timur di Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.

Jadwal kegiatan dan rute perjalanan sebenarnya sangat melelahkan, tetapi pak Menteri tidak menunjukkan rasa capek sedikitpun, bahkan beliau kelihatan tetap semangat..

Terima kasih atas semangat dan komitmennya untuk kami di NTT, Pak Menteri Johnny G. Plate.

Semoga Pak Menteri senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat serta dimudahkan segala ikhtiar dalam mewujudkan percepatan transformasi digital di Indonesia untuk Indonesia yang semakin maju dan tumbuh.

*Salam,*

Balmon SFR Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur





Pemerintah Berupaya Jaga Data Pribadi,

# Menkominfo: Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pemerintah berupaya untuk menjaga data pribadi masyarakat. Selain meningkatkan keamanan informasi, Menkominfo juga meminta setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) meningkatkan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran data.

Untuk setiap aplikasi layanan pemerintah, Menteri Johnny menyatakan selalu mengembangkan fitur agar sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat, salah satunya aplikasi PeduliLindungi. Oleh karena itu, Menkominfo meminta masyarakat tidak perlu khawatir,

“Fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi PeduliLindungi kini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat. Ada banyak fitur di dalamnya,” jelasnya usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Data Center Integrasi (DCI) Indonesia, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (02/09/2021).

Menurut Menteri Johnny, aplikasi PeduliLindungi ini akan digunakan untuk mendukung kenyamanan dalam interaksi dan kegiatan masyarakat selama masa pandemi, bahkan pada saat pasca pandemi, guna membantu dan memudahkan aktivitas masyarakat.

“Kita harapkan PeduliLindungi ini akan menjadi aplikasi yang menunjang, mendukung kenyamanan dalam interaksi dan kegiatan masyarakat. Jadi, masyarakat jangan terlalu khawatir karena pemerintah tentu akan berupaya menjaga data-data masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Menkominfo menyatakan arti penting peningkatan kemampuan dan keamanan teknologi oleh PSE. “Itu harus, itu harus selalu dilakukan. Memang kita berharap saat ini agar kita semuanya menjaga itu. Jangan sampai memberikan satu komitmen atau janji yang lebih dari tugas dan fungsinya,” tandasnya.

Menteri Johnny juga berharap agar penanganan Covid-19 berlangsung dengan baik dan pada saat bersamaan, data pribadi masyarakat juga bisa terlindungi.

“Saya juga berharap agar penanganan Covid-19 ini yang kita sama-sama sedang hadapi dan ingin atasi, dihadapkan lagi dengan *illegal hackers* dan berada di situasi dengan *data breach* yang dengan sengaja dilakukan karena manfaatnya jauh lebih kecil dari mudharatnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Menkominfo mengajak PSE untuk menjaga kerahasiaan data pengguna dan mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19.

“Karena kebocoran data tentu mengganggu keseluruhan kemampuan kita untuk melakukan percepatan, penanganan, dan menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Baru-baru ini kita kan mendengar, salah satu yang terakhir adalah ada serangan terhadap aplikasi eHac (*Electronic Health Alert Card*),” ungkapnya.

Soal dugaan kebocoran data pengguna aplikasi e-HAC, Menteri Johnny menyatakan adanya kemungkinan *data breach* atau *data leak* terjadi pada versi aplikasi e-HAC lama yang dikembangkan



Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Sementara itu, untuk versi terbaru, Menkominfo menuturkan aplikasi e-HAC sudah terintegrasi di dalam *cloud* pemerintah yang berada di Kementerian Kominfo.

“Kebocoran data yang terjadi saat ini, tidak ada hubungannya dengan integrasi aplikasi eHAC yang baru (yang terintegrasi) bersama-sama dengan aplikasi atau *platform* PeduliLindungi di bawah Kementerian Kominfo. e-HAC yang ada di Kementerian Kominfo menjadi bagian dari sistem yang terhubung dengan PeduliLindungi itu aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena itu terjaga dengan baik dan tidak ada kebocoran datanya,” jelasnya.

Namun demikian, Menteri Johnny meminta masyarakat untuk menghapus semua aplikasi eHAC lama. “Itu perlu kita hapus atau *takedown* semuanya agar eHAC yang nanti digunakan hanya yang menjadi bagian terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi yang ada di Kominfo,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Bekasi, Menkominfo didampingi Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono; CEO DCI Indonesia, Toto Sugiri; serta Direktur Operasional DCI Indonesia, Marco Cioffi.

# Aplikasi PeduliLindungi di Tengah Gempuran Hoaks



“

Salah satu hoaks yang sempat viral beberapa waktu lalu ialah tentang kebocoran data sertifikat vaksinasi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo. Hoaks ini membuat masyarakat menjadi ragu akan keamanan data pribadi dari aplikasi PeduliLindungi.

”



### **Pandemi Covid-19 hampir memasuki usia 2 tahun di Indonesia.**

Pemerintah pun terus melakukan berbagai hal yang terarah untuk semaksimal mungkin memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satu bentuk upaya pemerintah yang terarah pada pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 adalah dengan membuat aplikasi PeduliLindungi.

PeduliLindungi merupakan kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, PT Telkom Indonesia selaku operator telekomunikasi, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Saat ini pun pemerintah terus mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi yang

dikembangkan sejak awal 2020 tersebut. Optimalisasi aplikasi tersebut, salah satunya dengan melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kominfo, bekerja sama dengan Telkom, BSSN, serta kementerian terkait lainnya.

Aplikasi yang telah diunduh oleh 40 juta lebih masyarakat Indonesia tersebut wajib digunakan oleh masyarakat sebagai syarat melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum. Selain itu, untuk mengakses layanan fasilitas umum, masyarakat juga harus melakukan scan QR Code dengan menggunakan PeduliLindungi. Namun, seiring dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan dan mengembangkan pemanfaatannya, muncul berbagai hoaks yang membuat masyarakat jadi skeptis terhadap aplikasi tersebut.



# Hoaks

## tentang PeduliLindungi

Beberapa waktu lalu, beredar unggahan di media sosial bahwa aplikasi PeduliLindungi buatan Singapura, sehingga kedaulatan data Indonesia sudah ada di tangan pihak asing. Informasi hoaks tersebut berasal dari cuitan akun Twitter @yunanto\_id, dengan sebuah tangkapan layar postingan oleh Peter F. Gontha yang berisikan klaim bahwa aplikasi PeduliLindungi dibuat dan semua data direkam oleh Singapura. Postingan tersebut disukai sebanyak 46 kali dan di-retweet 25 kali.

Faktanya, informasi tersebut tidak benar karena aplikasi PeduliLindungi murni merupakan

buatan anak bangsa yang dikembangkan bersama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Hal ini pun dibenarkan oleh PT Telkom Indonesia yang menyatakan bahwa PeduliLindungi 100 persen dibuat oleh putra-putri terbaik Indonesia. Data PeduliLindungi ditempatkan di pusat data yang berlokasi di dalam negeri dan dikelola sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pihak Kementerian Kominfo pun sudah memberikan label/stempel hoaks terhadap narasi tersebut.

Selain itu, beredar juga informasi yang menyebutkan bahwa aplikasi PeduliLindungi rawan *phising* dan *malware* karena belum tersedia di AppStore dan PlayStore.

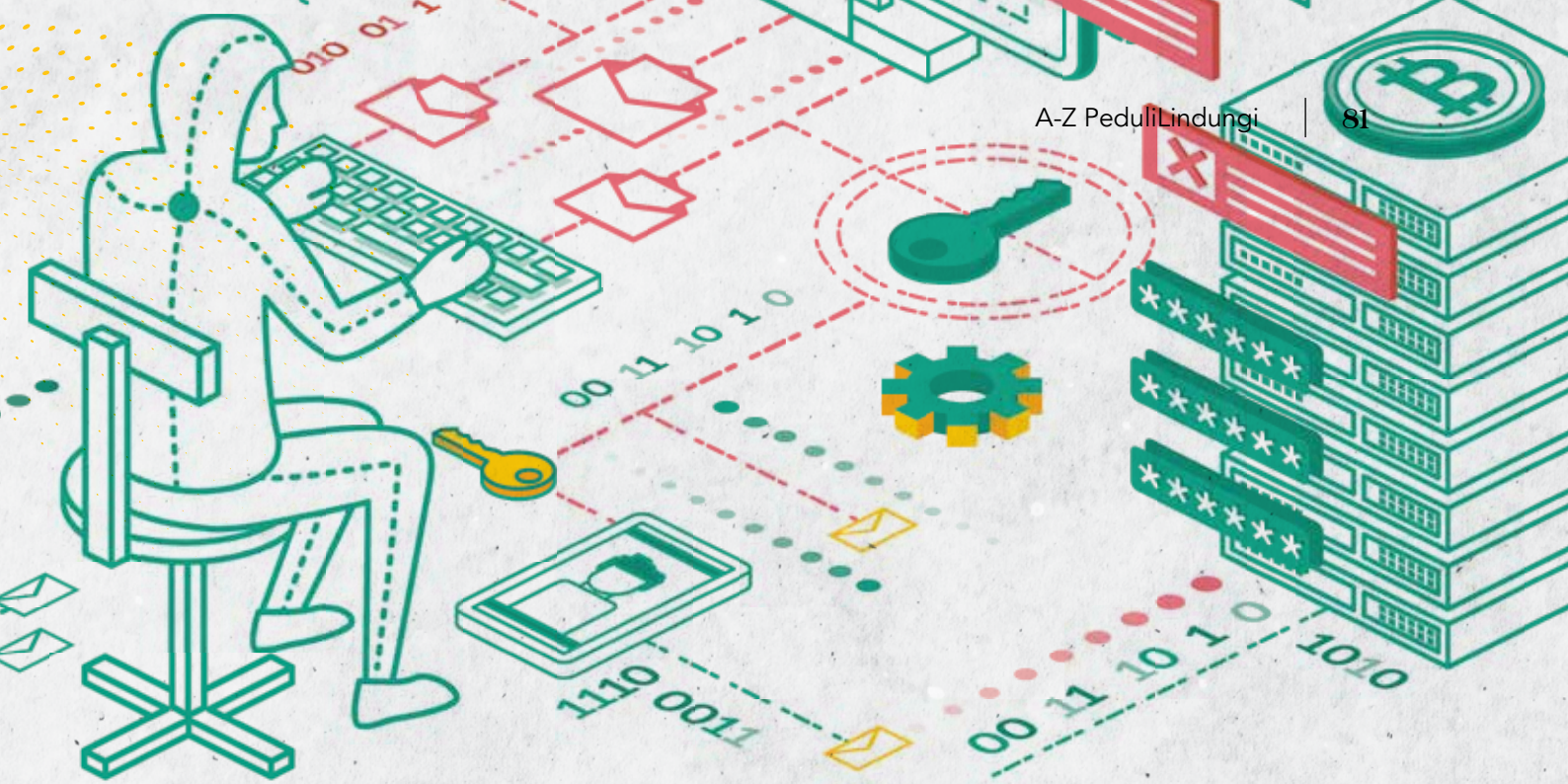
Menanggapi hal tersebut, Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Siaran Pers

No. 57/HM/KOMINFO/04/2020, memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah dapat diunduh melalui AppStore untuk versi iOS dan PlayStore untuk versi Android. Penginstalan aplikasi ini tidak melalui file APK sehingga aman dari *phising* dan *malware*.

Aplikasi PeduliLindungi sendiri telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo No. 171 tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan *tracing*, *tracking* dan *fencing* melalui infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi untuk mendukung *Surveilans* Kesehatan melengkapi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Kominfo No. 159 Tahun 2020.

Keputusan menteri ini bersifat khusus dan sekaligus untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi sesuai perundang-undangan. Maka, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ragu dan





tidak meng-*install* PeduliLindungi, karena *provider* aplikasi tersebut menggunakan sistem keamanan berlapis.

Kemudian, salah satu hoaks yang sempat viral beberapa waktu lalu ialah tentang kebocoran data sertifikat vaksin dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo. Hoaks ini membuat masyarakat menjadi ragu akan keamanan data pribadi dari aplikasi PeduliLindungi. Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah kemudian menjelaskan bahwa kebocoran tersebut tidak berasal dari aplikasi PeduliLindungi.

Dalam pernyataan bersama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan informasi NIK Jokowi terlebih dulu bisa diakses dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Informasi NIK yang tersebar ini yang dimanfaatkan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi lewat aplikasi PeduliLindungi.

"Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum," demikian keterangan tiga lembaga tersebut, Jumat (03/09/2021).

Akses sertifikasi vaksin di sistem PeduliLindungi sebelumnya mensyaratkan nomor telepon genggam. Namun untuk memudahkan masyarakat kini hanya menggunakan lima parameter yakni nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Selain NIK dan tanggal lahir yang dapat diakses dari situs KPU, informasi tanggal dan jenis vaksin Presiden, bisa diperoleh dari pemberitaan media massa.

Sebelumnya, warganet membicarakan NIK Jokowi yang dapat diperoleh dengan mudah melalui situs KPU. Namun pihak

KPU mengatakan informasi tersebut didapatkan dengan memegang prinsip perlindungan data pribadi.

KPU telah meminta persetujuan tertulis pada pasangan calon Pemilu 2019 lalu untuk mempublikasikan data tersebut.

"Dalam konteks pencalonan Presiden Pemilu 2019, untuk publikasi syarat calon, KPU meminta persetujuan tertulis dari masing-masing pasangan calon," kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam pesan singkatnya, Jumat(03/09/2021).

# Keunggulan PeduliLindungi

**Terlepas dari berbagai hoaks yang menyerangnya, aplikasi PeduliLindungi memiliki keunggulan-keunggulan yang progresif.**

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Reisa Broto Asmoro dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa PeduliLindungi sangat bermanfaat, karena dapat menginformasikan kapasitas maksimal tempat yang dikunjungi dan menunjukkan resiko penularan Covid-19 yang ada di sekitar. Selain itu, PeduliLindungi juga menyimpan rekam digital sertifikat vaksin masyarakat. Hal ini membuat potensi pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19 menjadi semakin kecil.

**Lebih dari itu, berikut beberapa manfaat PeduliLindungi:**

**Pertama,** Memberi informasi terkait zonasi. Aplikasi ini dapat memberikan notifikasi jika pengguna masuk ke suatu zona tertentu yang kategorinya telah ditentukan pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Zona tersebut bisa berupa **zona merah, oranye, kuning, atau hijau**, bergantung dengan lokasi yang dikunjungi oleh pengguna.

**Kedua,** *Contact Tracing*. Pengguna aplikasi PeduliLindungi akan mendapatkan pemberitahuan jika melakukan kontak dengan pengguna lain yang terdiagnosa positif Covid-19 dalam rentang waktu 14 hari terakhir. Untuk itu, pengguna akan diminta menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah setempat. Jika pengguna terdiagnosa positif Covid-19, PeduliLindungi akan meminta persetujuan pengguna untuk mengakses data hasil *contact tracing* dalam waktu 14 hari terakhir yang tersimpan di server PeduliLindungi. Data pengguna yang melakukan kontak dengan Anda dalam waktu 14 hari terakhir akan digunakan

sebagai sumber data awal bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan *tracing*.

**Ketiga,** Menampilkan statistik kasus Covid-19. Aplikasi ini juga dapat menampilkan statistik kasus covid-19 di lokasi sekitar pengguna.

**Keempat,** Memberikan Informasi kepada pengguna jika berada di keramaian. PeduliLindungi akan memberikan notifikasi jika pengguna teridentifikasi berada di keramaian, yaitu berada di tempat yang sama dengan beberapa pengguna lain yang mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi dalam waktu yang cukup lama.

**Kelima,** Paspor Digital. Terdapat fitur paspor digital pada aplikasi PeduliLindungi. Fitur ini dapat menampilkan sertifikat vaksin Covid-19 dan hasil tes Covid-19 dari laboratorium yang terafiliasi dengan pemerintah. Sertifikat vaksin tersebut juga dapat diunduh melalui aplikasi ini.

**Keenam,** Pendaftaran Vaksin. Pengguna juga bisa melakukan pendaftaran vaksinasi Covid-19 melalui PeduliLindungi.



**Ketujuh,** Diary Perjalanan. PeduliLindungi dapat menyimpan dan menampilkan histori perjalanan pengguna di fitur Diary Perjalanan sebagai upaya program *contact tracing* oleh pemerintah.

**Kedelapan,** Telemedisin. Terdapat fitur teledokter pada aplikasi ini. Fitur ini membuat pengguna dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan telekonsultasi dengan dokter yang akan difasilitasi oleh aplikasi dari pihak ketiga.

**Kesembilan,** Dapat membuat e-Hac  
Aplikasi ini juga sudah terhubung *Electronic Health Card* (e-HAC) yang menjadi syarat penerbangan domestik maupun internasional.

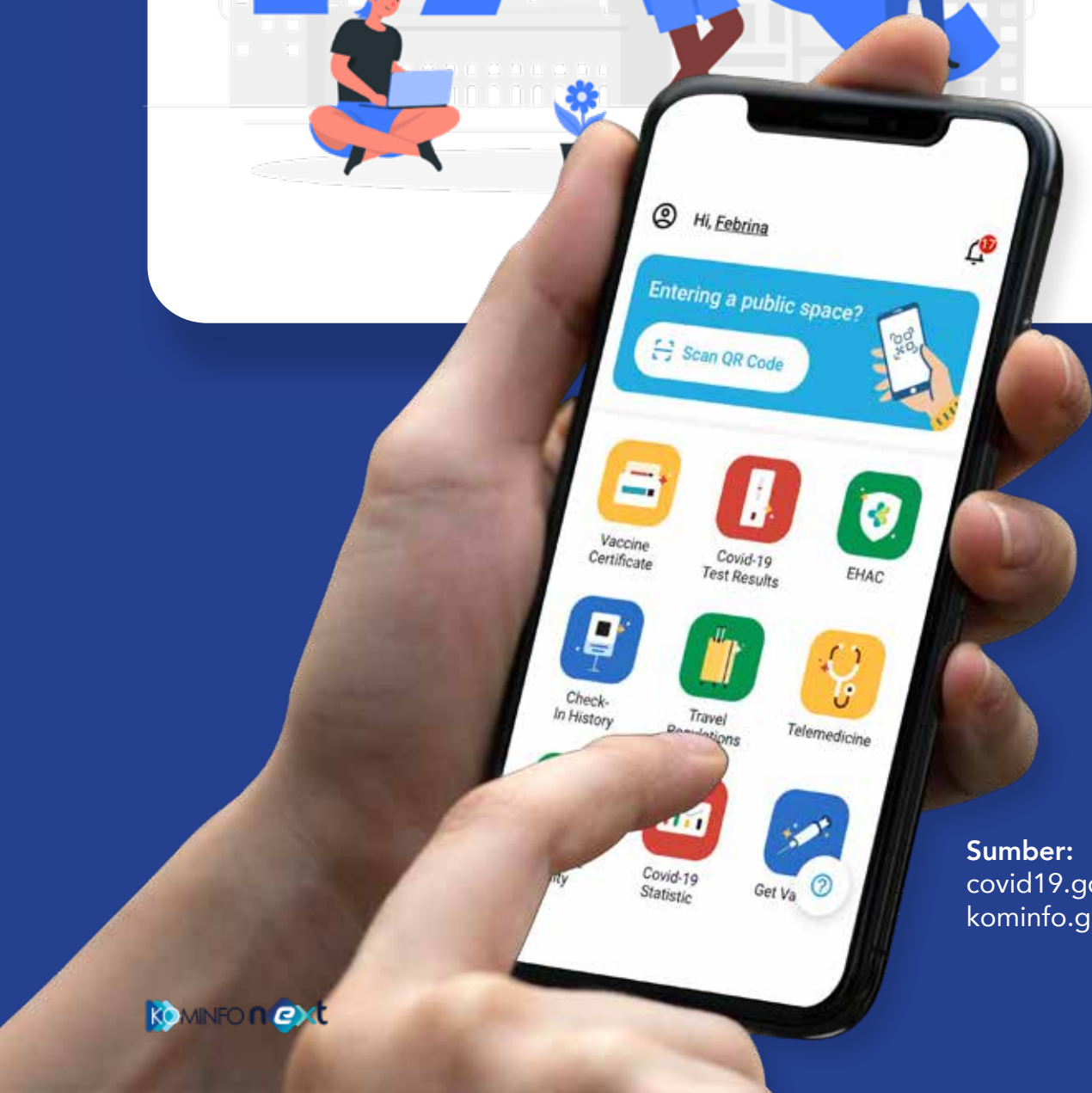
**Kesepuluh,** Mengakses Layanan Publik. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna sebagai syarat untuk mengakses fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, supermarket, bioskop, tempat wisata, restoran, fasilitas olahraga, transportasi umum, termasuk area perkantoran.

Caranya hanya dengan scan atau pindai melalui fitur *QR Code*. Lalu PeduliLindungi akan menampilkan data status vaksinasi pengguna, kondisi kesehatan pengguna saat terinfeksi Covid-19 dan riwayat kontak atau infeksi covid-19.

Setelah di-scan (pindai), akan muncul hasil pemindaian yang menunjukkan apakah pengguna diperbolehkan untuk mengakses suatu tempat atau tidak.

Jika hasilnya menampilkan warna hijau, artinya pengguna diperbolehkan masuk. Namun, jika yang muncul adalah warna kuning, artinya petugas akan melakukan verifikasi ulang. Sementara, apabila hasilnya warna merah dan warna hitam, pengguna tidak diizinkan masuk.





Sumber:  
[covid19.go.id](https://covid19.go.id)  
[kominfo.go.id](https://kominfo.go.id)

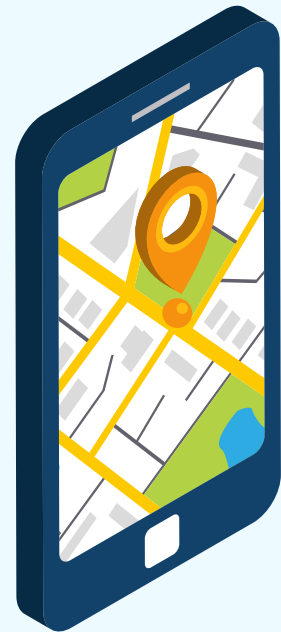
## Q: Bagaimana PeduliLindungi bekerja?



## A:

Saat mengunduh **PeduliLindungi**, sistem akan meminta persetujuan Anda untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi Anda serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19.

Hasil *tracing* ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Sehingga, semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan *tracing* dan *tracking*.



## Q: Apa arti dari 4 warna pada PeduliLindungi?



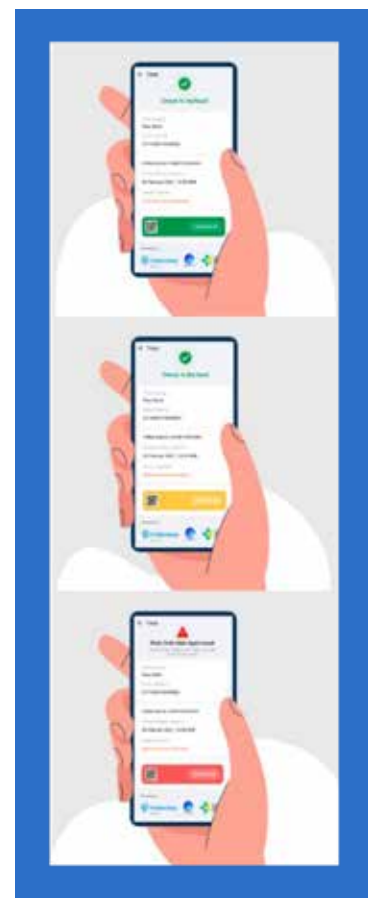
## A:

**Warna hitam, merah, oranye/kuning, dan hijau** saat menggunakan PeduliLindungi merupakan indikator yang akan muncul setelah pengguna *check-in* pada aplikasi. **Warna Hitam** menandakan bahwa orangnya berstatus terinfeksi COVID-19 atau merupakan kontak erat dari orang yang terinfeksi COVID-19, sehingga tidak boleh beraktivitas di ruang publik.

**Warna Merah** menandakan orang yang belum divaksinasi, baik dosis pertama maupun dosis kedua sehingga juga tidak diperkenankan berada di ruang publik atau fasilitas umum.

Sementara indikator **warna oranye atau kuning**, berarti pengunjung baru menerima vaksin dosis pertama, atau pernah terkonfirmasi COVID-19 dan sudah sembuh, namun belum bisa divaksinasi karena belum tiga bulan, dan untuk berkegiatan di ruang publik disesuaikan dengan peraturan setempat.

Terakhir, indikator **warna Hijau** menandakan orangnya telah divaksinasi secara lengkap (dua dosis) dan tidak ada hasil positif atau kontak erat dengan pasien COVID-19, sehingga aman untuk berkegiatan di ruang publik.





**Q:** Bagaimana jika ada orang dengan status indikator **Hitam** berkeliaran di fasilitas publik?



**A:** Pemerintah berkomitmen dengan kerjasama bersama satgas di fasilitas publik untuk segera merujuk orang yang terjaring atau kategori hitam, atau tergolong positif atau memiliki kontak erat untuk segera dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat terdekat

**Q:** Jika saya vaksin di luar negeri, apakah akan terekam di PeduliLindungi?



**A:** Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang vaksin di luar negeri tetap bisa menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan Kartu Verifikasi Vaksin Non-Indonesia (VNI).



Alur verifikasi vaksinasi adalah dengan mengajukan verifikasi melalui situs web <https://vaksinln.dto.kemkes.go.id/sign/in>. Untuk bisa mendaftar dan mengajukan verifikasi vaksin COVID-19, pengguna harus menyiapkan berkas-berkas seperti ID (KTP/NIK untuk WNI dan Paspor untuk WNA) dan kartu vaksinasi yang didapat saat divaksinasi di luar negeri. Untuk WNA ada tambahan berkas, yakni izin diplomatik dari Kementerian Luar Negeri / izin tinggal dari imigrasi dan Kartu Vaksinasi dari luar negeri.

Setelahnya Data Individu dan Vaksinasi diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan (bagi WNI) dan oleh masing-masing kedutaan (bagi WNA). Hasil verifikasi akan dikonfirmasi melalui email, lalu pihak yang mengajukan dapat mendaftar dan login di aplikasi PeduliLindungi, melengkapi data akun untuk aktifkan Status Vaksinasi, dan dapatkan Kartu Verifikasi Vaksinasi dengan masuk ke web <https://pedulilindungi.id> Pilih menu Cek Sertifikat dan lengkapi data yang dibutuhkan untuk mengeceknya. Setelah itu, bisa membuka aplikasi PeduliLindungi dan pilih *Scan QR Code* untuk *check in*.

## Q: Lokasi pasar rakyat mana saja yang menjadi tempat penerapan aplikasi PeduliLindungi?



A: Ada 6 (enam) pasar rakyat yang tengah diuji coba untuk penerapan PeduliLindungi, yaitu Pasar Mayestik (Jakarta), Pasar Blok M (Jakarta), Pasar Baltos (Bandung), Pasar Modern BSD (Tangerang Selatan), Pasar Modern 8 Alam Sutera (Tangerang), dan Pasar Wonodri (Semarang).



## Q: Bagaimana jika terdapat kendala saat mengakses aplikasi?



A: Ada empat cara yang dapat dilakukan jika Anda mengalami kendala saat menggunakan aplikasi PeduliLindungi, yaitu Muat ulang, Periksa Pembaruan Aplikasi untuk memastikan sistem operasi perangkat dan aplikasi Anda sudah sesuai dengan versi terbaru. Pembaruan sistem operasi perangkat dan aplikasi berguna untuk menyesuaikan spesifikasi sistem dengan aplikasi.

Cara ketiga adalah pastikan memori ponsel memadai. Terlalu banyak aplikasi atau *file* yang disimpan dalam ponsel akan membuat aplikasi lain menjadi *error* termasuk aplikasi PeduliLindungi. Menumpuknya *cache* bisa jadi menghambat proses pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi. Oleh sebab itu, pastikan kapasitas memori dalam ponsel Anda memiliki ruang mencukupi.

Cara terakhir adalah periksa jaringan internet. Pastikan koneksi jaringan internet Anda dalam posisi yang stabil agar tidak mempengaruhi proses saat pemindaian QR Code oleh aplikasi PeduliLindungi.



## Q: Apakah data pada PeduliLindungi aman?



A: PeduliLindungi sangat memperhatikan kerahasiaan pribadi Anda. Data Anda disimpan aman dalam format terenkripsi dan tidak akan dibagikan kepada orang lain. Data Anda hanya akan diakses bila Anda dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan.

Mulai Oktober mendatang fitur pada aplikasi PeduliLindungi bisa diakses sejumlah aplikasi lain. *Chief Digital Transformation Office*, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Setiaji mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah platform digital seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket, Dana, Cinema XXI, Link Aja, hingga aplikasi dari Pemerintah DKI Jakarta, Jaki. Masyarakat segera dapat mengakses fitur-fitur yang ada di PeduliLindungi pada platform tersebut.

## Q: Apa benar PeduliLindungi dibuat oleh Singapura dan data pengguna direkam oleh pihak Singapura?



A: **Salah.** Aplikasi PeduliLindungi dibuat oleh pemerintah dan PT Telkom Indonesia data PeduliLindungi ditempatkan di pusat data yang berlokasi di dalam negeri dan dikelola oleh Kemenkominfo sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.





# Kominfo Gelar Workshop Strategi Komunikasi dan Rebranding Lembaga

Dalam rangka melakukan rebranding Kementerian Kominfo 2021, Biro Humas Kementerian Kominfo mengadakan "Workshop Manajemen dan Strategi Komunikasi untuk *Rebranding Lembaga*", pada Kamis (21/10) di Nusa Dua Bali. Acara yang digelar selama sehari penuh tersebut menghadirkan narasumber berpengalaman dalam strategi komunikasi publik dan komunikasi pemerintah.

Menurut Kepala Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Fery Gunawan, salah satu cara untuk memperkenalkan sebuah organisasi atau lembaga agar bisa dikenal oleh publik yakni dengan membangun *branding*.

Fery menyatakan ada lima cara menentukan *branding* sebuah institusi atau organisasi agar bisa dikenal di masyarakat. "Menentukan fokus, menyampaikan pesan dengan cerita, membangun konsistensi, memberi Manfaat atau Inspirasi, hingga berkolaborasi dan menciptakan sistem," ujarnya.

Dalam menentukan fokus, sebuah lembaga atau organisasi harus bisa menentukan pesan kunci yang ingin ditampilkan dan konsisten terhadap pesan kunci tersebut. Pesan kunci dapat berupa kompetensi yang dimiliki atau pemahaman mengenai industri tertentu.

"Pesan kunci yang ingin disampaikan hendaknya menasar target audiens tertentu untuk memudahkan pembuatan konten dan pembentukan *branding*," paparnya.

Menurutnya membangun konsistensi perlu dilakukan dalam membahas topik tertentu agar membuat *branding* menjadi semakin kuat. Konsistensi membuat audiens semakin mengenal dan mengingat saat topik tersebut muncul.

"Konsistensi juga berlaku untuk *branding offline* dan *online*, termasuk di seluruh platform media sosial, membuat *branding* semakin kuat, khususnya ketika menghadapi kegagalan atau krisis," paparnya.



Menurutnya strategi branding menentukan seberapa jauh publik mengenal institusi, seberapa dalam publik mengenal layanan yang diberikan dan seberapa terpercayanya informasi dan layanan yang diberikan.

"Proses *branding* melewati 8 tahap yakni menetapkan tujuan, menganalisa situasi, pemetaan stakeholders, Survei dan Analisis Persepsi, menetapkan sasaran, menyusun strategi komunikasi, menentukan agenda setting, rencana aksi & implementasi hingga melakukan evaluasi," jelasnya.

Fery mencontohkan ketika Kementerian Keuangan mengeluarkan kampanye #UangKita untuk mengkomunikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia sebagai langkah transparansi terhadap publik.

"APBN dinilai merupakan topik yang kurang diminati karena berisi hal yang berkaitan dengan data-data ekonomi secara teknis. Sehingga dibutuhkan komunikasi khusus agar bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat dan tidak mengintimidasi pihak-pihak tertentu," ungkapnya.

Kampanye #UangKita dinilai sederhana dan mudah dipahami. Selain itu kampanye tersebut relevan dengan masyarakat/publik luas serta mempresentasikan *sense of belonging/ownership*.



# Kunci Sukses Rebranding

Sementara itu, CEO AsiaPR dan Konner Advisory, Silih Agung Wasesa dalam penjelasannya mengatakan, proses rebranding sebuah lembaga itu sangat dibutuhkan karena perubahan situasi internal dan eksternal.

Kebijakan pemerintah yang berubah, perubahan perilaku pemangku kepentingan, hingga perubahan target layanan publik menjadi alasan perlunya dilakukan rebranding. "Yang menarik adalah dari rebranding adalah bagaimana kita membangun reputasi yang sudah ada di Kominfo. Karena pemerintah punya porsi yang unik, di satu sisi punya banyak penggemar, dan juga banyak dianggap salah," tuturnya.

Silih menjelaskan bahwa target audiens merupakan salah satu kunci dalam melakukan *rebranding*. Menurut Silih, kebanyakan pemerintah ketika ditanya tentang target audiens menjawab semuanya, sementara semuanya sama saja dengan tidak ada target audiens.

"Kita menggunakan target audiens agar bisa berkembang ke mana-mana. Target audiens dapat mempengaruhi target audiens lainnya, sehingga pesan bisa lebih viral. Jika semuanya adalah target audiens, maka akan menjadi tidak efektif dan mengeluarkan lebih banyak biaya," ungkap Silih.

Silih menekankan bahwa *rebranding* bukan hanya sekedar ganti logo, melainkan esensi yang lalu dijadikan sensasi. Karena syarat dasar *rebranding* adalah pencapaian tujuan layanan publik jadi lebih efisien.

"Jika hanya merubah logo tapi layanannya sama saja, berarti sama saja tidak ada rebranding. Sehingga harus ada lanjutan pada saat melakukan perubahan logo, yang paling penting apakah esensinya berubah?" paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kunci sukses dalam melakukan *rebranding* yakni dengan menciptakan ekosistem perubahan yang bisa diserap oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal.

"Setiap elemen *stakeholder* harus aware terhadap perubahan nilai, memiliki *attitude* yang positif untuk ikut berubah, menciptakan action terukur untuk mendorong tercapainya perubahan," paparnya.

Terdapat tiga langkah dalam melakukan transformasi *rebranding*, yaitu membuat konten kreatif, menyalurkan lewat kanal komunikasi yang tidak biasa, dan amplifikasi yang menarik.

Menurut Silih, menjadi tantangan pemerintahan terutama Kementerian untuk membuat konten yang kreatif karena banyaknya batasan yang ada. Konten-konten yang dibuat harus menjadi sosok yang kreatif yaitu program.

Pemerintah juga harus mulai memilih untuk menyalurkan konten kreatif melalui kanal yang tidak biasa seperti pasar dan komunitas. "Hingga saat ini Kementerian Kominfo masih memilih kanal biasa seperti televisi atau iklan dalam menyalurkan konten kreatifnya. Memang butuh usaha untuk masuk ke kanal yang tidak biasa," kata Silih.

Silih menekankan amplifikasi yang menarik dan harus didasarkan dengan esensi. Menurut Silih, jangan sampai membangun sensasi akan tetapi tidak memiliki esensi.

Silih juga mengatakan bahwa saat ini sudah bukan era placement tunggal, melainkan eranya cross multi-channel. Artinya saling berhubungan antara satu media dengan media lainnya, sementara apabila placement tunggal antar channel memiliki pesan yang berbeda-beda.

Silih mencontohkan Kementerian Keuangan yang apabila mau mengeluarkan isu yang berkaitan dengan keuangan, mereka mereka sudah menyiapkan cross multi-channel. Sehingga sebelum kebijakan tersebut keluar dari Menteri Keuangan (Menkeu), kebijakan tersebut sudah tersebar ke channel yang sudah ada. Ketika Menkeu mengumumkan isu tersebut, komunitas di bawahnya sudah siap menerima.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah Satuan Kerja di Kominfo, perwakilan dari Dinas Kominfo wilayah Denpasar dan sekitarnya, Balai Monitoring sebagai Unit Pelaksana Tugas Kementerian Kominfo di Denpasar, serta utusan dari Dinas Kominfo Provinsi NTT.



# Kunjungan Kerja Menkominfo Papua & Papua Barat



## Kunjungan Kerja Menkominfo Papua & Papua Barat

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kedua kiri) tiba di Bandar Udara Sentani, Jayapura, Papua, Kamis (23/09/2021), disambut oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw (kedua kanan). Menkominfo Johnny G. Plate melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Jayapura dalam rangka menyaksikan secara langsung penyediaan jaringan telekomunikasi dan akses internet untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua yang diselenggarakan mulai tanggal 15 September-2 Oktober 2021

Menkominfo didampingi Plt. Sekda Provinsi Jayapura, Ridwan Rumasukun, saat menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Papua, Pemprov, Telkom, Telkomsel, serta pihak terkait, di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis (23/09/2021). Menteri Kominfo memimpin langsung Forkompimda Papua yang membahas mengenai langkah-langkah strategis yang diperlukan guna memastikan jaringan telekomunikasi persiapan pelaksanaan PON XX di Papua semuanya berjalan dengan aman dan lancar.





Menteri Kominfo menjelaskan telah menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi gangguan jaringan telekomunikasi di wilayah Papua dan Papua Barat saat PON XX 2021 berlangsung. Salah satu persiapannya dengan membangun rute baru fiber optik kabel laut yang berada di kedalaman 4.000 meter di sebelah utara Kota Jayapura, Papua. Jaringan tersebut untuk menyediakan layanan telekomunikasi 4G berkualitas saat penggelaran PON XX 2021 berlangsung.



Menkominfo Johnny G. Plate saat mengecek lokasi *media center* yang disiapkan untuk mendukung pemberitaan pelaksanaan POX XX di Papua, di Kantor Gubernur Papua, Kamis (23/09/2021). Menteri Kominfo menyebutkan dalam pengecekan tersebut, ia memastikan sarana infrastruktur telekomunikasi dan informatika sudah disiapkan dengan baik, termasuk pemanfaatan infrastruktur Kominfo melalui infrastruktur jaringan mitra kerja dalam hal ini PT. Telkom dan Telkomsel.



## Kunjungan Kerja Menkominfo Papua & Papua Barat

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disambut kedatangannya oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw (Ketua Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura) saat tiba di Media Center Klaster Kabupaten Jayapura, Kamis (23/09/2021). Menteri Kominfo disambut dengan tarian adat, pengalungan tas tradisional noken, serta pemakaian topi adat khas Papua.



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate didampingi Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw (Ketua Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura), Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Direktur BAKTI Kominfo Anang Latif, dan Direktur Layanan Aplikasi Pemerintah Ditjen APTIKA Bambang Dwi Anggono, melakukan peninjauan kesiapan Media Center PON XX Papua Klaster Kabupaten Jayapura, Papua yang berada di Grand Allison Hotel Sentani, Kamis (23/09/2021).





Menteri Johnny menjelaskan, selain menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas, Kementerian Kominfo juga menyediakan *media center* di tiga klaster pelaksanaan pertandingan dalam PON XX 2021 Papua, yakni *Media Center* di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Ketiga *Media Center* Klaster ini disiapkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dalam upaya mendukung media dalam meliput dan memproduksi konten-konten positif terkait PON XX Papua 2021. Ketiga *Media Center* klaster itu menjadi pendukung *Media Center* Utama yang berada di PB PON XX Papua. *Media Center* Utama berada di Kantor Gubernur Papua, Jayapura.



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat gelaran Konferensi Pers bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Jayapura yang berlangsung secara hybrid, dari *Media Center* PON XX Papua Klaster Kabupaten Jayapura, Papua, di Grand Allison Hotel Sentani, Kamis (23/09/2021). Dalam konferensi pers tersebut Menkominfo menjelaskan bahwa pembangunan TIK di wilayah Papua dan Papua Barat telah dilakukan secara masif, khususnya pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di seluruh pelosok Papua baik di wilayah-wilayah perairan maupun di wilayah tengah pegunungan.



Kedatangan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate disambut oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandaca, di Bandar Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat, Rabu (06/10/2021) dengan tarian adat "suku arfak", pemakaian kalung manik-manik, pemakaian topi mahkota, serta prosesi adat "injak piring" dengan iringan musik Totobuang sebagai ucapan selamat datang kepada warga baru di Manokwari, Papua Barat.

Kunjungan kerja Menkominfo ke Papua Barat ditujukan untuk memimpin Rapat Koordinasi Percepat Pembangunan Akses Telekomunikasi dan meresmikan Base Transceiver Station (BTS) 4G di tiga Distrik di Manokwari, Provinsi Papua Barat, yakni di desa Isiren Kecamatan Rumberpooon Kabupaten Teluk Wondama, Desa Siresi Kecamatan Soug Jaya Kabupaten Teluk Wondama, serta Desa Kasi Indah Kecamatan Kasi Kabupaten Tambrauw.



Menkominfo saat Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Telekomunikasi dan Peresmian BTS 4G di Provinsi Papua Barat, di Hotel Swiss Belhotel Manokwari, Papua Barat, Rabu (06/10/2021). Menkominfo menjelaskan keberadaan layanan BTS 4G di Papua Barat yang kini berjumlah 824 menjadi acuan pemerintah daerah dalam pengembangan ruang dan pembangunan daerah. Peresmian di Papua Barat juga menandai dimulainya layanan BTS 4G di 4.200 lokasi di seluruh Indonesia yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo tahun ini. Seluruh BTS 4G akan "on air" secara bertahap.



## Kunjungan Kerja Menkominfo Papua & Papua Barat

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Bupati Tambrauw Gabriel Asem, Bupati Teluk Wondama Hendrik S. Mambor, serta Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif melakukan video conference dengan menyapa perwakilan yang sudah berada di tiga Distrik di Manokwari, Provinsi Papua Barat lokasi BTS 4G, yakni di desa Isiren, Desa Siresi, serta Desa Kasi Indah, dari Hotel Swiss Belhotel Manokwari, Papua Barat, Rabu (06/10/2021).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyerahkan mock up BTS kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan usai meresmikan dan melakukan video conference dengan menyapa perwakilan yang sudah berada di tiga Distrik di Manokwari, Provinsi Papua Barat lokasi BTS 4G, yakni di desa Isiren, Desa Siresi, serta Desa Kasi Indah, dari Hotel Swiss Belhotel Manokwari, Papua Barat, Rabu (06/10/2021).





# SUPERAPP

Untuk segala keperluan kita sehari-hari, sekarang ini ada aplikasi *mobile*-nya. Pesen bakso, minta antar ke salon, mengarahkan *disc* parabola, karaokean, masak sarapan, mengukur jarak bersepeda, membeli mobil Tesla, menyetem senar biola, rapat jarak jauh, mengukur suhu ruangan, mengukur kadar oksigen, menonton film, mentransfer uang ke rekening lain atau ke kartu ber-NFC, main game, baca buku, mewarnai gambar, memanggil kucing, ngabsen, mendesain cat tembok rumah, mengobati jarak jauh, memancing ikan, menganalisa saham, mencari tukang, mengendalikan kamera CCTV, lari maraton virtual, mengetahui posisi pesawat, menerjemahkan, mengubah ucapan menjadi teks *vice versa*, mendesain presentasi, mendesain majalah KominfoNext, dan sebagainya.

Maka tak heran jika ikon aplikasi di ponsel kita cepat penuh. Bisa sampai harus *swipe* berhalaman-halaman. Ponsel masih baru saja sudah dipenuhi dengan aplikasi, apalagi yang sudah tahunan digunakan. Kelangkaan memori biasanya lantas menjadi ujung cerita.

Pembuat aplikasi juga sampai bingung ketika harus "ngide" membuat ikon aplikasi buatannya yang *eye-catching*. Tak heran jika kita bisa salah ketika bermaksud mencuitkan status di medsos eh malah salah pencet aplikasi cari hotel. Apalagi keduanya diawali dengan huruf yang sama, plus warna dasar yang sama sehingga berpotensi besar jejeran jika setting urutannya berdasarkan abjad,

"which is" default. Kasus ini mirip dengan uang kertas dua ribuan dan dua puluh ribuan yang secara penulisan hanya berbeda angka nol, namun ditingkah dengan warna yang tidak jauh beda, gradual. Manakala warnanya sudah memudar akan membuat perbedaannya makin nyaru. Para senior harus berhati-hati jika tidak ingin salah setor dan berujung tekor.

Menurut Mobile Apps Download & Usage Statistic 2021 yang dilansir buildfire.com, penelitian menunjukkan bahwa ada lebih dari 80 aplikasi yang terpasang di rata-rata *smartphone*. Tetapi umumnya orang tidak menggunakan semua aplikasi itu. Rata-rata orang hanya menggunakan 9 aplikasi mobile per hari dan 30 aplikasi per bulan.

Jika rata-rata pengguna ponsel cerdas memiliki 80 aplikasi di ponselnya, ini berarti lebih dari 62% aplikasi tersebut tidak digunakan dalam sebulan. Orang-orang mengunduh aplikasi dan tidak menggunakannya. Faktanya, 25% aplikasi hanya digunakan sekali setelah diunduh, kemudian tidak pernah digunakan lagi.

Ini berarti hanya ada segelintir aplikasi, 9 dari 80-an, yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan harian penggunaannya, sehingga selalu disayang-sayang dan dimanfaatkan setiap saat. Itulah yang disebut dengan *superapp*, aplikasi sapu jagad.

Masing-masing kita mungkin memiliki aplikasi sapu jagad andalan sendiri-sendiri. Tak bisa disamakan satu sama lain. Namun kita juga bisa menebak bahwa aplikasi-aplikasi di antara kita itu tidak jauh berbeda itemnya. Umumnya adalah yang memberikan kita berbagai tawaran melakukan banyak hal dalam hidup sehari-hari. Alias: itu-itu saja.

Mudah ditebak bahwa di nomor satunya adalah aplikasi untuk komunikasi, contohnya yang berinisial WA.

Meski tak menawarkan banyak menu dan fitur, namun aplikasi ini dapat membuat kita melakukan banyak hal dengan cara berkoordinasi atau memerintah.

Di nomor selanjutnya seperti aplikasi e-commerce atau *ride hailing* yang berkembang ke mana-mana, ke banyak kebutuhan sehari-hari. Dulu Gojek digadang-gadang akan menjadi aplikasi sapu jagad, namun pada perkembangannya justru mengampusti layanan-layanan tambahannya, seperti GoClean dan GoMassage. Kendati demikian, dengan segudang kemampuan, termasuk *fintech*-nya, siapapun tak ragu bahwa predikat *superapp*-nya tetap bisa disandang.

Pandemi memunculkan sebuah aplikasi besutan pemerintah, yaitu Peduli Lindungi (PL). Kehadirannya makin ngetop karena menjadi prasyarat untuk beraktivitas dengan jaminan protokol kesehatan. Namanya masyhur apalagi ketika diwajibkan bagi pengunjung mal. Sontak mulai dari bocil sampai ke nenek-nenek berakrab-ria dengan aplikasi ini.

Pemanfaatannya pun mulai bererot ke mana-mana. Dicangkokkan ke aplikasi-aplikasi *mobile* ngetop di Tanah Air yang predikatnya sudah *superapp* juga. Fiturnya makin banyak.

Kemampuannya makin hari makin membaik. Tidak malu-maluin lagi jika harus beradu keunggulan dengan aplikasi komersial lain.

Akan sangat ciamik jika aplikasi ini menjadi embrio aplikasi sapu jagad milik pemerintah untuk menyatukan berbagai pelayanan publik. Apalagi jika syarat kesehatan menjadi syarat mendasar bagi banyak layanan di masa depan. Tinggal diperkaya dengan layanan-layanan "killer" lain.

Menurut catatan Google Play Store, PL sudah diunduh lebih dari 10 juta pengguna. Artinya kita tak perlu lagi *reinventing the wheel* dengan mulai dari nol lagi jika ingin mengembangkan dan menjajakan aplikasi untuk pelayanan publik. Sudah ada 10 juta lebih basis pengguna. Yang jika puas tentu akan dengan sukarela menjadi *influencer*-nya.

Tentu saja *trust* harus ditumbuhkan dan dijaga. Isu keamanan yang sempat mencuat harus bisa dijawab dengan pembuktian yang membuat orang yakin.

Jika mampu tumbuh besar lagi secara organik, mungkin *superapp* yang konon sudah dirancang untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik alias *e-government* bisa pula dicangkokkan di aplikasi PL ini. Sapujagad.\*\*\*



Oleh: FX Bambang Irawan  
Redaktur KominfoNext

**Portal** kominfo.go.id

# Menteri Johnny: Pemerintah Akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

Menkominfo Johnny G. Plate dalam keterangan pers bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, usai menghadiri rapat mengenai pinjol di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/10/2021) - (BPMI)



Siaran Pers No. 371/HM/KOMINFO/10/2021  
Jumat, 15 Oktober 2021

Perputaran dana atau nilai omzet *financial technology peer to peer lending* atau pinjaman online mencapai Rp260 Triliun. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik mengingat telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Presiden memperhatikan banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjol. Oleh karena itu, menurutnya Presiden memberikan arahan yang sangat tegas saat rapat internal membahas hal itu.

"Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin *fintech* atas pinjaman online legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi tdi bawah tata kelola OJK," ujarnya dalam keterangan pers usai rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (15/10/2021).

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Pada tahun 2021 saja, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di *file sharing*.

"Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius," jelasnya.

Menkominfo menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman.

"Karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu," tegasnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang digital dan transaksi ekonomi digital. Forum itu juga membicarakan dan mencari solusi atas pinjaman online dan penangkalan pinjaman online tidak terdaftar atau ilegal.

"Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses *take down* secara tegas dan tepat, di saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, mengimbau masyarakat agar memilih penyedia pinjaman yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Pihaknya juga telah membuat kesepakatan bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberantas pinjol ilegal.

"Kerja sama ini di antaranya harus ditutup platformnya dan diproses secara hukum baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau *payment*, mau *peer to peer*, semua sama. Untuk itu, pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK, Kapolri, dan juga Pak Kominfo. Ini supaya masyarakat tidak terjebak pada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman dari pinjol ilegal," ujar Wimboh.



## Pernyataan Kementerian Kominfo mengenai Situs pedulilindungiq.com

1. Situs pedulilindungiq.com merupakan situs palsu dan bukan situs yang digunakan Pemerintah dalam melakukan penanganan Covid-19. Seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungiq.com tidak terkait dengan situs PeduliLindungi.id dan tidak berhubungan dengan upaya Pemerintah melakukan penanganan Covid-19 dalam bentuk apapun.

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemutusan akses terhadap situs pedulindungiq.com yang menggunakan atribut logo, gambar, dan tema menyerupai situs pedulilindungi.id

3. Situs pedulilindungiq.com mewajibkan pembayaran sebesar Rp.1.000.000 untuk pendaftaran vaksinasi Covid-19. Aplikasi PeduliLindungi dan situs pedulilindungi.id yang resmi tidak melakukan pemungutan biaya untuk keperluan apapun kepada para pengguna, termasuk untuk keperluan pendaftaran vaksin.

4. Kementerian Kominfo mengimbau agar masyarakat hanya mengakses situs resmi pedulilindungi.id serta mengunduh aplikasi resmi PeduliLindungi yang tersedia di App Store dan Google Play Store. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap segala disinformasi terkait situs dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan Aplikasi PeduliLindungi.

5. Apabila masyarakat menemukan situs atau aplikasi lain selain Aplikasi PeduliLindungi yang resmi, Kementerian Kominfo meminta masyarakat untuk melakukan pelaporan ke aduankonten.id atau kanal-kanal aduan konten lain yang telah disediakan.

Jakarta, 6 Oktober 2021  
Juru Bicara Kementerian Kominfo  
Dedy Permadi



## G20 Digital Innovation Network, Inisiatif Presidensi Indonesia Fasilitas Inovasi Digital Global



Siaran Pers No. 364/HM/KOMINFO/10/2021  
Senin, 11 Oktober 2021

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan dalam Forum Internasional G20 Innovation League 2021 yang berlangsung virtual dari Jakarta, Minggu (10/10/2021). - (IST)

Pemerintah Indonesia mengajukan inisiatif G20 Digital Innovation Network. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan hal itu sebagai bentuk kolaborasi Presidensi G20 Italia dan Presidensi G20 Indonesia dalam membangun dan memfasilitasi inovasi digital global.

“Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tinggi dan dampak yang berkepanjangan dari Liga Inovasi G20 tahun ini, dengan senang hati kami mengumumkan kolaborasi antara Presidensi G20 Italia dan Presidensi G20 Indonesia dalam organisasi G20 Digital Innovation Network tahun depan,” jelasnya dalam Forum Internasional G20 Innovation League 2021 yang berlangsung virtual dari Jakarta, Minggu (10/10/2021).

Dalam forum yang berlangsung di tengah Pertemuan G20 di Sorrento, Italia itu, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan inisiatif itu merupakan kesepakatan bersama Presidensi Italia dan Indonesia untuk mengembangkan inovasi sektor digital. Menurutnya, Presidensi G20 Italia menyelenggarakan Liga Inovasi G20 untuk membangun dan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan pelaku inovasi swasta (*startup, venture capital*, serta korporasi) dalam skala global.

“Kedua presidensi telah sepakat untuk melanjutkan komunikasi secara intensif guna memastikan penyelenggaraan G20 tahun depan dapat memanfaatkan *key learnings* dan *network* tahun ini,” ungkapnya.

Dirjen Semuel mengapresiasi penyelenggaraan Liga Inovasi G20 yang melibatkan lebih dari seratus startup dan seratus Venture Capitals dari G20 dan negara-negara tamu.

Mereka hadir bertemu secara fisik maupun daring guna saling berbagi pengalaman dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global di berbagai sektor seperti Cleantech, AI, IoT and Wearables, Green and Smart, serta Mobility and Healthcare.

"Merupakan suatu kehormatan bagi kami, Indonesia, untuk berpartisipasi dalam Liga Inovasi G20. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengakui dan memberi apresiasi terhadap Presidensi G20 Italia yang telah berhasil menggagas dan menginisiasi acara ini," ungkapnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menegaskan Presidensi G20 Indonesia membagikan visi yang sama dalam mempromosikan kerjasama global antara pelaku inovasi publik dan swasta.

"Jadi, kami berkomitmen untuk melanjutkan acara ini selama Presidensi G20 Indonesia tahun depan. Kami berharap dapat menjunjung standar tinggi yang telah ditetapkan Presidensi G20 Italia untuk acara tersebut, sambil memberi upaya terbaik kami dalam membawa acara ini ke level berikutnya," ungkapnya.

## Pulihkan Ekonomi

Dirjen Semuel menyatakan dalam Forum G20, Pemerintah Indonesia menegaskan pandemi Covid-19 sebagai tantangan global. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 tahun depan, memfokuskan pada pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan.

"Presidensi G20 Indonesia telah mengumumkan tema besarnya, yakni *"Recover Together, Recover Stronger"*. Tujuan kami adalah untuk mengatasi dampak pandemi dan mendapatkan kepercayaan global. Tidak hanya akan pulih, tetapi G20 akan kembali lebih kuat dengan mendukung produktivitas, menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan," jelasnya.

Pemerintah Indonesia juga meyakini ekosistem digital penting dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Oleh karena itu, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menyatakan Indonesia berkomitmen memberdayakan bisnis digital dan menciptakan masyarakat digital untuk menghasilkan ekosistem digital yang menyeluruh.

"Komitmen G20 dalam mempromosikan ekonomi digital global akan ditingkatkan dengan merangkul potensi startup. Kita harus mendukung startup yang sedang berkembang dengan menyediakan platform bagi mereka untuk mengembangkan bisnis dan *go global*," jelas Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Menurut Dirjen Semuel, pembangunan ekosistem itu mencakup pengembangan jaringan yang memungkinkan pelaku inovasi, perusahaan investor teknologi pemula dan pemerintah membangun kemitraan.

"Jaringan Inovasi Digital G20, kelanjutan dari Innovation League G20, hadir untuk mewujudkan upaya tersebut," tandasnya.

Upaya itu menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo juga dilatari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital di tanah air. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan media sosial paling aktif di dunia. Sekitar 39% penduduk merupakan pengguna internet di Asia Tenggara, sementara pertumbuhan ekonomi internet Indonesia diperkirakan akan mencapai 11% year-on-year.

"Sebagai negara yang memiliki 202,6 juta pengguna internet dan 170 juta pengguna aktif media sosial, Indonesia memiliki startup teknologi bernilai miliaran dolar di Asia Tenggara. Negara peringkat nomor 5 dalam jumlah startup tertinggi di dunia.

Dengan ekosistem startup yang tumbuh pesat, ekonomi internet Indonesia diprediksi mencapai USD 124 miliar pada tahun 2025," paparnya.

Dirjen Semuel menyatakan, selama pandemi Covid-19, ekonomi internet Indonesia tetap tangguh. Bahkan, dalam menghadapi perlambatan global.

"Selama masa-masa sulit ini, sektor e-Commerce tetap menjadi pendorong pertumbuhan utama, meningkat sebesar USD11 miliar, mengimbangi kontraksi USD7 miliar di sektor travel," ujarnya seraya menyebutkan optimisme Indonesia juga didukung fakta konsumen dan pelaku UMKM mulai berjualan online dan angka terbaru tersebut.

Bahkan, dalam 1,5 tahun terakhir Indonesia telah menyambut kehadiran 3 unicorn baru, di mana salah satunya, Ajaib, platform perdagangan saham online Indonesia. Menurut Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, hanya membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk mencapai status unicorn.

"Dengan latar belakang tersebut, kami yakin Indonesia dapat berbagi pembelajaran berharga kepada negara-negara G20 lainnya, sekaligus berharap dapat bertukar ilmu dengan negara lain, terutama dari berbagai kawasan," ungkapnya.

Dalam acara yang berlangsung hibrida itu, hadir pula Menteri Luar Negeri dan Internasional Kerjasama Republik Italia, Luigi Di Maio; Menteri untuk Inovasi Teknologi dan Digital Transisi Republik Italia, Vittorio Colao; Wakil Menteri Luar Negeri Italia untuk Urusan Asing, Manlio Di Stefano; Duta Besar Indonesia untuk Republik Italia, H.E. Esti Andayani; serta Presiden Badan Perdagangan Italia, Carlo Maria Ferro.

**Portal** [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id)

# Refarming Pita Frekuensi 2,3 GHz Tuntas, Menteri Johnny: Tingkatkan Kualitas Layanan di 9 Klaster



Siaran Pers No. 364/HM/KOMINFO/10/2021  
Senin, 11 Oktober 2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi 2,3 GHz. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, penataan ulang itu dilakukan setelah penetapan Telkomsel dan Smartfren sebagai pemenang seleksi pengguna pita frekuensi 2,3 GHz pada bulan Mei 2021 yang lalu.

“Penataan ulang pita frekuensi radio 2,3 GHz ini dilaksanakan sejak 14 Juli 2021 sampai dengan 28 September 2021, dengan perubahan frekuensi pada 15.577 Base Transceiver Station (BTS) dan dilakukan secara bertahap melalui 9 klaster di berbagai daerah di Indonesia,” jelasnya dalam Konferensi Pers Penyelesaian Refarming 2,3 GHz, di Ruang Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (29/09/2021).

Menurut Menteri Johnny, 9 klaster tersebut mencakup 1) Kepulauan Riau, 2) Sumatera Bagian Utara, 3) Jawa Bagian Tengah, 4) Sulawesi Bagian Utara, 5) Banten, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 6) Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi.

“Klaster 7a sebagian Jawa Bagian Timur yang meliputi antara lain Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Blitar, dan Kabupaten dan Kota Madiun. Dan klaster 7b sebagian Jawa Bagian Timur yang meliputi antara lain Kota Surabaya, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kab. Sumenep, serta klaster 8 Papua, Maluku, dan Maluku Utara,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan pelaksanaan penataan ulang pita frekuensi radio 2,3 GHz, dilakukan atas dasar dua payung hukum, yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 300 Tahun 2021 tentang Penataan Ulang (Refarming) Pita Frekuensi Radio 2,3, dan Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 121 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Ulang atau Refarming Pita Frekuensi Radio

2,3 GHz, sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 123 Tahun 2021.

“Penataan ulang pita frekuensi 2,3 tersebut dilakukan sesuai aturan yang mengharuskan kondisi para pemenang seleksi pengguna pita spektrum frekuensi 2,3 GHz, yang dinilai tidak berdampingan (*non-contiguous*) untuk ditata ulang,” tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, selama proses kegiatan refarming tidak terlepas dari operator PT Berca Hardayaperkasa dan PT Smartfren Telecom, serta koordinasi yang baik antara tim Kementerian Kominfo dan operator, “Sehingga proses *refarming* di suatu klaster dapat diselesaikan dalam tempo kurang dari 24 jam,” ujarnya.

Selama proses refarming berlangsung, Kementerian Kominfo melalui UPT Balai Monitor dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio ikut membantu atas keberhasilan proses refarming.

“Salah satunya dengan melakukan kegiatan Frequency Clearance sebanyak minimal dua kali, yakni sebelum proses pemindahan pita frekuensi radio dan setelah pemindahan pita frekuensi radio pada setiap klaster. Frequency Clearance penting agar benar-benar bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan baik,” jelasnya.

## Tingkatkan Kualitas Layanan

Menurut Menkominfo, dengan diselesaikannya penataan ulang pita 2,3 GHz menandakan bahwa kondisi pita frekuensi radio untuk layanan seluler di Indonesia semakin baik dan semakin optimal. “Sehingga diharapkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terus dipertahankan di level yang terbaik,” ujarnya.

Menteri Johnny menegaskan berbagai manfaat dan keuntungan

dari *refarming* meliputi empat aspek, yakni perbaikan kualitas layanan bagi pelanggan di jaringan 4G maupun 5G, peningkatan kemudahan dan efisiensi pada proses *upgrade* teknologi Mobile Broadband (dari 4G menjadi 5G).

Juga untuk meningkatkan efisiensi pembangunan jaringan 4G, serta menambah kapasitas jaringan 4G untuk mengatasi kepadatan jaringan (*network congestion*),” jelasnya.

Melalui alokasi pita yang sudah *contiguous*, seluruh operator yang beroperasi di pita 2,3 GHz dapat melanjutkan pemenuhan komitmen pembangunan dan penggunaan alokasi pita frekuensi secara maksimal untuk menghadirkan layanan broadband yang berkualitas baik.

“Khususnya untuk meningkatkan kecepatan akses internet mobile broadband yang dapat dinikmati oleh masyarakat,” tandasnya.

## Dukungan untuk PON XX Papua

Menteri Johnny menyatakan, dalam rangka mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-15 Oktober 2021 yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Kominfo mengajak operator seluler untuk menghadirkan jaringan *broadband* dan layanan digital yang optimal.

“Walaupun dilaksanakan di Papua, tapi tetap layanan jaringan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) harus optimal,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Menkominfo menjelaskan bahwa saat ini penyelenggara operator seluler Telkomsel telah menerapkan jaringan teknologi 5G menggunakan frekuensi 2,3 GHz. “Agar dapat dinikmati oleh seluruh kontingen, atlet, penonton, media peliput dan masyarakat di sekitar venue PON Papua, secara khusus di stadion Lukas Enembe,” tandasnya.

Menteri Johnny berharap penataan ulang pita frekuensi radio 2,3 GHz memberikan kesempatan dan kemudahan bagi operator seluler dalam pemanfaatan spektrum frekuensi 2,3 GHz yang semakin optimal dan maksimal.

“Kementerian Kominfo berharap momentum PON XX serta suksesnya dan berhasilnya *refarming* pita frekuensi radio 2,3 GHz dapat mendorong operator seluler di Indonesia untuk menjadi akselerator ekonomi digital, dan mewujudkan Indonesia yang semakin digital, semakin maju,” imbuhnya.

Turut hadir dalam Konferensi Pers Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo; Ismail, Direktur Utama PT Berca Hardayaperkasa (Berca); Bintoro Yuwono, Presiden Direktur PT Smartfren Telecom (Smartfren); Merza Fachys, dan Direktur Network PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel); Nugroho.



## TKDN Perangkat 4G dan 5G Naik 35%, Menkominfo: Tumbuhkan Industri Dalam Negeri

Pemerintah menetapkan pemenuhan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) naik menjadi 35% untuk Perangkat Subscriber Station 4G dan 5G yang akan digunakan di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2021 untuk menumbuhkan industri perangkat telekomunikasi dalam negeri.

“Peraturan ini mengatur tentang kewajiban untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN sebesar 35% untuk Perangkat Subscriber Station 4G dan 5G yang akan beredar dan digunakan di Indonesia. Dengan ketentuan ini, maka nilai TKDN Perangkat Subscriber Station 4G dan 5G naik dari sebelumnya sebesar 30%,” paparnya dalam Konferensi Pers Peraturan Menteri Kominfo Terkait TKDN 5G, dari Ruang Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (21/10/2021).



---

## Akselerasi Pemerintahan Digital, Kominfo Gandeng Pemda Latih ASN

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan akselerasi pemerintahan digital dengan menyiapkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keterampilan digital. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto menyatakan dalam pelaksanaan Program Government Transformation Academy (GTA), Kementerian Kominfo bekerja sama dengan empat pemerintah daerah.

“Pada hari ini kita melaksanakan empat pelatihan Government Transformation Academy (GTA) bagi ASN di empat wilayah secara bersamaan, yaitu ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mamuju Prov. Sulawesi Barat, Kabupaten Jember Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya usai membuka Pelatihan GTA *Blended* di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Senin (25/10/2021).



## Tiba di Manokwari, Menteri Johnny Disambut Gubernur Papua Barat



Manokwari, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tiba di Bandar Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat, Rabu (06/10/2021). Menteri Johnny disambut Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandaca; Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik, Frans P. Istia, serta jajaran Forkopimda.

Kunjungan kerja Menkominfo ke Papua Barat ditujukan untuk memimpin Rapat Koordinasi Percepat Pembangunan Akses Telekomunikasi dan meresmikan Base Transceiver Station (BTS) 4G di tiga Distrik di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dalam kunjungan kerja kali ini Menteri Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif.

## Jadi Tulang Punggung Transformasi Digital, Menteri Johnny: Kominfo Perkuat Monitoring SFR



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan spektrum frekuensi radio menjadi tulang punggung transformasi digital. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan penataan dan monitoring spektrum frekuensi radio (SFR) serta sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan berlangsung dengan baik serta optimal.

“Kominfo membangun kesadaran masyarakat mengenai sumber daya spektrum frekuensi yang tidak terlihat namun sangat berguna dan bermanfaat menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat saat ini di era transformasi digital. Makanya, kita harus mengolahnya serta mengaturnya dengan baik,” jelasnya usai melakukan pengecekan Armada Sistem Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2021 di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (18/10/2021).

## Manfaatkan SiCantik Cloud, Kominfo: Layanan Terpadu Hemat Biaya



Bogor, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah daerah memanfaatkan SiCantik Cloud. Layanan itu akan memadukan layanan perizinan di pemerintah daerah sekaligus menghemat biaya.

Menurut Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aplikasi Informatika Bambang Dwi Anggono sistem yang semula dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah daerah, sekarang didorong untuk dijadikan hanya satu aplikasi saja, yakni SiCANTIK Cloud.

"Selain menghemat pengeluaran biaya negara, sistem perizinan ini akan menjadi lebih terpadu. Pemerintah jadi bisa mengontrol, mampu menjamin apakah pelayanan ini berlangsung dengan baik, tepat waktu sesuai dengan janji, atau tidak," jelasnya dalam Sosialisasi Aplikasi Perizinan Terpadu untuk Publik SiCANTIK Cloud, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (05/10/2021).

---

## Lampaui Kuota, 152 Amatir Radio Ikuti UNAR

Banjarmasin (SDPPI) - Sebanyak 152 peserta mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Non Reguler Periode II di MAN II Model Kota Banjarmasin, Minggu (24/10/2021). Meski melampaui kuota, protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19 tetap diterapkan secara ketat. Mulai dari dukungan fasilitas ruang ujian yang luas, guna memenuhi syarat *social distancing*, pengaturan sesi ujian yang dilaksanakan dalam dua gelombang, hingga dukungan fasilitas komputer dan jaringan internet yang memadai.

Kepala Balai Monitor (Kabalmon) Kelas II Banjarmasin Mujiyo mengapresiasi besarnya animo masyarakat untuk mengikuti ujian. Mereka berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. "Bagi pendaftar yang belum bisa mengikuti ujian, akan diberikan kesempatan untuk mengikuti UNAR CAT Reguler di Kantor Balmon Kelas II Banjarmasin," katanya.



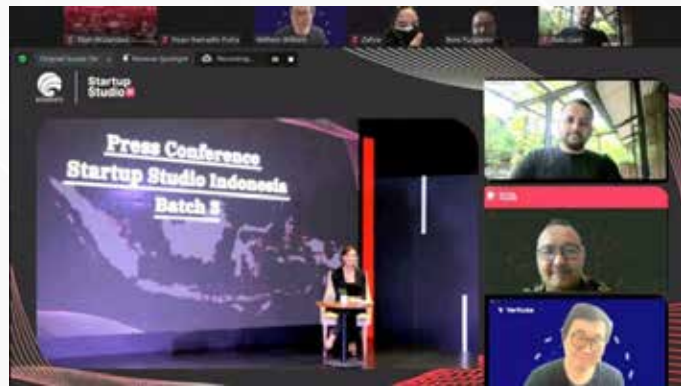


## Antusiasme Tinggi, SSI Batch 3 Diharap Lahirkan Banyak Startup Berkualitas

Jakarta, Ditjen Aptika – Jumlah pendaftar program Startup Studio Indonesia (SSI) batch 3 melonjak lima kali lipat dari sebelumnya. Antusiasme yang besar itu diharap akan mendorong lahirnya startup-startup berkualitas.

“Pada SSI batch dua terdapat 1.063 startup yang mendaftar, sedangkan batch tiga ini jumlah pendaftar mencapai 5.723. Antusiasme yang luar biasa ini kami harapkan tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas,” jelas Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto, saat Konferensi Pers Startup Studio Indonesia Batch 3 secara virtual, Senin (27/09/2021).

Peningkatan pendaftar yang mencapai lima kali lipat ini, lanjut Boni, kami berikan apresiasi kepada rekan-rekan founder startup yang berusaha memajukan startup digitalnya. Ia berharap kepada 15 startup digital terpilih dapat ikut memajukan startupnya dan memecahkan berbagai masalah penting di masyarakat.



## Pemerintah Menindak Tegas Pelanggar Prokes

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, memastikan pemerintah akan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan (prokes) sebagai penguatan upaya pencegahan gelombang ke-3 penyebaran Covid-19 di Indonesia.

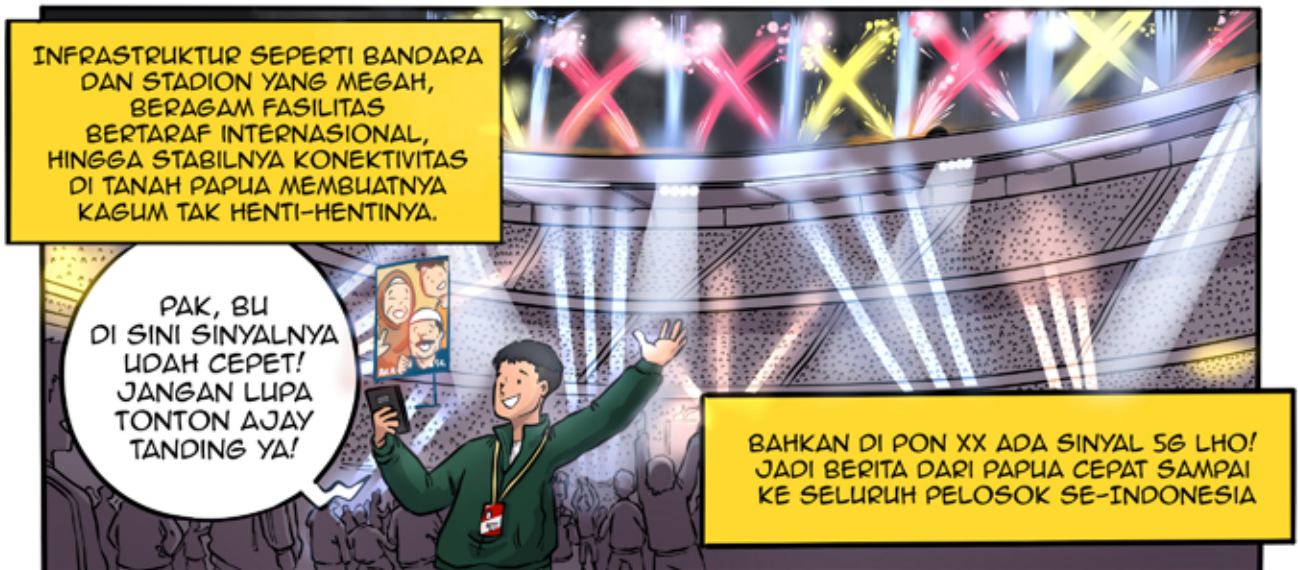
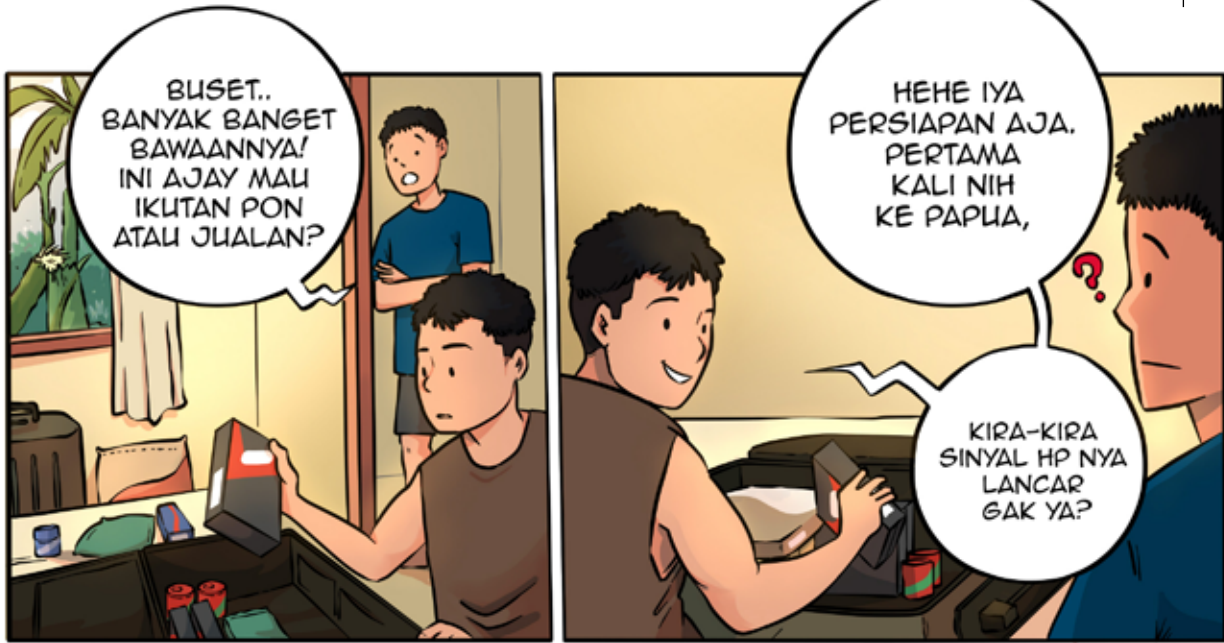
Menkominfo Johnny mengungkapkan, pemerintah menemukan beberapa pelanggaran, salah satunya dalam implementasi penggunaan PeduliLindungi. Pelanggaran seperti ini acap kali ditemukan di tempat wisata dan restoran. "Kami melakukan identifikasi di lapangan dan ditemukan hanya satu orang atau perwakilan dari kelompok yang diharuskan untuk melakukan scanning QR Code agar kapasitas tempat wisata tidak cepat penuh," ujarnya, Selasa (26/10/2021).



## Menteri Johnny Lantik Dewas LPP RRI Periode 2021-2026

Jakarta Pusat, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melantik lima Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode 2021-2026.

Pelantikan Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September 2021. Dewan Pengawas LPP RRI yang dilantik antara lain Anwar Mujahid Adhy Trisnanto, Enderiman Butar Butar, MM Rini Purwandari, Mohamad Kusnaeni, dan Mohammad Rohanudin. Mereka menggantikan anggota dewan pengawas periode sebelumnya, yaitu Mistam, Dwi Hernuningsih, Tantri Relatami, Frederik Ndolu, dan Hasto Kuncoro.





# TOP 10 HOAKS OKTOBER 2021



## 1 [HOAKS] Pecahan Uang Koin Rp100.000 Tahun 2021

Beredar sebuah unggahan video pada media sosial TikTok yang menayangkan uang pecahan Rp100.000 dalam bentuk koin. Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa uang itu merupakan terbitan tahun 2021. Pada koin berwarna emas dalam unggahan tersebut terdapat lambang garuda dengan keterangan tahun 2021-2030 dan tulisan Bank Indonesia. Pengunggah juga menyatakan uang keluaran tahun 2021 tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan penelusuran, Direktur Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan menyatakan informasi bahwa Bank Indonesia mengeluarkan uang baru pecahan Rp100.000 dalam bentuk koin tersebut tidak benar. Bank Indonesia diketahui memang sempat menerbitkan uang khusus Rp100.000. Namun uang tersebut telah dicetak pada tahun 1974 dan kini tak lagi berlaku.

# 2

## [HOAKS] Kuesioner Berhadiah Rp2 Juta Dalam Rangka HUT PLN ke-80

Telah beredar sebuah kuesioner berhadiah Rp2 juta dalam rangka HUT PLN ke-80 tahun. Dilansir dari medcom.id, klaim bahwa link kuesioner berhadiah itu terkait PLN, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut. Informasi senada telah banyak beredar mencatut perusahaan lainnya.

Selamat!

HUT PLN ke-80

Melalui kuesioner, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Rp2.000.000 Rupiah



# 3

## [HOAKS] Vaksin Covid-19 Adalah Antena 5G dan Pengendali Manusia

Beredar sebuah pesan berantai pada platform WhatsApp bahwa vaksin Covid-19 yang telah disuntikkan merupakan rangkaian teknis yang akan terkoneksi ketika jaringan internet 5G diaktifkan, dan secara otomatis orang yang telah divaksinasi akan menjadi antenna Wi-Fi dan terpantau gerak-geriknya.

Faktanya, informasi bahwa vaksinasi Covid-19 adalah rangkaian teknis untuk mengendalikan manusia dan terkoneksi melalui jaringan 5G tersebut adalah hoaks, juga tidak memiliki kredibilitas informasi. Hoaks serupa juga pernah beredar di antaranya menyebutkan bahwa vaksinasi Covid-19 terdapat microchips yang mengandung unsur magnetik. Saat ini, vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah adalah bentuk ikhtiar agar masyarakat dunia dapat keluar dari krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19.

# 4

## [HOAKS] Uni Eropa akan Menghentikan Program Vaksin Covid-19 Mulai Oktober 2021

Beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang menyatakan bahwa Uni Eropa akan menghentikan program vaksin Covid-19. Kebijakan tersebut akan berlaku mulai bulan Oktober 2021. Dalam narasi tersebut, juga dicantumkan tautan pernyataan yang dirilis oleh situs resmi Uni Eropa, serta sebuah tautan berisi profil seorang dokter asal Prancis.

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ada pernyataan resmi dari Parlemen Uni Eropa maupun negara-negara anggota Uni Eropa bahwa program vaksin Covid-19 akan dihentikan mulai Oktober 2021. Dalam tautan pernyataan resmi oleh Uni Eropa, ditegaskan pada paragraf pertama bahwa vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mengakhiri pandemi dan kembali ke kehidupan normal. Dokumen tersebut menjelaskan rencana untuk mengembangkan metode pengobatan bagi pasien Covid-19, dan program tersebut akan dilaksanakan beriringan dengan program vaksinasi, bukan untuk menggantikan program vaksinasi.





## 5 [DISINFORMASI] WHO Akui 500 Ribu Warga Amerika Meninggal Bukan karena Covid-19 Melainkan akibat Vaksin

Beredar sebuah narasi melalui pesan berantai WhatsApp yang menyebut bahwa WHO mengakui sebanyak 500.000 warga Amerika meninggal bukan karena serangan virus Covid-19, melainkan disebabkan karena vaksin Covid-19.

Faktanya, klaim bahwa 500 ribu orang meninggal bukan karena Covid-19 melainkan karena vaksin adalah keliru. Mengutip dari pemberitaan dw.com, hingga berita ini dirilis, jumlah kematian akibat Covid-19 di Amerika Serikat (AS) sedikitnya telah mencapai 500.236 kasus, menurut data dari Universitas Johns Hopkins. AS sendiri menjadi negara dengan jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia. Sebanyak 20 persen kasus kematian dari hampir 2,5 juta kematian global berasal dari negara ini. Jumlah kematian di AS ini melebihi jumlah kematian orang Amerika dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Vietnam jika digabungkan.



## 6 [HOAKS] WHO Akui Covid-19 Sama dengan Flu Biasa dan 500.000 Orang di AS Tewas karena Vaksin

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui Covid-19 sama seperti penyakit flu biasa. Informasi itu juga mengklaim 500.000 orang di Amerika Serikat meninggal dunia karena menerima vaksin Covid-19.

Faktanya, dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan artikel atau pernyataan resmi dari WHO yang menyatakan lembaga itu mengakui Covid-19 sama seperti flu biasa. Mengutip laman resmi WHO, Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Corona baru yang disebut SARS-CoV-2. Kemudian, klaim 500.000 orang di AS meninggal dunia karena divaksinasi berasal dari sumber yang terbukti memiliki riwayat menyebarkan informasi palsu. Selain itu, studi terbaru yang dipublikasikan CDC pada Jumat, 22 Oktober 2021 justru menemukan bahwa tidak ada peningkatan risiko kematian pada penerima vaksin Covid-19.

## 7 [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 Mengandung Parasit Hidup

Beredar sebuah postingan yang menyebut bahwa vaksin Covid-19 mengandung parasit yang dapat tumbuh di dalam tubuh orang yang disuntik. Postingan tersebut juga turut merekomendasikan kepada orang yang divaksinasi untuk menggunakan obat anti parasit Ivermectin.

Faktanya, vaksin Covid-19 diproduksi di lingkungan yang steril dan tidak mengandung parasit sebagai bahannya. Dilansir dari AFP, Profesor Kim Shin-woo, epidemiolog dari Kyungpook National University menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 justru tidak boleh mengandung parasit apa pun, karena ada sistem ketat yang diterapkan selama proses pembuatan untuk mencegah kontaminasi.



Profesor Jung Jae-hun, dari Fakultas Kedokteran dan Sains Universitas Gachon, juga menekankan bahwa semua vaksin diproduksi di lingkungan yang steril, tidak tercemar oleh patogen atau virus lain, apalagi parasit. Sebab jika prosedur tersebut tidak dilakukan maka vaksin tidak akan disetujui untuk digunakan. Selanjutnya, terkait dengan penggunaan obat Ivermectin, para ahli juga memperingatkan agar tidak menggunakannya jika tidak ada parasit di dalam tubuh, dengan alasan risiko kesehatan. Hal itu dikarenakan obat seperti Ivermectin bisa membuat tubuh tegang.



## 8 [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Klungkung

Beredar sebuah tangkapan layar dari sebuah percakapan di aplikasi WhatsApp, sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta. Dalam gambar yang beredar tersebut terlihat akun yang mencatat nama serta foto profil I Made Kasta mengirimkan pesan terkait info lelang kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Dilansir dari kumparan.com, Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta memastikan bahwa akun itu adalah akun palsu alias bukan miliknya. Melalui akun Facebook pribadi miliknya I Made mengunggah hasil tangkapan layar percakapan WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya dan mengimbau apabila ada WhatsApp yang memakai foto profil dan namanya seperti yang dirinya unggah, untuk diabaikan saja.

## 9 [DISINFORMASI] Video Vaksinasi dengan Suntik Kosong di Sekolah Tiongkok Jakarta

Beredar sebuah video pada pesan berantai WhatsApp yang menampilkan seorang tenaga kesehatan yang sedang memperlihatkan jarum suntik yang telah diisi vaksin. Kemudian tenaga kesehatan itu menyuntik dengan suntik yang tampak kosong kepada seorang anak laki-laki. Narasi pada video tersebut dikaitkan dengan vaksinasi yang terjadi di sebuah sekolah di Jakarta.

Setelah ditelusuri, klaim bahwa video itu memperlihatkan vaksinasi sekolah di Jakarta, adalah salah. Faktanya, video itu merupakan vaksinasi di Malaysia. Jika diperhatikan, bahasa yang digunakan pada video itu bukan bahasa Indonesia, tapi Melayu. Kemudian di video itu memperlihatkan sejumlah bendera Malaysia yang dipasang hampir di sekeliling ruangan.



## 10 [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Wakil Bupati Klungkung

Beredar sebuah tangkapan layar dari sebuah percakapan di aplikasi WhatsApp, sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta. Dalam gambar yang beredar tersebut terlihat akun yang mencatat nama serta foto profil I Made Kasta mengirimkan pesan terkait info lelang kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Dilansir dari kumparan.com, Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta memastikan bahwa akun itu adalah akun palsu alias bukan miliknya. Melalui akun Facebook pribadi miliknya I Made mengunggah hasil tangkapan layar percakapan WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya dan mengimbau apabila ada WhatsApp yang memakai foto profil dan namanya seperti yang dirinya unggah, untuk diabaikan saja.





KOMINFO

Check In Belanja Online  
Bisa Sambil Check In

 **PeduliLindungi**

 PeduliLindungi

**PeduliLindungi**  
Di Mana-Mana Yuhuuu~



 **gojek**

 **Grab**

 **livin'**  
by mandiri

 **BNI  
MOBILE**

 **mCash**  
Cash in a Flash

 **LOKÉT**

 **Link  
Aja!**

 **DANA**

 **jaki**

*Cinema XXI*

 **tokopedia**

 **traveloka**

 **Shopee**

 **GOERS**

 **tiket.com**